



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI  
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI  
2021**

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 050/3051 Tahun 2021

Tanggal : 2 Agustus 2021

---

**RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2022 menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pada berbagai Program Daerah dan Program Nasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2022 ini telah melibatkan perwakilan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta para pelaku usaha.

Mekanisme perencanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, *bottom up* dan *top down planning*. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui penjangkauan aspirasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholders*. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional. Pendekatan *bottom up planning* dilaksanakan melalui tahapan Musrengbangdes/Kelurahan, Musrengbang Kecamatan, Musrengbang Kabupaten, Musrengbang Propinsi dan Musrengbangnas untuk merancang program kegiatan pembangunan. Pendekatan *top down planning* merupakan langkah-langkah penyampaian kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi mengenai prioritas pembangunan.

Permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat dan di tengah pandemi covid 19 yang melanda dunia, perlu penanganan dan upaya penyelesaian yang di selaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang direalisasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022. Tantangan yang harus di jawab di masa pandemi pada sektor khususnya perdagangan dan perindustrian adalah Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, serta kegiatan Perlindungan Konsumen dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Pemerintah agar perekonomian masyarakat Kabupaten Pati tetap berjalan. Sedangkan Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan Kegiatan Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri diharapkan tetap bisa berjalan agar sektor Industri yang menyerap banyak tenaga kerja dari Masyarakat Kabupaten Pati tetap

bisa berjalan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah.

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian, Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Akan tetapi, terkhusus untuk Renja PD tahun 2022, adalah pengejawantahan rencana dan isu-isu strategis di Kabupaten Pati yang tertuang dalam dokumen Renstra Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022. Sesuai dengan amanat kedua peraturan perundangan di atas, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator pada urusan perdagangan dan perindustrian dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sektoral.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pti Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
  16. Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
  17. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;
  18. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2022 adalah :

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan operasional bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA PD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah :

- a. Manjabarkan Renstra PD Tahun 2017 – 2022 Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional serta Program Indikatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke dalam rencana program kegiatan prioritas dan harmonisasi dengan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2022.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya dalam pembangunan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam Penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN**

###### **LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

##### **BAB V P E N U T U P**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa :

1. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 memiliki 13 program dan 68 kegiatan. Secara umum realisasi capaian kinerja sebesar 88,45 % dan untuk realisasi keuangan sebesar 86.99%, dengan predikat sangat tinggi.
2. Jumlah kegiatan tahun 2020 yang memenuhi target kinerja (penyerapan anggaran sebesar 90-100%) sebanyak 46 kegiatan, atau 67,65%, kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 76-90%) sebanyak 4 kegiatan, atau 5,88 %, sedangkan kegiatan yang berada di bawah target kinerja (penyerapan anggaran kurang dari 75%) sebanyak 18 kegiatan, atau 26,47%, yang terdiri dari 8 kegiatan di nol kan karena pandemic covid-19, yaitu kegiatan pengadaan asset, ekspor dan IHT. Sedangkan 10 kegiatan lainnya mengalami refocusing anggaran.
3. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas untuk lebih ditekankan bagi pelaksana kegiatan pada eselon terbawah (PPTK) untuk lebih teliti dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan yang tepat, memperhitungkan kondisi makro ekonomi sehingga kendala yang ada di kemudian hari dapat dikurangi.

Uraian lengkap per kegiatan dapat dilihat di Tabel 2.1. yang merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.



## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa kinerja pelayanan PD dapat diukur dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) PD, selain itu juga dapat diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program. Selama kurun waktu 2020 capaian kinerja layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan misi meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri dapat dilihat di bawah ini;

Indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya produktivitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri. Meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan sektor industri kreatif ada 2 yaitu:

1. Indikator Kinerja *pertama* : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan pada tahun 2020, target sebesar 5,6% dengan capaian sebesar -0,33% (perhitungan berdasar angka proyeksi dari BPS);
2. Indikator Kinerja *kedua* : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri pada tahun 2020, target sebesar 5,2% dengan capaian sebesar -0,36%; (perhitungan berdasar angka proyeksi dari BPS);

Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian, meningkatkan kontribusi perindustrian dalam perekonomian ada 3 indikator yaitu:

3. Indikator Kinerja *ketiga* : Pertumbuhan Nilai Ekspor pada tahun 2020, target sebesar 6,00% dengan capaian sebesar -2,07%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target.
4. Indikator Kinerja *keempat* : Persentase sarana perdagangan (pasar) yang ber-SNI pada tahun 2020, target sebesar 0,94% dengan capaian sebesar -0.05%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.
5. Indikator Kinerja *kelima* : Produktivitas lapangan usaha industri pada tahun 2020, target sebesar 130% dengan capaian sebesar 158.53 %; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.
6. Untuk melaksanakan program peningkatan dan pengembangan ekspor digunakan Indikator Kinerja *keenam* yaitu peningkatan nilai ekspor tahunan pada tahun 2020 target sebesar 20% dengan capaian sebesar -2.07%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.

Untuk melaksanakan program perlindungan konsumen dan pengamana perdagangan digunakan 2 indikator yaitu:

7. Indikator Kinerja *ketujuh* yaitu pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala) pada tahun 2020 target sebesar 11% dengan capaian sebesar 5.51%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.
8. Indikator Kinerja *kedelapan* yaitu persentase pengaduan konsumen yang tertangani pada tahun 2020 target sebesar 11% dengan capaian sebesar 15.3%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

Untuk melaksanakan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri digunakan 3 indikator yaitu:

9. Indikator Kinerja *kesembilan* yaitu Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional pada tahun 2020 target sebesar 60% dengan capaian sebesar 60%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah sesuai dengan target.
10. Indikator Kinerja *kesepuluh* yaitu Persentase peningkatan manajemen pasar daerah pada tahun 2020 target sebesar 12%

dengan capaian sebesar -10.07%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.

11. Indikator Kinerja *kesebelas* yaitu Proporsi perdagangan berbasis e-commerce pada tahun 2020 target sebesar 11% dengan capaian sebesar 79%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.
12. Untuk melaksanakan program Pembinaan pedagang kakilima dan asongan digunakan Indikator Kinerja *ke dua belas* yaitu persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan pada tahun 2020 target sebesar 13% capaian sebesar 19.41%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.
13. Untuk melaksanakan program Peningkatan kemampuan teknologi industri digunakan Indikator Kinerja *ketiga belas* yaitu pertumbuhan produksi industri rumah tangga pada tahun 2020 target sebesar 7% dengan capaian sebesar 15.46%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.
14. Untuk melaksanakan program Penataan struktur industri digunakan Indikator Kinerja *keempat belas* yaitu persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu pada tahun 2020 target sebesar 7% dengan capaian sebesar 37.50%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

Indikator yang digunakan dalam mencapai tujuan meningkatnya daya saing sektor industri unggulan dan sektor industri kreatif ada 2 yaitu:

15. Indikator Kinerja *kelima belas* : Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri pada tahun 2020, target sebesar 6% dengan capaian sebesar -0.46%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.
16. Indikator Kinerja *keenam belas* : Pertumbuhan industri kreatif daerah pada tahun 2020, target sebesar 6,5% dengan capaian sebesar -5.2%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.

Indikator yang digunakan dalam mencapai sasaran meningkatnya produktivitas industri unggulan sektor industri dan industri kreatif ada 2 indikator yaitu:

17. Indikator Kinerja *ketujuh belas* : Produktivitas sektor industri unggulan pada tahun 2020, target sebesar 1,4% dengan capaian sebesar 1.39%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.

18. Indikator Kinerja *kedelapan belas* : Produktivitas sektor industri kreatif pada tahun 2020, target sebesar 1,3% dengan capaian sebesar 1.24%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi masih dibawah target.

Untuk melaksanakan program pengembang industri kecil dan menengah digunakan 2 indikator yaitu:

19. Indikator Kinerja *kesembilan belas* : Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil pada tahun 2020, target sebesar 7% dengan capaian sebesar 61.05%; (hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

20. Indikator Kinerja *kedua puluh* : Persentase peningkatan produksi industri kreatif pada tahun 2020, target sebesar 6% dengan capaian sebesar 6.7%; (hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

21. Untuk melaksanakan program Pengembangan sentra-sentra industri potensial digunakan Indikator Kinerja *kedua puluh satu* yaitu persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce pada tahun 2020 target sebesar 7% dengan capaian sebesar 7.59%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.

Pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati bidang Perdagangan adalah:

1. Nilai ekspor mengalami peningkatan namun peningkatannya tidak terlalu signifikan dibandingkan periode sebelumnya
2. Terjadi tren peningkatan jumlah toko modern selama periode lima tahun terakhir kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan para pedagang di pasar tradisional.

Untuk bidang Perindustrian:

1. Keterkaitan industri di hulu khususnya industri skala rumah tangga dengan industri hilir baik skala kecil, menengah maupun besar hingga saat ini belum terjalin secara optimal. Hal ini kemungkinan disebabkan karena belum didukung kelembagaan pelaku industri.
2. Peningkatan kelas industri rumah tangga menjadi industri kecil masih rendah
3. Kapasitas kerja sama e bisnis belum optimal
4. Pemanfaatan teknologi dan penerapan SNI oleh industri kecil masih rendah

### **2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah membuat rancangan awal untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang dapat mendukung Visi Misi Bupati. Akan tetapi karena terbatasnya Dana Alokasi Umum maka usulan kegiatan dalam Renja 2022 dirasionalisasi sehingga lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kegiatan yang harus dihilangkan dan dikecilkan anggarannya.

Implikasi dengan adanya keterbatasan APBD disebabkan dana DAU terbatas adalah berdasarkan atas analisa Rancangan Awal RKPD menunjukkan bahwa semua kebutuhan yang bersifat rutinitas (eks BAU) sudah tercover di dalam rencana. Hanya ada beberapa kegiatan

yang merupakan pengembangan kegiatan yang telah ada, yang kesemuanya itu diharapkan dapat mendukung kegiatan pembinaan bidang perdagangan dan industri. Kegiatan yang rutin amatlah penting, karena selain mendukung kegiatan yang lalu, hasil analisisnya amat diperlukan guna memonitoring perkembangan kegiatan perdagangan. Selain itu juga untuk pengawasan dan program pendamping untuk kegiatan yang akan datang yang lebih tepat sesuai sasaran Renstra sehingga dapat mendukung visi misi Bupati. Secara lebih terinci Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat di Tabel 2.4.

## **2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang RKPD Kecamatan, khususnya program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan Bidang Urusan Perdagangan dan Perindustrian, pada tahun 2022 tertuang dalam pokok pikiran yang terdapat dalam 2 Program yaitu Program Peningkatan Sarana Perdagangan dan Program Pengembangan ekspor. Dengan sub kegiatan masing-masing yakni sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan dan sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan.

Terdapat 22 pokok pikiran yang disetujui dalam sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan yaitu:

1. Belanja Modal Bangunan Pelengkap Irigasi (saluran) 6 paket, dengan 4 paket masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 195.000.000,00 dan 2 paket masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 200.000.000,00.
2. Belanja Modal Bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar 2 paket, masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 195.000.000,00.
3. Belanja Modal Bangunan gedung kantor 6 paket, masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 195.000.000,00.
4. Belanja Modal Jalan Kabupaten kantor 9 paket, dengan 4 paket masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 195.000.000,00 dan 5 paket masing-masing disetujui dengan nilai Rp. 200.000.000,00.

Sedangkan pokok pikiran yang disetujui dalam sub kegiatan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yaitu:

5. Belanja Jasa Iklan/reklame, film dan pemotretan (belanja jasa publikasi dan promosi produk daerah) sebanyak 2 paket disetujui dengan nilai masing-masing Rp. 50.000.000,- dan 40.000.000,00

Terdapat beberapa pokok pikiran yang tidak disetujui diantaranya:

- 1) Pengurangan sirtu jalan dan halaman Pasar Hewan Tayu Kulon

- 2) Pembangunan sarana prasarana tutup saluran plat baja, pembangunan talang antar los Pasar Tayu
- 3) Pembangunan sarana prasarana landasan container sampah tutup saluran Pasar Bulumanis

Lebih lanjut terkait program dan kegiatan masyarakat yang tertuang dalam pokok pikiran dapat dirinci dalam tabel 2.5 berikut:



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2022 merupakan salah satu bahan penyusunan RKPD, karena RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan APBD.

Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati 2022 juga mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RPJMD Kabupaten serta RPJMD Provinsi. Sedangkan untuk kebijakan Nasional, Renja 2022 juga mengacu pada strategi pembangunan nasional, khususnya pada dimensi Pembangunan Sektor Unggulan/Prioritas pada RPJMD 2017-2022 pada sektor industri dan Perdagangan.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

##### **Tujuan**

Tujuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yaitu :

1. Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri, dengan terget Renja tahun 2022 yaitu pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan sebesar 6% dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri sebesar 5.9%
2. Meningkatnya daya saing perdagangan dan industri, dengan target Renja 2022 yaitu pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri sebesar 8%, pertumbuhan industri kreatif daerah sebesar 8%.

## **Sasaran**

1. Meningkatkan kontribusi perdagangan dalam perekonomian;
2. Meningkatkan kontribusi perindustrian dalam perekonomian;
3. Meningkatkan produktivitas sektor industri unggulan dan industri kreatif.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi dan misi tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Pati mempunyai tugas diantaranya adalah mengembangkan sektor Perdagangan dan Perindustrian sehingga potensi ekonomi daerah dapat digali dan dikembangkan. Mengingat sumberdaya ekonomi lokal dan potensi lokal cukup tersedia di pedesaan. Dengan pengembangan tersebut akan terjadi multiplier efek sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat. Sehingga kesemuanya itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Yang nantinya juga akan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun hal ini masih dalam skala kecil, akan tetapi apabila dilakukan bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait yang juga punya misi peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan sektor masing-masing, hal ini akan berdampak luas apabila dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengembangan industri kecil dan menengah juga akan memperhatikan isu-isu penting, yaitu diantaranya isu gender dan kemiskinan, dimana pelatihan dan fasilitasi juga memperhatikan pada kaum perempuan dan orang yang kurang beruntung secara ekonomi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 10 Program, 19 kegiatan, 48 sub kegiatan. Penyebaran lokasi hampir merata di semua kecamatan, dengan pertimbangan potensi daerah masing-masing. Selain itu juga mempertimbangkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana Kecamatan yang telah ditempati lokasi kegiatan, mungkin akan diganti dengan Kecamatan lain, untuk pemerataan.

Selain itu juga memperhatikan potensi industri dan perdagangan yang layak dikembangkan.

Untuk tahun 2022, ada beberapa program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian arah dan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, akan didukung melalui program:

#### URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

#### URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

##### 1. PROGRAM : PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Izin Usaha Toko Swalayan dengan sub kegiatan:

- Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui system pelayanan perijinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

##### 2. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

a. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

b. Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

##### 3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

a. Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;

- b. Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
  - c. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
4. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
    - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
    - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
5. PROGRAM : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
    - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;
6. PROGRAM : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan :
    - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
    - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;

## URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

### 1. PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
  - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

### 2. PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

- a. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota;

Untuk tahun 2022 ini pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati terdapat sebanyak 9 Program, 16 kegiatan, 34 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 27.397.817.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Non Urusan terdiri atas 1 program, 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 21.094.189.000,-
- Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Perdagangan terdiri atas 6 program, 9 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 5.973.628.000,-
- Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Perindustrian terdiri atas 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp. 330.000.000,-

Program kegiatan tersebut tersebar secara merata di wilayah Kabupaten Pati dengan sasaran kelompok masyarakat.

Pada Rancangan Akhir ini ada perbedaan program, perbedaan jumlah kegiatan dan sub kegiatan jika dibandingkan dengan Rancangan Awal. Dalam rancangan awal terdapat 8 program, 18 kegiatan dan 45 sub kegiatan, sedangkan pada Rancangan Akhir terdapat 9 program, 16 kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Kegiatan yang ada di Rancangan Awal tapi tidak ada di Rancangan Akhir adalah Kegiatan Penertiban Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui System Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sedangkan untuk pagu indikatif di Rancangan Awal Renja 2022 sebesar Rp. 36.185.391.250,- dan pada Rancangan Akhir Renja sebesar Rp. 27.397.817.000,-. Perbedaan ini lebih disebabkan karena adanya penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun 2022 secara umum sebagai berikut:

#### **I. NON URUSAN**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

### 1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

### 2. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- a. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

- b. Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

### 3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- a. Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;



- b. Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
  - c. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
4. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
    - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
    - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
5. PROGRAM : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
6. PROGRAM : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan :
    - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
    - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;

### III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

#### 1. PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

#### 2. PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota;

Sedangkan untuk pendanaan pada Rancangan Akhir Renja 2022 sebesar Rp. 27.397.817.000,-. dalam Rancangan Akhir Renja ini bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 27.397.817.000,-, atau 100%, DBHCHT sebesar Rp 0,- atau 0%, APBD Provinsi/Bankeuprop sebesar Rp 0,- atau 0%, APBN sebesar Rp 0,- atau 0%.

Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya tahun 2022. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2022.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022. Diharapkan semua sumber daya perangkat daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

BUPATI PATI,

HARYANTO

**RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2022 menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi dengan perencanaan pada berbagai Program Daerah dan Program Nasional. Proses penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2022 ini telah melibatkan perwakilan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta para pelaku usaha. Mekanisme perencanaan dilakukan melalui pendekatan partisipatif, teknokratik, *bottom up* dan *top down planning*. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan

dilaksanakan melalui penjaringan aspirasi masyarakat dengan melibatkan *stakeholders*. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja secara fungsional. Pendekatan *bottom up planning* dilaksanakan melalui tahapan Musrengbangdes/Kelurahan, Musrengbang Kecamatan, Musrengbang Kabupaten, Musrengbang Propinsi dan Musrengbangnas untuk merancang program kegiatan pembangunan. Pendekatan *top down planning* merupakan langkah-langkah penyampaian kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah propinsi mengenai prioritas pembangunan.

Permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat dan di tengah pandemi covid 19 yang melanda dunia, perlu penanganan dan upaya penyelesaian yang di selaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah yang direalisasikan dalam bentuk usulan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022. Tantangan yang harus di jawab di masa pandemi pada sektor khususnya perdagangan dan perindustrian adalah Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, serta kegiatan Perlindungan Konsumen dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Pemerintah agar perekonomian masyarakat Kabupaten Pati tetap berjalan. Kemudian Perindustrian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Argo dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan Kegiatan Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri diharapkan tetap bisa berjalan agar sektor Industri yang menyerap banyak tenaga kerja dari Masyarakat Kabupaten Pati tetap bisa berjalan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan dari Pemerintah.

Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan pembangunan Perdagangan dan Perindustrian Renja mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Akan tetapi, terkhusus untuk Renja PD tahun 2022, adalah pengejawantahan rencana dan isu-isu strategis di Kabupaten Pati yang tertuang dalam dokumen Renstra Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022. Maka sesuai dengan amanat dalam kedua undang-undang di atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai institusi yang ditunjuk dan berfungsi sebagai koordinator pada urusan perdagangan dan perindustrian dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sektoral.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pti Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati

Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2022 adalah :

#### **1. Maksud**

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah sebagai landasan dan pedoman kebijakan

operasional bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA PD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah :

- a. Manjabarkan Renstra PD Tahun 2017 – 2022 Bidang Perdagangan dan Perindustrian dan sinkronisasi dengan Program Prioritas Nasional serta Program Indikatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke dalam rencana program kegiatan prioritas dan harmonisasi dengan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2022.
- b. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas rencana alokasi sumber daya dalam pembangunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam Penulisan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

#### BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

##### LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V P E N U T U P

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Hasil evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa :

1. Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020 sebanyak 13 program dan 69 kegiatan.  
Secara umum realisasi capaian keuangan sebesar 87,26% dan untuk realisasi kinerja sebesar 86.99%, dengan predikat sangat tinggi.
2. Jumlah kegiatan tahun 2020 yang memenuhi target kinerja (penyerapan anggaran sebesar 90-100%) sebanyak 57 kegiatan, atau 82,60%, kegiatan yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebesar 76-90%) sebanyak 6 kegiatan, atau 8,69 %, sedangkan kegiatan yang berada di bawah target kinerja (penyerapan anggaran kurang dari 75%) sebanyak 19 kegiatan, atau 27,53%, yang terdiri dari 9 kegiatan di nol kan karena pandemic covid-19, yaitu kegiatan pengadaan asset, ekspor dan IHT. Sedangkan 10 kegiatan lainnya mengalami refocusing anggaran.
3. Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas untuk lebih ditekankan bagi pelaksana kegiatan pada eselon terbawah (PPTK) untuk lebih teliti dalam perencanaan kegiatan dan penentuan jadwal kegiatan yang tepat, sehingga kendala yang ada di kemudian hari dapat dikurangi.

Uraian lengkap per kegiatan dapat dilihat di Tabel 2.1. yang merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Masyarakat**

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, untuk kinerja pelayanan PD dapat diukur dari Standar

Pelayanan Minimal (SPM) PD, selain itu juga dapat diukur berdasarkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Program. Selama kurun waktu 2020 capaian kinerja layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat di bawah ini;

1. Indikator Kinerja *pertama* : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan pada tahun 2020, target sebesar 5,6% dengan capaian sebesar -0,33% (perhitungan berdasar angka proyeksi dari BPS);
2. Indikator Kinerja *kedua* : Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri pada tahun 2020, target sebesar 5,2% dengan capaian sebesar -0,36%; (perhitungan berdasar angka proyeksi dari BPS);
3. Indikator Kinerja *ketiga* : Pertumbuhan Nilai Ekspor pada tahun 2020, target sebesar 6,00% dengan capaian sebesar -2,07%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi dibawah target.
4. Indikator Kinerja *keempat* : Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Usaha Perdagangan pada tahun 2020, target sebesar 35,00% dengan capaian sebesar 47,61%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi telah melebihi target.
5. Indikator Kinerja *kelima* : Peningkatan Prosentase IKM yang menggunakan *e-commerce* pada tahun 2020, target sebesar 4,0% dengan capaian sebesar 28,06%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target
6. Indikator Kinerja *keenam* : Pertumbuhan IKM pada tahun 2020 target sebesar 7,6% dengan capaian sebesar 8,26%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
7. Indikator Kinerja *ketujuh* : Pertumbuhan Industri Berbasis Agro pada tahun 2020 target sebesar 7,70% dengan capaian sebesar 7,76%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
8. Indikator Kinerja *kedelapan* : Pertumbuhan Produktivitas Komoditas Unggulan di Sektor Industri pada tahun 2020 target sebesar 6,00% dengan capaian sebesar 0,46%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.
9. Indikator Kinerja *kesembilan* : Pertumbuhan Industri Kreatif Daerah, pada tahun 2020 target sebesar 6,5% dengan capaian sebesar 6,7%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

10. Indikator kinerja *kesepuluh* : Pertumbuhan Produksi Produk Unggulan Sektor Industri, pada tahun 2020 target sebesar 6,5% dengan capaian sebesar 6,85%; hal ini menunjukkan bahwa realisasi melebihi target.

Pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sudah sesuai dengan target yang telah diproyeksikan. Bahkan ada beberapa indikator yang pencapaiannya cukup tinggi.

Pencapaian kinerja pelayanan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya Pertumbuhan Nilai Ekspor pada tahun 2020 dengan akar masalah hal ini menunjukkan bahwa realisasi menurun dikarenakan lemahnya dukungan anggaran biaya promosi,

melambatannya perekonomian dunia akibat pandemi covid-19 dan kendala ketersediaan Kontainer dan Kapal Pengangkut.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah membuat rancangan awal untuk memenuhi kebutuhan anggaran yang dapat mendukung Visi Misi Bupati. Akan tetapi karena terbatasnya Dana Alokasi Umum maka usulan kegiatan dalam Renja 2022 dirasionalisasi sehingga lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa kegiatan yang harus dihilangkan dan dikecilkan anggarannya.

Implikasi dengan adanya keterbatasan APBD disebabkan dana DAU terbatas adalah berdasarkan atas analisa Rancangan Awal RKPD menunjukkan bahwa semua kebutuhan yang bersifat rutinitas (eks BAU) sudah tercover di dalam rencana. Hanya ada beberapa kegiatan yang merupakan pengembangan kegiatan yang telah ada, yang kesemuanya itu diharapkan dapat mendukung kegiatan pembinaan bidang perdagangan dan industri. Kegiatan yang rutin amatlah penting, karena selain mendukung kegiatan yang lalu, hasil analisisnya amat diperlukan guna memonitoring perkembangan kegiatan perdagangan. Selain itu juga untuk pengawasan dan program pendamping untuk kegiatan yang akan datang yang lebih tepat untuk mendukung sasaran Renstra. Yang akan mendukung visi misi Bupati. Secara lebih terinci Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat di Tabel 2.4.

#### **2.5 Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk usulan program dan kegiatan masyarakat yang disampaikan melalui pelaksanaan Musrenbangdes dan Musrenbang RKPD Kecamatan, khususnya program dan kegiatan terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan Bidang Urusan Perdagangan dan Perindustrian, pada tahun 2021 terdapat 3 Program dengan 3 kegiatan usulan dengan perincian sebagaimana tabel 2.5 berikut:

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2022 merupakan salah satu bahan penyusunan RKPD, karena RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum



Anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan APBD.

Selain itu, penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati 2022 juga mengacu pada Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, RPJMD Kabupaten serta RPJMD Provinsi. Sedangkan untuk kebijakan Nasional, Renja 2022 juga mengacu pada strategi pembangunan nasional, khususnya pada dimensi Pembangunan Sektor Unggulan/Prioritas pada RPJMD 2017-2022 pada sektor industri dan Perdagangan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **Tujuan**

Tujuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yaitu :

1. Meningkatnya produktifitas dan inovasi bidang perdagangan dan industri, dengan terget Renja tahun 2022 yaitu pertumbuhan PDRB lapangan usaha perdagangan sebesar 9,38% dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri sebesar 6,65%
2. Meningkatnya daya saing perdagangan dan industri, dengan target Renja 2022 yaitu pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri sebesar 6,14%, pertumbuhan industri kreatif daerah sebesar 6,70%.

#### **Sasaran**

1. Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian;
2. Meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian;
3. Meningkatnya produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industri kreatif.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berdasarkan visi dan misi tersebut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Pati mempunyai tugas diantaranya adalah mengembangkan sektor Perdagangan dan Perindustrian sehingga potensi ekonomi daerah dapat digali dan dikembangkan. Mengingat sumberdaya ekonomi lokal dan potensi lokal cukup tersedia di pedesaan. Dengan pengembangan tersebut akan terjadi multiplier efek sehingga ekonomi masyarakat dapat meningkat. Sehingga kesemuanya itu akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Yang nantinya juga akan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan. Walaupun hal ini masih dalam skala kecil, akan tetapi apabila dilakukan bersama-sama dengan Dinas Instansi terkait yang juga punya misi peningkatan ekonomi masyarakat berdasarkan sektor masing-masing, hal ini akan berdampak luas apabila dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pengembangan industri kecil dan menengah juga akan memperhatikan isu-isu penting, yaitu diantaranya isu gender dan kemiskinan, dimana pelatihan dan fasilitasi juga memperhatikan pada kaum perempuan dan orang yang kurang beruntung secara ekonomi.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 adalah sebanyak 9 Program, 16 kegiatan, 34 sub kegiatan. Penyebaran lokasi hampir merata di semua kecamatan, dengan pertimbangan potensi daerah masing-masing. Selain itu juga mempertimbangkan tahun-tahun sebelumnya. Dimana Kecamatan yang telah ditempati lokasi kegiatan, mungkin akan diganti dengan Kecamatan lain, untuk pemerataan.

Selain itu juga memperhatikan potensi industri dan perdagangan yang layak dikembangkan.

Untuk tahun 2022, ada beberapa program dan kegiatan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian arah dan tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Pencapaian visi dan misi kepala daerah, akan didukung melalui program:

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

1. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
  - a. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
    - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
    - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
  - b. Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan :
    - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
    - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
  - a. Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;
  - b. Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;
  - c. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
    - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;
3. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
  - a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
  - Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
  - Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;
4. PROGRAM : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :
- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
  - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal;
5. PROGRAM : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
- a. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan :
- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
  - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;

#### 6. PROGRAM : PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN

##### PERUSAHAAN

- a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

#### URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

##### 1. PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan  
Sumber Daya Industri

2. PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI  
KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan  
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan  
Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang  
Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan  
Kabupaten/ Kota;

Untuk tahun 2022 ini pada Dinas Perdagangan dan  
Perindustrian Kabupaten Pati terdapat sebanyak 9 program, 16 kegiatan  
dan 34 sub kegiatan. dengan total anggaran Rp. 27.397.817.000,-  
dengan rincian sebagai berikut:

- Non Urusan terdiri atas 1 program, 5 kegiatan dan 17 sub kegiatan  
dengan anggaran Rp. 21.094.189.000,-
- Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Perdagangan terdiri  
atas 6 program, 9 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan anggaran  
Rp. 5.973.628.000,-
- Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Urusan Perindustrian terdiri  
atas 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan anggaran Rp.  
330.000.000,-

Program kegiatan tersebut tersebar secara merata di wilayah  
Kabupaten Pati dengan sasaran kelompok masyarakat.

Pada Rancangan Akhir ini ada perbedaan program, perbedaan jumlah  
kegiatan dan sub kegiatan jika dibandingkan dengan Rancangan Awal.  
Dalam rancangan awal terdapat 8 program, 17 kegiatan dan 42 sub  
kegiatan, sedangkan pada Rancangan Akhir terdapat 9 program, 18  
kegiatan dan 34 sub kegiatan.

Kegiatan yang ada di Rancangan Awal tapi tidak ada di Rancangan Akhir  
adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sedangkan untuk pagu indikatif di Rancangan Awal Renja 2022 sebesar Rp. 50.499.599.400,- dan pada Rancangan Akhir Renja sebesar Rp. 27.397.817.000,-. Perbedaan ini lebih disebabkan karena adanya penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk tahun 2022 secara umum sebagai berikut:

#### **I. NON URUSAN**

##### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

###### **a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

###### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

###### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

###### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

#### e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## II. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

### 1. PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

a. Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;

b. Kegiatan : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan Sub Kegiatan:

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan;

### 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

a. Kegiatan : Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat;



b. Kegiatan : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan;

c. Kegiatan : Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi;

## 2. PROGRAM : PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

a. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
- Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan;
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor;

## 3. PROGRAM : PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

a. Kegiatan : Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan Sub Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;

## 4. PROGRAM : PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

a. Kegiatan : Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Sub Kegiatan :

- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota;
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan;

## 5. PROGRAM : PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

a. Kegiatan : Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

### III. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

#### 1. PROGRAM : PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

a. Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

#### 2. PROGRAM : PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota;

#### 3. PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

a. Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :

- Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas;

Sedangkan untuk pendanaan pada Rancangan Akhir Renja 2022 sebesar Rp. 27.397.817.000,- dalam Rancangan Akhir Renja ini bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebesar Rp. 27.397.817.000,- atau 100%, DBHCHT sebesar Rp 0,- atau 0%, APBD Provinsi/Bankeuprop sebesar Rp 0,- atau 0%, APBN sebesar Rp 0,- atau 0%.

Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini:

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 khususnya tahun 2022. Rencana kerja ini memberikan gambaran terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2022.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah ini perlu dilakukannya pengendalian dan evaluasi setiap triwulannya. Selanjutnya jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 ini dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022. Diharapkan semua sumber daya perangkat daerah terkait dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi kepada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja serta kinerja aparatur.

BUPATI PATI,

HARYANTO

**Tanda Terima**

**Berikut Laporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

**Kabupaten Pati :**

**1 Buku Renja 2022**

**Berupa 1 buku dan soft copy**

**Pati, 19 Juli 2021**

**Disdagperin**

**Bappeda**

**Tanda Terima**

**Berikut Laporan Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

**Kabupaten Pati :**

**1 Buku Renja 2022**

**Berupa 1 buku dan soft copy**

**Pati, 19 Juli 2021**

**Disdagperin**

**Bappeda**

**Pati, Februari 2021**

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020**  
**Kabupaten Pati**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th 2017-2022)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD TH 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2021	
						Target Renja PD Th 2020	Realisasi Renja PD Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11
		<b>NON URUSAN</b>									
<b>1</b>	<b>3.06.3.06.01.01</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
	3.06.3.06.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat	12,800	5,400	800	800	100.00	2,400	8,600 67.19
	3.06.3.06.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	Bulan	222	66	53	53	100.00	59	178 80.18
	3.06.3.06.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	unit	42	12	6	6	100.00	10	28 66.67
	3.06.3.06.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	unit	407	143	41	41	100.00	82	266 65.36
	3.06.3.06.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	jenis	11	2	2	2	100.00	3	7 63.64
	3.06.3.06.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	jenis	401	136	60	60	100.00	9	205 51.12
	3.06.3.06.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	lembar	441,100	123,361	13,500	13,500	100.00	93,000	229,861 52.11
	3.06.3.06.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	jenis	81	22	1	1	100.00	16	39 48.15
	3.06.3.06.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	jenis	153	34	58	58	100.00	35	127 83.01
	3.06.3.06.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	Jenis	35	9	6	6	100.00	6	21 60.00
	3.06.3.06.01.01.16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	jenis	10	4	3	3	100.00	2	9 90.00
	3.06.3.06.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Orang	11,204	2,504	1,490	1,490	100.00	3,000	6,994 62.42
	3.06.3.06.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	kali	4,381	1,550	837	837	100.00	945	3,332 76.06
	3.06.3.06.01.01.19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/tehnis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan	orang	838	352	186	186	100.00	170	708 84.49

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th 2017-2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD TH 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2021	
							Target Renja PD Th 2020	Realisasi Renja PD Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4		5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11
	3.06.3.06.01.01.20	Penyediaan administasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat	buku	358	108	59	57	96.61	78	243	67.88
	3.06.3.06.01.01.21	Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian	Jumlah hasil penilaian	orang	1,131	-	-	-		223	223	
	3.06.3.06.01.01.22	Penyediaan pendukung administrasi	Jumlah penerima honor	orang	239	85	49	44	89.80	50	179	74.90
2	3.06.3.06.01.02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Prosentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik</b>	%	100	100	100		-	100	200	200.00
	3.06.3.06.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Unit	4	2	-	2	#DIV/0!	1	5	125.00
	3.06.3.06.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	Unit	1,064	257	2	200	10,000.00	2	459	43.14
	3.06.3.06.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	unit	411	71	40	70	175.00	84	225	54.74
3	3.06.3.06.01.03	<b>Program peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase aparaturnya yang melakukan pelanggaran aturan disiplin ASN</b>	%	100	100	100		-	100		-
	3.06.3.06.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	stel	1,945	730	385	365	94.81	395	1,490	76.61
	3.06.3.06.01.03.07	Pembinaan disiplin ASN	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	Laporan	48	12	6	12	200.00	12	36	75.00
4	3.06.3.06.01.05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparaturnya sesuai kompetensi dan kualifikasi</b>	%	100	100	100		-	100		-
	3.06.3.06.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti kursus	orang	60	24	200	4	2.00	10	38	63.33
5	3.06.3.06.01.06	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang sesuai ketentuan ( tepat waktu,valid dan up to date )</b>	%	100	100	100		-	100		-
	3.06.3.06.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	buku	100	40	20	20	100.00	20	80	80.00
	3.06.3.06.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	dokumen	10	4	5	2	40.00	2	8	80.00
	3.06.3.06.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	buku	100	40	20	20	100.00	20	80	80.00
	3.06.3.06.01.06.06	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran ( DPA ) SKPD	buku	100	40	20	20	100.00	20	80	80.00
	3.06.3.06.01.06.07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	buku	100	40	20	20	100.00	20	80	80.00



No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th 2017-2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD TH 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2021	
							Target Renja PD Th 2020	Realisasi Renja PD Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4		5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11
	3.06.3.06.01.06.10	Penyusunan rencana strategik SKPD ( Renstra SKPD )	Jumlah dokumen Renstra	Buku	20	20	20	20	100.00	20	60	300.00
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>									-	
		<b>BIDANG URUSAN PERDAGANGAN</b>									-	
<b>6</b>	<b>3.06.3.06.01.15</b>	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Persentase Pertumbuhan pelaku usaha perdagangan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah unit usaha yang diawasi	unit usaha	225	75	36	20	55.56	50	145	64.44
	3.06.3.06.01.15.04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	Buah	1,820,000	689,000	363,000	363,000	100.00	363,000	1,415,000	77.75
	3.06.3.06.01.15.06	Penyelenggaraan pasar murah	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	kali	13	4	3	3	100.00	3	10	76.92
	3.06.3.06.01.15.08	Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	kali	152	98	18	18	100.00	18	134	88.16
	3.06.3.06.01.15.09	Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	unit usaha	495	180	62	62	100.00	126	368	74.34
	3.06.3.06.01.15.10	Pengawasan distribusi dan harga pupuk	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	unit usaha	93	36	15	15	100.00	21	72	77.42
	3.06.3.06.01.15.11	Pembinaan dan Pengembangan usaha dan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	orang	100	70	20	9	45.00	20	99	99.00
	3.06.3.06.01.15.12	Peningkatan Pengawasan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang	UKM	100	65	25	9	36.00	25	99	99.00
	3.06.3.06.01.15.22	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	UKM	40	-	40	-	-	20	20	50.00
	3.06.3.06.01.15.24	Pemantauan bahan bakar minyak	Jumlah alat ukur yang sesuai standart	unit usaha	154	61	11	13	118.18	31	105	68.18
<b>7</b>	<b>3.06.3.06.01.17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>	<b>Persentase Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	UKM	80	-	-	-	-	50	50	62.50
	3.06.3.06.01.17.14	Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	UKM	250	75	-	-	-	15	90	36.00
	3.06.3.06.01.17.18	Pelatihan teknis manajemen ekspor impor	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	UKM	240	90	-	-	-	20	110	45.83
<b>8</b>	<b>3.06.3.06.01.18</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase kebijakan perlindungan pasar tradisional</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.18.06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi	Jumlah pedagang yang dilatih	Pedagang	40	-	80	80	-	-	80	200.00
	3.06.3.06.01.18.08	Intensifikasi pendapatan pasar	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	Pasar di Kab. Pati	110	48	21	21	100.00	22	91	82.73
	3.06.3.06.01.18.09	Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	Jumlah dokumen perencanaan	Pasar di Kab. Pati	110	44	22	22	100.00	22	88	80.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th 2017-2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD TH 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2021	
							Target Renja PD Th 2020	Realisasi Renja PD Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4		5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11
	3.06.3.06.01.18.11	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	Pasar di Kab. Pati	110	44	22	22	100.00	5	71	64.55
	3.06.3.06.01.18.12	Pembinaan dan penertiban pedagang pasar	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	Pasar di Kab. Pati	105	42	21	20	95.24	22	84	80.00
	3.06.3.06.01.18.13	Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar di Kab. Pati	10	10	3	3	100.00	2	15	150.00
	3.06.3.06.01.18.14	Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya	Jumlah alat mendukung pasar	Pasar daerah	105	33	12	12	100.00	21	66	62.86
	3.06.3.06.01.18.17	Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	buah	460	130	90	90	100.00	100	320	69.57
	3.06.3.06.01.18.22	Pembangunan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	Pasar	105	29	4	4	100.00	21	54	51.43
	3.06.3.06.01.18.29	Falitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	pedagang	18874	6,674	2,700	2,700	100.00	4,000	13,374	70.86
	3.06.3.06.01.18.30	Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	UKM	260	240	90	90	100.00	25	355	136.54
	3.06.3.06.01.18.35	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	Pasar di Kab. Pati	15	5	20	20	100.00	3	28	186.67
	3.06.3.06.01.18.37	Fasilitasi pengembangan usaha jasa catering dilingkungan IHT	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	orang	90	-	-	-	-	20	20	22.22
<b>9</b>	<b>3.06.3.06.01.19</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKILIMA DAN ASONGAN</b>	<b>Prosentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.19.02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	orang	300	160	10	10	100.00	30	200	66.67
	3.06.3.06.01.19.03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	orang	105	35	3	3	100.00	20	58	55.24
	3.06.3.06.01.19.09	Pemberdayaan usaha bagi PKL dan asongan dilingkungan IHT	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	140	27	30	30	100.00	40	97	69.29
		<b>BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN</b>									-	
<b>10</b>	<b>3.06.3.06.01.16</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH</b>	<b>Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.16.03	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Jumlah Naskah Akademik yang tersusun	NA	2	1	1	-	-	-	1	50.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes) / Kegiatan(output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Th 2017-2022)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Th 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan (Renja PD TH 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Th 2021	
							Target Renja PD Th 2020	Realisasi Renja PD Th 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Th 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		2	3	4		5	6	7	8=(7/6)*100	9	10=5+7+9	11
	3.06.3.06.01.16.07	Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Jumlah IKM/UMKM yang dikunjungi	IKM / UKM	80	20	20	2	10.00	20	42	52.50
	3.06.3.06.01.16.11	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	IKM	80	-	40	35	87.50	20	55	68.75
	3.06.3.06.01.16.23	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	IKM	160	20	20	20	100.00	40	80	50.00
	3.06.3.06.01.16.31	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Konfeksi dan bordir di lingkungan IHT	Jumlah IKM konfeksi dan bordir yang mengikuti pelatihan	IKM	80	20	20	20	100.00	20	60	75.00
	3.06.3.06.01.16.32	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Jasa perbengkelan di lingkungan IHT	Jumlah IKM Jasa perbengkelan yang mengikuti pelatihan	IKM	80	80	80	80	100.00	20	180	225.00
	3.06.3.06.01.16.38	Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau	Jumlah IKM yang mengikuti pameran	IKM	260	75	1	-	-	30	105	40.38
	3.06.3.06.01.16.42	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Kerajinan dilingkungan IHT	Jumlah IKM kerajinan yang mengikuti pelatihan	IKM	100	20	20	20	100.00	20	60	60.00
<b>11</b>	<b>3.06.3.06.01.17</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEMAPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI</b>	<b>Prosentase pertumbuhan industri yang sudah ber SNI.</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.17.03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	IKM	80	20	20	20		20	60	75.00
	3.06.3.06.01.17.18	Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses Teknis Produksi IK Kerajinan	Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan	IKM	140	20	20	-	-	20	40	28.57
<b>12</b>	<b>3.06.3.06.01.18</b>	<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>Prosentase peningkatan keterkaitan industri hilir - hulu</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.18.03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Jumlah kualitas garam konsumsi yang memenuhi standar	IKM	450	100	88	84	95.45	91	275	61.11
	3.06.3.06.01.18.04	Pemetaan IKM Kab. Pati ( Pendataan Industri )	Jumlah IKM Kabupaten Pati yang terdata	IKM	450	105	-	-		500	605	134.44
<b>13</b>	<b>3.06.3.06.01.19</b>	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>Prosentase peningkatan keterkaitan industri hilir - hulu</b>	%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		-	<b>100</b>		-
	3.06.3.06.01.19.03	Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	IKM	450	20	120	120	100.00	20	160	35.56

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020**  
**Kabupaten Pati**

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	11	11	13	13	14
1	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan (Persen)			4.80	5.20	5.60	5.80	6.00	10.28	(0.33)	5.80	6.00	
2	Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri (Persen)			4.60	4.87	5.20	5.40	5.90	7.46	6.65	5.40	5.90	
3	Pertumbuhan Nilai Ekspor (Persen)			5.50	6.00	6.00	6.50	7.00	14.44	(2.07)	6.50	7.00	
4	Peningkatan prosentase Kualitas Sarana dan Prasarana Perdagangan (Persen)			25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	31.82	47.61	40.00	45.00	
5	Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e-commerce (Persen)			2.00	3.50	4.00	4.00	5.00	27.77	28.06	4.00	5.00	
6	Pertumbuhan IKM (Persen)			7.40	7.60	7.60	8.00	8.20	7.75	8.26	8.00	8.20	
7	Pertumbuhan industri berbasis agro (Persen)			6.80	7.20	7.70	8.00	8.30	7.24	7.76	8.00	8.30	
8	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri (Persen)			5.00	5.50	6.00	7.00	8.00	6.54	0.46	7.00	8.00	
9	Pertumbuhan industri kreatif daerah (Persen)			5.50	6.00	6.50	7.00	8.00	9.30	(5.20)	7.00	8.00	
10	Pertumbuhan produksi produk unggulan sektor industri (Persen)			5.50	6.00	6.50	7.00	8.00	6.18	0.46	7.00	8.00	

\* Tahun berjalan 2020

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Pati

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					27,397,817,000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					27,067,817,000	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan		21,094,189,000		
			Persentase Layanan Administrasi yang tertangani					Persentase Layanan Administrasi yang tertangani				
			Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya					Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya				
			Persentase kelulusan diklat ASN					Persentase kelulusan diklat ASN				
			Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik					Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik				
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		19,188,000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah dokumen perencanaan PD	20 buku	20,171,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	5,092,000		
			Jumlah dokumen Renstra		6,000,000			Jumlah dokumen Renstra				
			Jumlah dokumen Renstra Perubahan		-			Jumlah dokumen Renstra Perubahan				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKAP	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati	RKAP	2 dokumen	5,083,200		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		RKPA	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati	RKPA	2 dokumen	4,400,000		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Pati	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	20 buku	18,843,000							
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah data kinerja yang terisi	20 buku	25,123,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah data kinerja yang terisi	20 buku	4,612,800		
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen administrasi keuangan			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen administrasi keuangan		15,452,951,000		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	12 dokumen	17,260,207,400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	12 dokumen	15,027,758,000		
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	223 orang	2,179,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	30 orang	-		
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	Jumlah honor yang dibayarkan	170 orang	4,187,297,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	420,031,000		
			Jumlah dokumen yang dibuat	78 dokumen	85,311,000							
			Jumlah penerima honor	50 orang	346,520,000							
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	5,234,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	2,000,000		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pati	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	20 buku	31,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pati	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	20 buku	3,162,000		
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		-		

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	415 baju	156,836,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	415 baju	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	12 laporan	16,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 laporan	-	
			Jumlah SDM yang mengikuti kursus	10 orang	20,937,000						
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah</b>		<b>374,760,000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	21 jenis	19,132,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 jenis	50,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	359,681,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	100,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati	Jumlah ATK yang dibeli	95 jenis	172,188,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati	Jumlah bahan logistik kantor	2 unit	170,135,000	
			Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	2 jenis	4,731,000						
			Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3100 orang	73,008,000						
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	95.000 lembar	26,861,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	12 laporan	-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 jenis	38,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 jenis	-	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	945 Perjalanan	386,111,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	775 Perjalanan	54,625,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati	Jumlah arsip dinamis	4 jenis data	2,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati	Jumlah arsip dinamis	20 jenis	-	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	260,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	-	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>4,863,180,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati	Jumlah surat yang terlayani	2.600 Surat	19,132,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati	Jumlah surat yang terlayani	3200 Surat	2,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	59 Rekening	1,605,464,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	40 Rekening	826,200,000	
			Jumlah layanan publik berbasis e-gov	1 paket	2,000,000			Jumlah layanan publik berbasis e-gov			
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	12 jenis	57,396,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	15 jenis	-	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati	Jumlah jasa layanan umum	3 Paket	286,980,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati	Jumlah jasa layanan umum	2 Paket	4,034,980,000	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>384,110,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	84 unit	479,589,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	94 unit	219,245,000	
			Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	85 unit	40,081,000						
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2 unit	115,949,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2 unit	164,865,000	
						<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>		<b>418,628,000</b>	
						<b>Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>Target penerbitan perijinan pedagang pasar rakyat</b>		<b>418,628,000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Jumlah wajib retribusi	22 pasar se kab pati	418,628,000	
								Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	4000 ijin pedagang dan 40 sewa kios		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>		<b>5,080,000,000</b>	
			<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>					<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>			
<b>I</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>			<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>		<b>5,020,000,000</b>	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	3 pasar	669,639,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	22 pasar	4,770,000,000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah wajib retribusi	22 pasar se Kab. Pati	133,395,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah dokumen perencanaan	22 paket	250,000,000	
			Jumlah dokumen perencanaan	22 dokumen	37,144,000				-		
			Jumlah buku profil pasar	5 buku	200,000,000			Jumlah pasar yang dipelihara	21 pasar daerah		
			Jumlah pasar yang dipelihara	22 pasar se Kab. Pati	1,000,000,000			Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	22 pasar		
			Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	21 pasar daerah	52,002,000			Jumlah pasar yang direvitalisasi	5 pasar		
			Jumlah pasar yang direvitalisasi	2 pasar	16,154,701,000			Jumlah alat mendukung pasar	21 pasar daerah		
			Jumlah alat mendukung pasar	21 pasar daerah	170,864,000				-		
			Jumlah Pengelola / management pasar daerah	21 orang	49,147,000			Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	22 pasar se kab pati		
			Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	21 pasar daerah	160,000,000				-		
			Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	4.000 pedagang	44,573,000						
			Jumlah kemampuan manajemen pengelolaan	22 orang	40,000,000						
<b>II</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>			<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>		<b>60,000,000</b>	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	110 toko / kios	48,714,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	25 orang	10,000,000	
			Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	30 PKL	19,933,000			Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	90 Kios		
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	30 PKL	329,783,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	100 pkl	50,000,000	
			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan	90 PKL	93,000,000						
			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	40 PKL	199,332,000			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30 PKL		
<b>C</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>		<b>30,000,000</b>	
<b>I</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting</b>		<b>10,000,000</b>	
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pati	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	114 unit usaha	29,803,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pati	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	216 unit usaha	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>		<b>10,000,000</b>	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah unit usaha yang diawasi	55 unit usaha	14,902,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah unit usaha yang diawasi	48 unit usaha	10,000,000	
			Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	18 kepokmas	11,921,000			Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	18 kepokmas		
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	3 jenis barang	387,443,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	1600 Paket	-	
III	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>			<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>		<b>10,000,000</b>	
			<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>					<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>			
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pati	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	24 Pengecer	13,411,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pati	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	50 Pengecer	10,000,000	
D	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>		<b>220,000,000</b>	
I	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai ekspor pertahun</b>			<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Nilai ekspor pertahun</b>		<b>220,000,000</b>	
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20 orang	45,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20 IKM	60,000,000	
			Jumlah program yang dikoordinasikan	20 orang	-			Jumlah program yang dikoordinasikan	20 orang		
			Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	20 orang	55,000,000			Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	50 IKM		
			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	25 IKM	509,861,000			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	5 Program		
			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	25 IKM	284,846,000			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	20 orang		
2	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pati	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	25 IKM	37,516,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pati	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	20 IKM	110,000,000	
			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	20 pelaku usaha	549,027,000			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	20 IKM		
			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	20 IKM				Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	20 IKM		
			Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	20 IKM				Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	20 IKM		
3	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pati	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	20 IKM	45,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pati	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	20 orang	50,000,000	
			Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	50 UKM	172,362,000			Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	25 orang		
			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	50 IKM	52,027,000			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	8 orang		
E	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>		<b>150,000,000</b>	
I	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>Jumlah alat ukur yang sesuai standart</b>			<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>Jumlah alat ukur yang sesuai standart</b>		<b>150,000,000</b>	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pati	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTPP ) yang ditera dan tera ulang	393000 buah	343,443,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pati	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTPP ) yang ditera dan tera ulang	383000 buah	150,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah pemilik alat yang melakukan tera	31.000 buah	20.000.000						
			Jumlah dokumen pengawasan	72 dokumen	10.000.000						
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pati	Jumlah SPBU yang dipantau	31 SPBU	14.000.000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pati		32 SPBU	-	
<b>F</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>		<b>75.000,000</b>	
<b>I</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Jumlah pedagang berbasis e-commerce</b>			<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		<b>Jumlah pedagang berbasis e-commerce</b>		<b>75.000,000</b>	
			Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mendapatkan pelatihan	30 pedagang	45.000.000						
			Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan	120 pedagang	74.289.000						
1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	20 orang	50.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	25 orang	25.000.000	
2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pedagang yang dilatih	20 pedagang	175.000.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pedagang yang dilatih	50 IKM	50.000.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>330.000,000</b>	
<b>G</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>		<b>290.000,000</b>	
<b>I</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah regulasi di bidang industri</b>			<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah regulasi di bidang industri</b>		<b>290.000,000</b>	
			<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina</b>					<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina</b>			
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	1 Naskah Akademik	-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah Raperda yang disusun	1 Raperda	-	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	20 IKM	8.941.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	35 IKM	250.000.000	
			Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	40 IKM	30.000.000			Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	20 IKM	202.203.000			Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	60 IKM		
			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	20 IKM	110.000.000			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	20 IKM		
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pati	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 orang	25.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Pati	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM	40.000.000	
			Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM	45.000.000			Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20 orang	25.000.000			Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	20 orang	30.000.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	35 IKM	-	
4	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	25 IKM	14.902.000			Jumlah IKM yang dikunjungi	25 IKM		
			Jumlah IKM yang dikunjungi	20 IKM	15.000.000						
<b>H</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>		<b>40.000,000</b>	
			<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>					<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>			
			<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>					<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>			

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan</b>		<b>Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi</b>			<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan</b>		<b>Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi</b>		<b>40,000,000</b>	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pati	Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	20 IKM	45,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pati	Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	20 IKM	-	
			Jumlah IKM Tapioka yg mendapat pelatihan	20 IKM	30,000,000						
			Jumlah industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan	20 IKM	94,000,000						
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pati	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	40 IKM	65000000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pati	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60 orang	40,000,000	
			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk	20 IKM	20,000,000			Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	40 IKM		
			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk	20 IKM	99,711,000			Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	40 IKM		
			Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	20 IKM	30,000,000			Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	89 IKM		
			Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60 IKM	65,000,000						
			Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	120 orang	212,098,000						
			Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	20 UKM	7,451,000						
			Jumlah IKM yang difasilitasi	20 IKM	120,000,000						
			Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pelatihan	80 IKM	125,000,000						
			Tersedianya papan informasi kluster	4 kluster	140,000,000						
			Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	95 IKM	303,829,000						
			Jumlah IKM Kabupaten Pati yang terdata	500 IKM	78,220,000						
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			-
I	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			-
1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Pati	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	4 Jenis Data		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Pati	Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	15 IKM		-
			Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	3 jenis cetakan	85,000,000						
	<b>TOTAL</b>				<b>50,499,599,400</b>					<b>27,397,817,000</b>	

Tabel 2.5

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

## Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	2	3	4	5	6
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
<b>I</b>	Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
<b>1</b>	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kec. Gabus, Gunung Wungkal dan Tlogowungu	Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	20 IKM	a. Pelatihan dan pembinaan harus tetap dilakukan untuk memperkuat jaringan klaster industri khususnya IKM makanan ringan b. IKM makanan ringan harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah seperti : harus mempunyai Ijin Kelayakan Pangan / PIRT, sertifikasi halal, SNI, Ijin dari BPOM
<b>2</b>	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Kec. Kayen dan Batangan	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapatkan pelatihan	120 IKM	a. Pelatihan dan pembinaan harus tetap dilakukan untuk memperkuat jaringan klaster industri khususnya IKM Olahan Ikan b. IKM Olahan Ikan harus mengikuti standar yang telah ditentukan oleh Pemerintah seperti : harus mempunyai Ijin Kelayakan Pangan / PIRT, sertifikasi halal, SNI, Ijin dari BPOM

Tabel 4.1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				27,397,817,000				40,998,875,735
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				27,067,817,000				40,365,416,735
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan			21,094,189,000				28,771,951,910
						Persentase Layanan Administrasi yang tertangani							
						Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya							
						Persentase kelulusan diklat ASN							
						Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik							
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			19,188,000				21,106,800
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Kab. Pati	2 dokumen	5,092,000	DAU		2 dokumen	5,601,200
						Jumlah dokumen Renstra							
						Jumlah dokumen Renstra Perubahan							
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKAP	Kab. Pati	2 dokumen	5,083,200	DAU		2 dokumen	5,591,520
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKPA	Kab. Pati	2 dokumen	4,400,000	DAU		2 dokumen	4,840,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	Kab. Pati	20 buku	4,612,800			20 buku	5,074,080
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>			<b>15,452,951,000</b>	DAU			<b>205,001,320,960</b>
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	Kab. Pati	12 dokumen	15,027,758,000	DAU		12 dokumen	19,849,238,510
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pati	30 orang	-			30 orang	13,225,000
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	12 dokumen	420,031,000	DAU		12 dokumen	606,784,850
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Pati	5 dokumen	2,000,000	DAU		5 dokumen	2,200,000
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	Kab. Pati	20 buku	3,162,000	DAU		20 buku	29,872,600
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>			-				<b>323,351,250</b>
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati	415 baju	-			415 baju	269,790,000
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati	2 laporan	-			2 laporan	53,561,250
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah</b>			<b>374,760,000</b>				<b>924,426,650</b>
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Pati	1 jenis	50,000,000	DAU		1 jenis	55,000,000
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pati	2 unit	100,000,000	DAU		2 unit	110,000,000
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Kab. Pati	2 unit	170,135,000	DAU		2 unit	530,436,350
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Kab. Pati	12 laporan	-			12 laporan	19,837,500

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pati	7 jenis	-			7 jenis	23,575,000
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	Kab. Pati	775 Perjalanan	54,625,000	DAU		775 Perjalanan	182,932,800
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis	Kab. Pati	20 jenis	-			20 jenis	2,645,000
3	30	1	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			-				<b>747,500,000</b>
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	1 Paket	-			1 Paket	747,500,000
3	30	1	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>4,863,180,000</b>				<b>5,691,154,500</b>
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani	Kab. Pati	3200 Surat	2,000,000	DAU		3200 Surat	13,225,000
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Kab. Pati	40 Rekening	826,200,000	DAU		40 Rekening	950,130,000
						Jumlah layanan publik berbasis e-gov							
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Kab. Pati	15 jenis	-			15 jenis	87,572,500
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	Kab. Pati	2 Paket	4,034,980,000	DAU		2 Paket	4,640,227,000
3	30	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>384,110,000</b>				<b>563,091,750</b>

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pati	94 unit	219,245,000	DAU		94 unit	252,131,750
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Pati	2 unit	164,865,000	DAU		2 unit	310,960,000
3	30	2			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>			<b>418,628,000</b>				<b>9,655,256,250</b>
3	30	2	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>	<b>Target penerbitan perijinan pedagang pasar rakyat</b>			<b>418,628,000</b>				<b>9,347,775,000</b>
3	30	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah wajib retribusi		22 pasar se kab pati	418,628,000	DAU		22 pasar se kab pati	7,668,200,000
						Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar		4000 ijin pedagang dan 40 sewa kios				4000 ijin pedagang dan 40 sewa kios	1,679,575,000
3	30	3			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>			<b>5,080,000,000</b>				
						<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>							
3	30	3	2.01		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>			<b>5,020,000,000</b>				

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	Kab. Pati	22 pasar	4,770,000,000	DAU		22 pasar	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Pati	22 paket	250,000,000	DAU		22 paket	
						Jumlah pasar yang dipelihara		21 pasar daerah				21 pasar daerah	
						Jumlah Kesadaran tertib para pedagang		22 pasar				22 pasar	
						Jumlah pasar yang direvitalisasi		5 pasar				5 pasar	
						Jumlah alat mendukung pasar		21 pasar daerah				21 pasar daerah	
						Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya		22 pasar se kab pati				22 pasar se kab pati	
3	30	3	2.02		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>			<b>60,000,000</b>				<b>307,481,250</b>
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	Kab. Pati	25 orang	10,000,000	DAU		25 orang	142,168,750
						Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan		90 Kios				90 Kios	
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	Kab. Pati	100 pkl	50,000,000	DAU		100 pkl	165,312,500
						Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan		30 PKL				30 PKL	<b>247,307,500</b>
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>			<b>30,000,000</b>				<b>35,707,500</b>
3	30	4	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting			<b>10,000,000</b>				35,707,500



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	Kab. Pati	216 unit usaha	10,000,000	DAU		216 unit usaha	
3	30	4	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>10,000,000</b>				<b>185,150,000</b>
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah unit usaha yang diawasi	Kab. Pati	48 unit usaha	10,000,000	DAU		48 unit usaha	44,965,000
						Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa		18 kepokmas				18 kepokmas	
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	Kab. Pati	1600 Paket	-			1600 Paket	140,185,000
3	30	4	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>			<b>10,000,000</b>				<b>26,450,000</b>
						<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>							
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	Kab. Pati	50 Pengecer	10,000,000	DAU		50 Pengecer	26,450,000
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>			<b>220,000,000</b>				<b>1,214,010,725</b>

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	5	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Nilai ekspor pertahun			220,000,000	DAU			1,214,010,725
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	Kab. Pati	20 IKM	60,000,000	DAU		20 IKM	993,528,125
						Jumlah program yang dikoordinasikan		20 orang				20 orang	
						Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi		50 IKM				50 IKM	
						Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri		5 Program				5 Program	
						Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi		20 orang				20 orang	
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	Kab. Pati	20 IKM	110,000,000	DAU		20 IKM	115,000,000
						Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi		20 IKM				20 IKM	
						Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah jenis produk/komoditas ekspor		20 IKM				20 IKM	
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	Kab. Pati	20 orang	50,000,000	DAU		20 orang	105,482,600

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor		25 orang				25 orang	
						Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan		8 orang				8 orang	
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>			<b>150,000,000</b>				<b>318,722,500</b>
3	30	6	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah alat ukur yang sesuai standart</b>			<b>150,000,000</b>				<b>318,722,500</b>
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	Kab. Pati	383000 buah	150,000,000	DAU		383000 buah	306,820,000
												11,902,500	
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Kab. Pati	32 SPBU	-			32 SPBU	
3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>			<b>75,000,000</b>				<b>142,167,850</b>
3	30	7	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah pedagang berbasis e-commerce</b>			<b>75,000,000</b>				<b>142,167,850</b>
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	Kab. Pati	25 orang	25,000,000	DAU		25 orang	34,728,850
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dilatih	Kab. Pati	50 IKM	50,000,000	DAU		50 IKM	107,439,000
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>330,000,000</b>				<b>633,459,000</b>

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	31	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil			290,000,000				205,786,000
3	31	2	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi di bidang industri			290,000,000				205,786,000
						Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina							
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda yang disusun	Kab. Pati	1 Raperda	-			1 Raperda	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	Kab. Pati	35 IKM	250,000,000	DAU		35 IKM	115,000,000
						Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	48,727,000
						Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan		60 IKM				60 IKM	
						Jumlah IKM yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	20 IKM	40,000,000	DAU		20 IKM	22,000,000
						Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
					Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	Kab. Pati	35 IKM	-			35 IKM	20,059,000
3	31	2	2.01	6		Jumlah IKM yang dikunjungi		25 IKM				25 IKM	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	31	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga			40,000,000				370,173,000
						Persentase peningkatan produksi industri kreatif							
						Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu							
3	31	3	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi			40,000,000				370,173,000
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	Kab. Pati	20 IKM	-			20 IKM	22,000,000
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	60 orang	40,000,000	DAU		60 orang	348,173,000
						Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi		40 IKM				40 IKM	
						Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman		40 IKM				40 IKM	
						Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart		89 IKM				89 IKM	
3	31	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			-				57,500,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	31	4	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce			-			57,500,000	
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	Kab. Pati	15 IKM	-		15 IKM	57,500,000	
<b>TOTAL</b>									<b>27,397,817,000</b>			<b>40,998,875,735</b>	

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Pati

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	5	6	7	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		<b>27,397,817,000</b>	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>		<b>27,067,817,000</b>	
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>21,094,189,000</b>	
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>19,188,000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 buku	20,171,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	5,092,000	
			6,000,000				
			-				
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	5,083,200	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4,400,000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	20 buku	18,843,000				
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 buku	25,123,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 buku	4,612,800	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>15,452,951,000</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	17,260,207,400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 dokumen	15,027,758,000	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	223 orang	2,179,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 orang	-	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	170 orang	4,187,297,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	420,031,000	
		78 dokumen	85,311,000				
		50 orang	346,520,000				
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 dokumen	5,234,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 dokumen	2,000,000	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 buku	31,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 buku	3,162,000	
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>-</b>	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	5	6	7	10	11	12
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	415 baju	156,836,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	415 baju	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 laporan	16,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 laporan	-	
		10 orang	20,937,000				
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>374,760,000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21 jenis	19,132,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 jenis	50,000,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 unit	359,681,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 unit	100,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95 jenis	172,188,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 unit	170,135,000	
		2 jenis	4,731,000				
		3100 orang	73,008,000				
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	95.000 lembar	26,861,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 laporan	-	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8 jenis	38,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 jenis	-	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	945 Perjalanan	386,111,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	775 Perjalanan	54,625,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 jenis data	2,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20 jenis	-	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>-</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	260,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	-	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>4,863,180,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.600 Surat	19,132,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3200 Surat	2,000,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59 Rekening	1,605,464,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40 Rekening	826,200,000	
		1 paket	2,000,000				
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 jenis	57,396,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 jenis	-	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3 Paket	286,980,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Paket	4,034,980,000	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>384,110,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	84 unit	479,589,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	94 unit	219,245,000	
		85 unit	40,081,000				
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	115,949,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	164,865,000	
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>418,628,000</b>	
				<b>Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan</b>		<b>418,628,000</b>	



No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	5	6	7	10	11	12
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22 pasar se kab pati	418,628,000	
					4000 ijin pedagang dan 40 sewa kios		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>5,080,000,000</b>	
<b>I</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>5,020,000,000</b>	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3 pasar	669,639,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	22 pasar	4,770,000,000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	22 pasar se Kab. Pati	133,395,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	22 paket	250,000,000	
		22 dokumen	37,144,000		-		
		5 buku	200,000,000		21 pasar daerah		
		22 pasar se Kab. Pati	1,000,000,000		22 pasar		
		21 pasar daerah	52,002,000		5 pasar		
		2 pasar	16,154,701,000		21 pasar daerah		
		21 pasar daerah	170,864,000		-		
		21 orang	49,147,000		22 pasar se kab pati		
		21 pasar daerah	160,000,000		-		
		4.000 pedagang	44,573,000				
		22 orang	40,000,000				
<b>II</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>			<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>60,000,000</b>	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	110 toko / kios	48,714,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	25 orang	10,000,000	
		30 PKL	19,933,000		90 Kios		
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	30 PKL	329,783,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100 pkl	50,000,000	
		90 PKL	93,000,000				
		40 PKL	199,332,000		30 PKL		
<b>C</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>30,000,000</b>	
<b>I</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>10,000,000</b>	
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	114 unit usaha	29,803,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	216 unit usaha	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )			Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	5	6	7	10	11	12
II	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>			<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>10,000,000</b>	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	55 unit usaha	14,902,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	48 unit usaha	10,000,000	
		18 kepokmas	11,921,000		18 kepokmas		
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	3 jenis barang	387,443,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1600 Paket	-	
III	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>10,000,000</b>	
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	24 Pengecer	13,411,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	50 Pengecer	10,000,000	
D	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>220,000,000</b>	
I	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>220,000,000</b>	
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	20 orang	45,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	20 IKM	60,000,000	
		20 orang	-		20 orang		
		20 orang	55,000,000		50 IKM		
		25 IKM	509,861,000		5 Program		
		25 IKM	284,846,000		20 orang		
2	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	25 IKM	37,516,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	20 IKM	110,000,000	
		20 pelaku usaha	549,027,000		20 IKM		
		20 IKM			20 IKM		
		20 IKM			20 IKM		
3	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20 IKM	45,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	20 orang	50,000,000	
		50 UKM	172,362,000		25 orang		
		50 IKM	52,027,000		8 orang		
E	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>150,000,000</b>	
I	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>			<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		<b>150,000,000</b>	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	393000 buah	343,443,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	383000 buah	150,000,000	



No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )			Hasil Analisis Kebutuhan		Catatan Penting	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian		Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	5	6	7	10	11	12
1	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan</b>			<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan</b>		40,000,000	
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 IKM	45,000,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten / Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	20 IKM	-	
		20 IKM	30,000,000				
		20 IKM	94,000,000				
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 IKM	65000000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	60 orang	40,000,000	
		20 IKM	20,000,000		40 IKM		
		20 IKM	99,711,000		40 IKM		
		20 IKM	30,000,000		89 IKM		
		60 IKM	65,000,000				
		120 orang	212,098,000				
		20 UKM	7,451,000				
		20 IKM	120,000,000				
		80 IKM	125,000,000				
		4 kluster	140,000,000				
		95 IKM	303,829,000				
		500 IKM	78,220,000				
1	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		-	
1	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>			<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		-	
1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	4 Jenis Data	-	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	15 IKM	-	
		3 jenis cetakan	85,000,000				
	<b>TOTAL</b>		<b>50,499,599,400</b>			<b>27,397,817,000</b>	

Program dan Kegiatan I

Kabupaten

Tahun 20

Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sub Unit Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				
3	30	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KC</b>				
3	30	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah data kinerja yang terisi	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan administrasi yang	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua

3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>					
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah bahan logistik kantor	Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke	Tersedianya pendukung adminstrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah arsip dinamis	Tersedianya pendukung adminstrasi umum perangkat	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Barang milik daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah surat yang terlayani	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah jasa layanan umum	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasioal/lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah selama satu tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah selama satu tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>						
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>	<b>Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha</b>					

					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara				Presentase peningkatan manajemen pasar daerah	Jumlah wajib retribusi	terpenuhinya izin pengelolaan pasar dan retribusi	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	3	2.01	1								
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>							
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>							
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisonal	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarp rasnya	Terpenuhinya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi				Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisonal	Jumlah alat mendukung pasar Jumlah dokumen perencanaan Kesadaran tertib para pedagang Jumlah pasar yang dipelihara Jumlah pasar yang diravitalisasi Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya jumlah wajib retribusi	Terpenuhinya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan				Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat</b>							
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan/pel Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / aerobak PKL)	realisasi pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan				Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana	Presentase pelanggaran pedagang		realisasi pedagang dalam				Semua Kabupaten/Kota, Semua



					Barang Distribusi Perdagangan	peuayang kakilima dan asongan	jumlah pkl yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	berusaha tidak sesuai dengan ketentuan	Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG</b>				
3	30	4	2.01		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat</b>				
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	terselenggara ya jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	4	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	jenis bahan kebutuhan pokok yang diawasi Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan	Terpenuhinya informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan bahan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem	Terpenuhinya informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	4	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/K</b>				
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida	terpantaunya informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>				
3	30	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan nilai ekspor per tahun	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri jumlah cluster produk ekspor yang teridentifikasi jumlah jenis produk/komoditas ekspor	Terpenuhinya nilai ekspor per tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

					Kabupaten/Kota		jumlah program yang dikoordinasikan jumlah UKM yang masuk jaringan		Keurahan
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Peningkatan nilai ekspor per tahun	Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	Terpenuhinya nilai ekspor per tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Peningkatan nilai ekspor per tahun	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	Terpenuhinya nilai ekspor per tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>				
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>6</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>				
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera dan tera ulang	Tersedianya alat ukur yang sesuai standart	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Jumlah SPBU yang dipantau	Tersedianya alat ukur yang sesuai standart	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>				
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>2.01</b>		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dal</b>				

3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	terfasilitasinya pedagang berbasis e-commerce	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	Jumlah Pedagangan yang dilatih	terfasilitasinya pedagang berbasis e-commerce	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua
<b>3</b>	<b>31</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>2</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>				
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah terpenuhinya regulasi di bidang industri	terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi Jumlah IKM makanan ringan yang mendapat Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat jumlah IKM yang mendapat pelatihan	terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan Jumlah Kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan Jumlah Kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi Jumlah IKM yang dikunjugi	terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				

					Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan	Prosentase peningkatan produksi industri kreatif	Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	Terpenuhinya IKM/UKM Yang Memenuhi Standar	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	3	2.01	1					
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Prosentase peningkatan produksi industri kreatif	Jumlah IKM yang mendapat pembinaan melalui Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai standart	Terpenuhinya IKM/UKM Yang Memenuhi Standar	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	3	2.01	2					
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				
<b>3</b>	<b>31</b>	<b>4</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI</b>				
					Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui	Prosentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	Jumlah persentase yang tercapai	terpenuhinya penyediaan informasi industri	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
3	31	4	2.01	2					

## Perangkat Daerah

Pati

2022

Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
			27,067,817,000				40,365,416,735	
JTA			21,094,189,000				28,771,951,910	
			19,188,000				21,106,800	
100%	2 dokumen	20 buku	5,092,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	5,601,200
100%	2 dokumen	20 buku	5,083,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	5,591,520
100%	2 dokumen	20 buku	4,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	4,840,000
100%	20 buku	20 buku	4,612,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	5,074,080
			15,452,951,000				20,501,320,960	
100%	12 dokumen	100%	15,027,758,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	19,849,238,510
100%	30 orang	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase layanan administrasi yang	100%	13,225,000

100%	12 dokumen	100%	420,031,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	606,784,850
100%	5 dokumen	100%	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	2,200,000
100%	20 buku	100%	3,162,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	29,872,600
			<b>0</b>				<b>323,351,250</b>
100%	415 baju	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinanya	100%	269,790,000
100%	2 laporan	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinanya	100%	53,561,250
			<b>374,760,000</b>				<b>924,426,650</b>
100%	1 jenis	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	55,000,000
100%	2 unit	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	110,000,000
100%	2 unit	100%	170,135,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	530,436,350
100%	12 laporan	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	19,837,500
100%	7 jenis	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	23,575,000

100%	775 Perjalanan	100%	54,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	182,932,800
100%	20 jenis	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	2,645,000
			<b>0</b>				<b>747,500,000</b>
100%	1 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	747,500,000
			<b>4,863,180,000</b>				<b>5,691,154,500</b>
90%	3200 Surat	100%	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	13,225,000
90%	40 Rekening	100%	826,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	950,130,000
90%	15 jenis	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	87,572,500
90%	2 Paket	100%	4,034,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	4,640,227,000
			<b>384,110,000</b>				<b>563,091,750</b>
90%	94 unit	100%	219,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	252,131,750
90%	2 unit	100%	164,865,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	310,960,000
			<b>418,628,000</b>				<b>16,000,000</b>
<b>da Toko Swalayan</b>			<b>418,628,000</b>				<b>16,000,000</b>

14%	22 pasar se kab pati	100%	418,628,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase peningkatan manajemen pasar daerah	14%	16,000,000
			<b>5,080,000,000</b>				<b>9,655,256,250</b>
			<b>5,020,000,000</b>				<b>9,347,775,000</b>
70%	20 pasar	100%	4,770,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisonal	70%	7,668,200,000
70%	21 pasar daerah 22 paket 21 pasar daerah 22 pasar 5 pasar 21 pasar daerah 22 pasar se kab pati	100%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisonal	70%	1,679,575,000
<b>di Wilayah Kerjanya</b>			<b>60,000,000</b>				<b>307,481,250</b>
14%	25 orang 90 Kios	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	14%	142,168,750
14%	100 pkl	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana	Presentase pelanggaran pedagang	14%	165,312,500



14,70	30 PKL	100,70	30,000,000	Umum-Dana Alokasi Umum	peuayang kakilima dan asongan	14,70	103,312,300
<b>5 PENTING</b>			<b>30,000,000</b>				<b>247,307,500</b>
<b>Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>10,000,000</b>				<b>35,707,500</b>
12%	216 unit usaha	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	35,707,500
<b>g di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>			<b>10,000,000</b>				<b>185,150,000</b>
12%	18 kepokmas 48 unit usaha	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	44,965,000
12%	1600 Paket	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	140,185,000
<b>Kota</b>			<b>10,000,000</b>				<b>26,450,000</b>
12%	50 Pengecer	100%	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	26,450,000
			<b>220,000,000</b>				<b>1,214,010,725</b>
<b>ig bagi Produk Ekspor Unggulan yang</b>			<b>220,000,000</b>				<b>1,214,010,725</b>
30%	20 IKM 20 orang 50 IKM	100%	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Peningkatan nilai ekspor per tahun	30%	993,528,125

	5 Program							
	20 orang							
	20 IKM							
30%	20 IKM	100%	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai ekspor per tahun	30%	115,000,000
	20 IKM							
	20 IKM							
	20 orang							
30%	25 orang	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan nilai ekspor per tahun	30%	105,482,600
	8 orang							
			<b>150,000,000</b>					<b>318,722,500</b>
			<b>150,000,000</b>					<b>318,722,500</b>
12%	383000 buah	100%	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	12%	306,820,000
12%	32 SPBU	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	12%	11,902,500
			<b>75,000,000</b>					<b>142,167,850</b>
<b>am Negeri</b>			<b>75,000,000</b>					<b>142,167,850</b>

13%	25 orang	100%	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	13%	34,728,850
13%	50 IKM	100%	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	13%	107,439,000
			<b>330,000,000</b>				<b>633,459,000</b>
			<b>290,000,000</b>				<b>205,786,000</b>
			<b>290,000,000</b>				<b>205,786,000</b>
8%	100%	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	115,000,000
8%	35 IKM 20 IKM 60 IKM 20 IKM	100%	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	48,727,000
8%	20 IKM 20 IKM 20 IKM	100%	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	22,000,000
8%	35 IKM 25 IKM	100%	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	20,059,000
			<b>40,000,000</b>				<b>370,173,000</b>
<b>Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin</b>			<b>40,000,000</b>				<b>370,173,000</b>

	6%	20 IKM	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prodentase peningkatan produksi industri kreatif	6%	22,000,000
	6%	60 orang 40 IKM 40 IKM 89 IKM	100%	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prodentase peningkatan produksi industri kreatif	6%	348,173,000
				0				57,500,000
<b>dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				0				57,500,000
	8%	100%	100%		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e- commerce	8%	57,500,000
<b>TOTAL</b>				<b>27,397,817,000</b>				<b>40,998,875,735</b>















28,771,951,910

633,459,000

29,405,410,910

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Pati**

**Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>								
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				35,202,660,150				40,483,057,800
3	30	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan			25,135,298,650				28,905,592,975
						Persentase Layanan Administrasi yang tertangani							
						Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya							
						Persentase kelulusan diklat ASN							
						Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik							
3	30	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			62,519,150				71,896,580
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Kab. Pati	2 dokumen	17,149,950	DAU		2 dokumen	19,722,000
						Jumlah dokumen Renstra							
						Jumlah dokumen Renstra Perubahan							
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKAP	Kab. Pati	2 dokumen	15,000,000	DAU		2 dokumen	17,250,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	RKPA	Kab. Pati	2 dokumen	17,121,200	DAU		2 dokumen	19,689,380
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	Kab. Pati	20 buku	13,248,000	DAU		20 buku	15,235,200
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>			<b>17,829,308,500</b>				<b>20,503,704,745</b>
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	Kab. Pati	12 dokumen	17,260,207,400	DAU		12 dokumen	19,849,238,510
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	Kab. Pati	30 orang	11,500,000	DAU		30 orang	13,225,000
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	12 dokumen	527,639,000	DAU		12 dokumen	606,784,850
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Kab. Pati	5 dokumen	3,985,900	DAU		5 dokumen	4,583,785
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	Kab. Pati	20 buku	25,976,200	DAU		20 buku	29,872,600
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>			<b>281,175,000</b>				<b>323,351,250</b>
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati	415 baju	234,600,000	DAU		415 baju	269,790,000
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati	2 laporan	46,575,000	DAU		2 laporan	53,561,250
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah</b>			<b>873,821,000</b>				<b>1,004,894,150</b>

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Penting	Target Capaian Kinerja
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kab. Pati	1 jenis	26,450,000	DAU		1 jenis	30,417,500
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Pati	2 unit	187,000,000	DAU		2 unit	215,050,000
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	Kab. Pati	2 unit	461,249,000	DAU		2 unit	530,436,350
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Kab. Pati	12 laporan	17,250,000	DAU		12 laporan	19,837,500
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Pati	7 jenis	20,500,000	DAU		7 jenis	23,575,000
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	Kab. Pati	775 Perjalanan	159,072,000	DAU		775 Perjalanan	182,932,800
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis	Kab. Pati	20 jenis	2,300,000	DAU		20 jenis	2,645,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>650,000,000</b>				<b>747,500,000</b>
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	1 Paket	650,000,000	DAU		1 Paket	747,500,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>4,948,830,000</b>				<b>5,691,154,500</b>
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani	Kab. Pati	3200 Surat	11,500,000	DAU		3200 Surat	13,225,000
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	Kab. Pati	40 Rekening	826,200,000	DAU		40 Rekening	950,130,000
						Jumlah layanan publik berbasis e-gov							
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	Kab. Pati	15 jenis	76,150,000	DAU		15 jenis	87,572,500

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	Kab. Pati	2 Paket	4,034,980,000	DAU		2 Paket	4,640,227,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>489,645,000</b>				<b>563,091,750</b>
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Pati	94 unit	219,245,000	DAU		94 unit	252,131,750
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kab. Pati	2 unit	270,400,000	DAU		2 unit	310,960,000
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>			<b>8,395,875,000</b>				<b>9,655,256,250</b>
						<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>							
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>			<b>8,128,500,000</b>				<b>9,347,775,000</b>
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	Kab. Pati	22 pasar	6,668,000,000	DAU		22 pasar	7,668,200,000
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah wajib retribusi	Kab. Pati	21 pasar daerah	1,460,500,000	DAU		21 pasar daerah	1,679,575,000
						Jumlah dokumen perencanaan		22 paket				22 paket	
						Jumlah pasar yang dipelihara		21 pasar daerah				21 pasar daerah	

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah Kesadaran tertib para pedagang		22 pasar				22 pasar	
						Jumlah pasar yang direvitalisasi		5 pasar				5 pasar	
						Jumlah alat mendukung pasar		21 pasar daerah				21 pasar daerah	
						Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya		22 pasar se kab pati				22 pasar se kab pati	
						Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan		22 pasar se kab pati				22 pasar se kab pati	
3	30	3	2.02		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>			<b>267,375,000</b>				<b>307,481,250</b>
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	Kab. Pati	25 orang	123,625,000	DAU		25 orang	142,168,750
						Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan		90 Kios				90 Kios	
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	Kab. Pati	100 pkl	143,750,000	DAU		100 pkl	165,312,500
						Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan		30 PKL				30 PKL	
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>			<b>215,050,000</b>				<b>247,307,500</b>
3	30	4	2.01		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>31,050,000</b>				<b>35,707,500</b>



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	Kab. Pati	216 unit usaha	31,050,000	DAU		216 unit usaha	35,707,500
3	30	4	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>161,000,000</b>				<b>185,150,000</b>
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah unit usaha yang diawasi	Kab. Pati	18 kepokmas	39,100,000	DAU		18 kepokmas	44,965,000
						Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa		48 unit usaha				48 unit usaha	
3	30	4	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>			<b>23,000,000</b>				<b>26,450,000</b>
						<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>							
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	Kab. Pati	50 Pengecer	23,000,000	DAU		50 Pengecer	26,450,000
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>			<b>1,055,661,500</b>				<b>1,214,010,725</b>
3	30	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai ekspor pertahun</b>			<b>1,055,661,500</b>				<b>1,214,010,725</b>
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	Kab. Pati	20 IKM	863,937,500	DAU		20 IKM	993,528,125

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						Jumlah program yang dikoordinasikan		20 orang				20 orang	
						Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi		50 IKM				50 IKM	
						Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri		5 Program				5 Program	
						Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi		20 orang				20 orang	
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	Kab. Pati	20 IKM	100,000,000	DAU		20 IKM	115,000,000
						Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi		20 IKM				20 IKM	
						Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah jenis produk/komoditas ekspor		20 IKM				20 IKM	
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	Kab. Pati	20 orang	91,724,000	DAU		20 orang	105,482,600
						Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor		25 orang				25 orang	
						Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan		8 orang				8 orang	
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>			<b>277,150,000</b>				<b>318,722,500</b>

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	30	6	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah alat ukur yang sesuai standart</b>			<b>277,150,000</b>				<b>318,722,500</b>
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang		Kab. Pati	383000 buah	266,800,000	DAU		383000 buah	306,820,000
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal		Kab. Pati	32 SPBU	10,350,000	DAU		32 SPBU	11,902,500
3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>			<b>123,625,000</b>				<b>142,167,850</b>
3	30	7	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah pedagang berbasis e-commerce</b>			<b>123,625,000</b>				<b>142,167,850</b>
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	Kab. Pati	25 orang	30,199,000	DAU		25 orang	34,728,850
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dilatih	Kab. Pati	50 IKM	93,426,000	DAU		50 IKM	107,439,000
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>982,731,100</b>				<b>1,130,140,000</b>
3	31	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>			<b>629,971,750</b>				<b>724,467,000</b>
					<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah regulasi di bidang industri</b>							
						<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina</b>							
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda yang disusun	Kab. Pati	1 Raperda	100,000,000	DAU		1 Raperda	115,000,000

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	Kab. Pati	25 IKM	42,371,750	DAU		25 IKM	48,727,000
						Jumlah IKM yang dikunjungi		40 IKM				40 IKM	
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	Kab. Pati	20 IKM	487,600,000	DAU		20 IKM	560,740,000
						Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi		60 IKM				60 IKM	
						Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan		2 IKM				2 IKM	
						Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	
						Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan		20 IKM				20 IKM	

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3	31	3		<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>			<b>302,759,350</b>				<b>348,173,000</b>
					<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>							
					<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>							
3	31	3	2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi</b>			<b>302,759,350</b>				<b>348,173,000</b>
3	31	3	2.01	2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk	Kab. Pati	60 orang	302,759,350	DAU		60 orang	348,173,000
					Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk		35 IKM				35 IKM	
					Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi		35 IKM				35 IKM	
					Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan		25 IKM				25 IKM	
					Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat		35 IKM				35 IKM	
					Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman		25 IKM				25 IKM	
					Jumlah IKM yang difasilitasi		40 IKM				40 IKM	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
		Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi		20 IKM				20 IKM			
		Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi		89 IKM				89 IKM			
3	31	4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>		50,000,000			57,500,000		
3	31	4	2.01	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>		50,000,000		57,500,000		
3	31	4	2.01	2 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pati	4 Jenis Data	50,000,000	DAU	4 Jenis Data	57,500,000
<b>TOTAL</b>							<b>36,185,391,250</b>			<b>41,613,197,800</b>	

Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Pati

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>					35,202,660,150
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>					25,135,298,650
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan			
			Persentase Layanan Administrasi yang tertangani					Persentase Layanan Administrasi yang tertangani			
			Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya					Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya			
			Persentase kelulusan diklat ASN					Persentase kelulusan diklat ASN			
			Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik					Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik			
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>					62,519,150
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah dokumen perencanaan PD	20 buku	20,171,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah dokumen perencanaan PD	2 dokumen	17,149,950	
			Jumlah dokumen Renstra		6,000,000			Jumlah dokumen Renstra			
			Jumlah dokumen Renstra Perubahan		-			Jumlah dokumen Renstra Perubahan			
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		RKAP	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pati	RKAP	2 dokumen	15,000,000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		RKPA	1 dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Pati	RKPA	2 dokumen	17,121,200	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Kab. Pati	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	20 buku	18,843,000						
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah data kinerja yang terisi	20 buku	25,123,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati	Jumlah data kinerja yang terisi	20 buku	13,248,000	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					17,829,308,500
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	12 dokumen	17,260,207,400	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pati	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	12 dokumen	17,260,207,400	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	223 orang	2,179,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pati	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	30 orang	11,500,000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	Jumlah honor yang dibayarkan	170 orang	4,187,297,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pati	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	527,639,000	
			Jumlah dokumen yang dibuat	78 dokumen	85,311,000						
			Jumlah penerima honor	50 orang	346,520,000						
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	2 dokumen	5,234,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Pati	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	5 dokumen	3,985,900	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pati	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	20 buku	31,405,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pati	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	20 buku	25,976,200	
<b>III</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					281,175,000
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	415 baju	156,836,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pati	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	415 baju	234,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	12 laporan	16,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pati	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 laporan	46,575,000	
			Jumlah SDM yang mengikuti kursus	10 orang	20,937,000						
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah</b>			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah</b>		<b>873,821,000</b>	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	21 jenis	19,132,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pati	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1 jenis	26,450,000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	40 unit	359,681,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	2 unit	187,000,000	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati	Jumlah ATK yang dibeli	95 jenis	172,188,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pati	Jumlah bahan logistik kantor	2 unit	461,249,000	
			Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	2 jenis	4,731,000						
			Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	3100 orang	73,008,000						
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	95.000 lembar	26,861,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pati	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan	12 laporan	17,250,000	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8 jenis	38,800,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pati	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7 jenis	20,500,000	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	945 Perjalanan	386,111,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pati	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	775 Perjalanan	159,072,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati	Jumlah arsip dinamis	4 jenis data	2,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pati	Jumlah arsip dinamis	20 jenis	2,300,000	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>650,000,000</b>	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	260,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Paket	650,000,000	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		<b>4,948,830,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati	Jumlah surat yang terlayani	2.600 Surat	19,132,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pati	Jumlah surat yang terlayani	3200 Surat	11,500,000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	59 Rekening	1,605,464,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pati	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	40 Rekening	826,200,000	
			Jumlah layanan publik berbasis e-gov	1 paket	2,000,000			Jumlah layanan publik berbasis e-gov			
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	12 jenis	57,396,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pati	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	15 jenis	76,150,000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati	Jumlah jasa layanan umum	3 Paket	286,980,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pati	Jumlah jasa layanan umum	2 Paket	4,034,980,000	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>489,645,000</b>	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	84 unit	479,589,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pati	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	94 unit	219,245,000	
			Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	85 unit	40,081,000						
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2 unit	115,949,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pati	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	2 unit	270,400,000	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>		<b>8,395,875,000</b>	
			<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>					<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>			
<b>I</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>			<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>		<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>		<b>8,128,500,000</b>	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	3 pasar	669,639,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	22 pasar	6,668,000,000	
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah wajib retribusi	22 pasar se Kab. Pati	133,395,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah wajib retribusi	21 pasar daerah	1,460,500,000	



No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah dokumen perencanaan	22 dokumen	37,144,000			Jumlah dokumen perencanaan	22 paket		
			Jumlah buku profil pasar	5 buku	200,000,000				-		
			Jumlah pasar yang dipelihara	22 pasar se Kab. Pati	1,000,000,000			Jumlah pasar yang dipelihara	21 pasar daerah		
			Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	21 pasar daerah	52,002,000			Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	22 pasar		
			Jumlah pasar yang direvitalisasi	2 pasar	16,154,701,000			Jumlah pasar yang direvitalisasi	5 pasar		
			Jumlah alat mendukung pasar	21 pasar daerah	170,864,000			Jumlah alat mendukung pasar	21 pasar daerah		
			Jumlah Pengelola / management pasar daerah	21 orang	49,147,000				-		
			Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	21 pasar daerah	160,000,000			Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	22 pasar se kab pati		
			Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	4.000 pedagang	44,573,000			Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	22 pasar se kab pati		
			Jumlah kemampuan manajemen pengelolaan	22 orang	40,000,000				-		
<b>II</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>			<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>		<b>267,375,000</b>	
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	110 toko / kios	48,714,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	25 orang	123,625,000	
			Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	30 PKL	19,933,000			Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	90 Kios		
2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	30 PKL	329,783,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	100 pkl	143,750,000	
			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan	90 PKL	93,000,000						
			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	40 PKL	199,332,000			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30 PKL		
<b>C</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>		<b>215,050,000</b>	
<b>I</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting</b>		<b>31,050,000</b>	
1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pati	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	114 unit usaha	29,803,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Pati	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	216 unit usaha	31,050,000	
<b>II</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>			<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>		<b>161,000,000</b>	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah unit usaha yang diawasi	55 unit usaha	14,902,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah unit usaha yang diawasi	48 unit usaha	39,100,000	
			Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	18 kepokmas	11,921,000			Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	18 kepokmas		
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	3 jenis barang	387,443,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	1600 Paket	121,900,000	
<b>III</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>			<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>		<b>23,000,000</b>	
			<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>					<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>			
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pati	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	24 Pengecer	13,411,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Pati	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	50 Pengecer	23,000,000	
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>		<b>1,055,661,500</b>	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Nilai ekspor pertahun			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Nilai ekspor pertahun		1,055,661,500	
1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20 orang	45,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20 IKM	863,937,500	
			Jumlah program yang dikoordinasikan	20 orang	-			Jumlah program yang dikoordinasikan	20 orang		
			Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	20 orang	55,000,000			Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	50 IKM		
			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	25 IKM	509,861,000			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	5 Program		
			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	25 IKM	284,846,000			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	20 orang		
2	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pati	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	25 IKM	37,516,000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kab. Pati	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	20 IKM	100,000,000	
			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	20 pelaku usaha	549,027,000			Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	20 IKM		
			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	20 IKM				Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	20 IKM		
			Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	20 IKM				Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	20 IKM		
3	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pati	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	20 IKM	45,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab. Pati	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	20 orang	91,724,000	
			Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	50 UKM	172,362,000			Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	25 orang		
			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	50 IKM	52,027,000			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	8 orang		
E	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)		277,150,000	
I	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur yang sesuai standart			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Jumlah alat ukur yang sesuai standart		277,150,000	
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pati	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTPP ) yang ditera dan tera ulang	393000 buah	343,443,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kab. Pati	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTPP ) yang ditera dan tera ulang	383000 buah	266,800,000	
			Jumlah pemilik alat yang melakukan tera	31.000 buah	20,000,000						
			Jumlah dokumen pengawasan	72 dokumen	10,000,000						
2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pati	Jumlah SPBU yang dipantau	31 SPBU	14,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Kab. Pati		32 SPBU	10,350,000	
F	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Proporsi perdagangan berbasis e-commerce			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Proporsi perdagangan berbasis e-commerce		123,625,000	
I	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pedagam berbasis e-commerce			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah pedagam berbasis e-commerce		123,625,000	
			Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mendapatkan pelatihan	30 pedagang	45,000,000						
			Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan	120 pedagang	74,289,000						
1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	20 orang	50,000,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	25 orang	30,199,000	
2	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pedagang yang dilatih	20 pedagang	175,000,000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pedagang yang dilatih	50 IKM	93,426,000	

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				982,731,100	
G	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil		629,971,750	
I	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi di bidang industri			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Jumlah regulasi di bidang industri		629,971,750	
			Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina					Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina			
1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah Naskah Akademik yang disusun	1 Naskah Akademik		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kab. Pati	Jumlah Raperda yang disusun	1 Raperda	100,000,000	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Pati	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	40 IKM	65,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kab. Pati	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	25 IKM	42,371,750	
			Jumlah IKM yang dikunjungi	20 IKM	15,000,000			Jumlah IKM yang dikunjungi	40 IKM		
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pati	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	20 IKM	110,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	20 IKM	487,600,000	
			Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	20 IKM	45,000,000			Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	60 IKM		
			Jumlah IKM Tapioka yg mendapat pelatihan	20 IKM	30,000,000			Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	40 IKM	30,000,000			Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	2 IKM		
			Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20 orang	25,000,000			Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	20 orang	30,000,000			Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan	20 IKM	94,000,000			Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 orang	25,000,000			Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM		
			Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM	45,000,000						
			Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	20 IKM	202,203,000						
H	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Pertumbuhan produksi industri rumah tangga			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Pertumbuhan produksi industri rumah tangga		302,759,350	
			Persentase peningkatan produksi industri kreatif					Persentase peningkatan produksi industri kreatif			
			Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu					Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu			
I	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan		Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan		Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi		302,759,350	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pati	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk	20 IKM	20,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kab. Pati	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk	60 orang	302,759,350	
			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk	20 IKM	99,711,000			Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk	35 IKM		
			Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	20 IKM	30,000,000			Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	35 IKM		

No	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60 IKM	65,000,000			Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	25 IKM		
			Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	120 orang	212,098,000			Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	35 IKM		
			Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	20 UKM	7,451,000			Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	25 IKM		
			Jumlah IKM yang difasilitasi	20 IKM	120,000,000			Jumlah IKM yang difasilitasi	40 IKM		
			Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pelatihan	80 IKM	125,000,000			Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	20 IKM		
			Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	3 jenis cetakan	85,000,000			Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	89 IKM		
			Tersedianya papan informasi kluster	4 kluster	140,000,000						
			Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	95 IKM	303,829,000						
			Jumlah IKM Kabupaten Pati yang terdata	500 IKM	78,220,000						
			Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	20 IKM	8,941,000						
			Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	25 IKM	14,902,000						
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>		<b>50,000,000</b>	
I	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>			<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>		<b>50,000,000</b>	
1	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Pati	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	4 Jenis Data		Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Kab. Pati	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	4 Jenis Data	50,000,000	
					<b>50,499,599,400</b>					<b>36,185,391,250</b>	

Ko de	Organisasi/Bidang Organisasi Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja		
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
3	30	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun
3	30	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD
3	30	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah dokumen perubahan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	Jumlah data kinerja yang terisi
3	30	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD

3	30	1	2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinanya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinanya	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3	30	1	2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah bahan logistik kantor
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah arsip dinamis
3	30	1	2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan administrasi yang tertangani	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3	30	1	2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah surat yang terlayani
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa

3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah jasa layanan umum
3	30	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3	30	3		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>			
3	30	3	2.01	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	Jumlah retribusi yang tercapai
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	Jumlah alat mendukung pasar  Jumlah dokumen perencanaan  Jumlah Kesadaran tertib para pedagang  Jumlah pasar yang dipelihara  Jumlah pasar yang direvitalisasi  Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya  Jumlah wajib retribusi
3	30	3	2.02	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>			
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan/peltihan  Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi

3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitas (tenda / gerobak PKL)  jumlah pkl yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
3	30	4			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		
3	30	4	2.01		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi
3	30	4	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>		
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa  Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan bahan penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi
3	30	4	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		
3	30	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang</b>		
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Presentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri  jumlah cluster produk ekspor yang teridentifikasi  jumlah jenis produk/komoditas ekspor  jumlah program yang dikoordinasikan



							jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	<p>Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi</p> <p>Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri</p> <p>Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri</p> <p>Jumlah jenis produk/komoditas ekspor</p>
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	<p>Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi</p> <p>Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor</p> <p>Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan</p>
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		
3	30	6	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>		
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera dan tera ulang
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	Jumlah SPBU yang dipantau
3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		
3	30	7	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	Jumlah Pedagangan yang dilatih
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>		

3	31	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		
3	31	2	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>		
3	31	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah terpenuhinya regulasi di bidang industri
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah IKM yang dikunjungi  Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil	Jumlah IKM makanan ringan yang mendapat pelatihan  Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan  Jumlah IKM yang mendapat pelatihan  jumlah IKM yang terfalisitasi pengembangan teknologi  jumlah kelompok Ik kerajinan yang mendapat pelatihan  jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan  jumlah kelompok Ik konveksi yang mendapat pelatihan  jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan  jumlah raperda yang disahkan
3	31	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>		
3	31	3	2.01		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Koordinasi dan Sinkronisasi</b>		
3	31	3	2.01	2	Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Prodentase peningkatan produksi industri kreatif	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan

							jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi
							jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina
							jumlah IKM yang difasilitasi
							jumlah IKM yang memenuhi standartrisasi
							jumlah IKM yang mendapat aset informasi
							jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standartrisasi
							jumlah kolompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan
							terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai standart
3	31	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		
3	31	4	2.01		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		
3	31	4	2.01	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Prosentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	Jumlah persentase yang tercapai
<b>TO TA L</b>							

Rencana Tahun 2022						
Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
					<b>35,202,660,150</b>	
					<b>25,135,298,650</b>	
					<b>62,519,150</b>	
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	20 buku	17,149,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	20 buku	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 dokumen	20 buku	17,121,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 buku	20 buku	13,248,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>17,829,308,500</b>	
Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 dokumen	100%	17,260,207,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	30 orang	100%	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 dokumen	100%	527,639,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 dokumen	100%	3,985,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terealisasinya dokumen administrasi keuangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 buku	100%	25,976,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

					<b>281,175,000</b>	
Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	415 baju	100%	234,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terpenuhinya layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 laporan	100%	46,575,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>873,821,000</b>	
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 jenis	100%	26,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	187,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 unit	100%	461,249,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 laporan	100%	17,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 jenis	100%	20,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	775 Perjalanan	100%	159,072,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya pendukung administrasi umum perangkat daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	20 jenis	100%	2,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>650,000,000</b>	
Jumlah Pengadaan Barang milik daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	650,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>4,948,830,000</b>	
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	3200 Surat	100%	11,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	40 Rekening	100%	826,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	15 jenis	100%	76,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	2 Paket	100%	4,034,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>489,645,000</b>	
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah selama satu tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	94 unit	100%	219,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala barang milik daerah selama satu tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90%	2 unit	100%	270,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>8,395,875,000</b>	
					<b>8,128,500,000</b>	
Terpenuhinya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14%	22 pasar	100%	6,668,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terpenuhinya pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14%	21 pasar daerah 22 paket 21 pasar daerah 22 pasar 5 pasar 21 pasar daerah 22 pasar se kab pati	100%	1,460,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>267,375,000</b>	
realisasi pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14%	25 orang 90 Kios	100%	123,625,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

realisasi pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	14%	100 pkl  30 PKL	100%	143,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>215,050,000</b>	
					<b>31,050,000</b>	
terselenggaranya jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	216 unit usaha	100%	31,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>161,000,000</b>	
Terpenuhinya informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	18 kepokmas  48 unit usaha	100%	39,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Terpenuhinya informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	1600 Paket	100%	121,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>23,000,000</b>	
terpantaunya informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	50 Pengecer	100%	23,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>1,055,661,500</b>	
					<b>1,055,661,500</b>	
Terpenuhinya nilai ekspor per tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	20 IKM  20 orang  50 IKM  5 Program	100%	863,937,500	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil  Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

			20 orang			
Terpenuhinya nilai ekspor per tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	20 IKM	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			20 IKM			
			20 IKM			
			20 IKM			
Terpenuhinya nilai ekspor per tahun	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	20 orang	100%	91,724,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
			25 orang			
			8 orang			
					<b>277,150,000</b>	
					<b>277,150,000</b>	
Tersedianya alat ukur yang sesuai standart	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	383000 buah	100%	266,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Tersedianya alat ukur yang sesuai standart	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12%	32 SPBU	100%	10,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>123,625,000</b>	
					<b>123,625,000</b>	
terfasilitasinya pedagang berbasis e-commerce	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13%	25 orang	100%	30,199,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
terfasilitasinya pedagang berbasis e-commerce	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13%	50 IKM	100%	93,426,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
					<b>982,731,100</b>	



						629,971,750	
						629,971,750	
terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6%	100%	100%	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6%	25 IKM 40 IKM	100%	42,371,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
terpenuhinya penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6%	20 IKM 60 IKM 20 IKM 2 IKM 20 IKM 20 IKM 20 IKM 1 Raperda	100%	487,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						302,759,350	
						302,759,350	
Terpenuhinya IKM/UKM Yang Memenuhi Standar	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6%	60 orang	100%	302,759,350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

			35 IKM			
			35 IKM			
			25 IKM			
			35 IKM			
			25 IKM			
			40 IKM			
			20 IKM			
			89 IKM			
						<b>50,000,000</b>
						<b>50,000,000</b>
	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8%	100%		50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
						<b>36,185,391,250</b>

Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	Tolok Ukur	Target	
			<b>40,483,057,800</b>
			<b>28,905,592,975</b>
			<b>71,896,580</b>
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	19,722,000
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	17,250,000
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	19,689,380
	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang di sajikan	100%	15,235,200
			<b>20,503,704,745</b>
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	19,849,238,510
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	13,225,000
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	606,784,850
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	4,583,785
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	29,872,600

			<b>323,351,250</b>
	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinanya	100%	269,790,000
	Persentase ASN yang meningkat kedisiplinanya	100%	53,561,250
			<b>1,004,894,150</b>
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	30,417,500
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	215,050,000
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	530,436,350
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	19,837,500
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	23,575,000
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	182,932,800
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	2,645,000
			<b>747,500,000</b>
	Persentase layanan administrasi yang tertangani	100%	747,500,000
			<b>5,691,154,500</b>
	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	13,225,000
	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	950,130,000
	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	87,572,500

	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	4,640,227,000
			<b>563,091,750</b>
	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	252,131,750
	Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	90%	310,960,000
			<b>9,655,256,250</b>
			<b>9,347,775,000</b>
	Presentase peningkatan manajemen pasar daerah	14%	7,668,200,000
	Presentase peningkatan manajemen pasar daerah	14%	1,679,575,000
			<b>307,481,250</b>
	Presentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	14%	142,168,750

	Presentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	14%	165,312,500
			<b>247,307,500</b>
			<b>35,707,500</b>
	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	35,707,500
			<b>185,150,000</b>
	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	44,965,000
	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	140,185,000
			<b>26,450,000</b>
	Presentase pengaduan konsumen yang tertangani	12%	26,450,000
			<b>1,214,010,725</b>
			<b>1,214,010,725</b>
	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	993,528,125

	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	115,000,000
	Prosentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	8%	105,482,600
			<b>318,722,500</b>
			<b>318,722,500</b>
	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	12%	306,820,000
	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	12%	11,902,500
			<b>142,167,850</b>
			<b>142,167,850</b>
	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	13%	34,728,850
	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	13%	107,439,000
			<b>1,130,140,000</b>

			<b>724,467,000</b>
			<b>724,467,000</b>
	Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil	6%	115,000,000
	Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil	6%	48,727,000
	Prosentase peningkatan produksi industri rumah tangga menjadi industri kecil	6%	560,740,000
			<b>348,173,000</b>
			<b>348,173,000</b>
	Prodentase peningkatan produksi industri kreatif	6%	348,173,000



			<b>57,500,000</b>
			<b>57,500,000</b>
	Prosentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	8%	57,500,000
			<b>41,613,197,800</b>

RENSTRA

Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan
3	06	3	06	01	01	06			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
3	06	3	06	01	01	06	05		Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	20	
3	06	3	06	01	01	06	10		Penyusunan rencana strategik (Renstra PD)	Jumlah dokumen Renstra		
										Jumlah dokumen Renstra Perubahan		
3	06	3	06	01	01	06	06		Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA )	20	

6

3	06	3	06	01	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20
										<b>Program pelayanan administrasi</b>	<b>Peningkatan pelayanan</b>	
3	06	3	06	01	01	01	21			Penyediaan pendukung administrasi <b>Kepegawaian</b>	Jumlah hasil penilaian	239
3	06	3	06	01	01	01	19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan	141
3	06	3	06	01	01	01	20			Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat	36
3	06	3	06	01	01	01	22			Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah penerima honor	42
										Jumlah dokumen administrasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN		
3	06	3	06	01	01	06				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	
3	06	3	06	01	01	06	04			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2
3	06	3	06	01	01	06	07			Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	20
3	06	3	06	01	01	03				<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan disiplin</b>	

3



2

3	06	3	06	01	01	02				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>	
3	06	3	06	01	01	02	05			Pengadaan kendaraan dinas / operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	2
												Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
3	06	3	06	01	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Pengadaan garasi/tempat parkir	
3	06	3	06	01	01	01				<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>	
3	06	3	06	01	01	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang terkirim	2,000
3	06	3	06	01	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak		Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	28
3	06	3	06	01	01	01	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	2
3	06	3	06	01	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pra-golo	1

3

3	06	3	06	01	01	02	24			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	78
3	06	3	06	01	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	78
3	06	3	06	01	01	02	22			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	2
3	06							PILIHAN				
								PERDAGANGAN				
3	06	3	06	01	01	18				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	
3	06	3	06	01	01	18	35			Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarannya	22
3	06	3	06	01	01	18	08			Intensifikasi pendapatan pasar	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dihebankan APBD	22
3	06	3	06	01	01	18	09			Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	Jumlah dokumen perencanaan	22
3	06	3	06	01	01	18	10			Penyusunan profil pasar	Jumlah buku profil pasar	
3	06	3	06	01	01	18	11			Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	
3	06	3	06	01	01	18	12			Pembinaan dan penertiban pedagang pasar	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	21
3	06	3	06	01	01	18	13			Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	6

3	06	3	06	01	01	18	14			Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya	Jumlah alat mendukung pasar	21
3	06	3	06	01	01	18	20			Penjajakan hubungan kerjasama bidang perdagangan dengan daerah lain	Jumlah Pengelola / management pasar daerah	45
3	06	3	06	01	01	18	22			Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	
3	06	3	06	01	01	18	29			Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	2,874
3	06	3	06	01	01	18	41			Pelatihan peningkatan kemampuan pengelolaan pasar daerah	Jumlah kemampuan manajemen pengelolaan	
3	06	3	06	01	01	18	17			Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	80
3	06	3	06	01	01	18	01			Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah rekomendasi	1
3	06	3	06	01	01	19				<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>	<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>	
3	06	3	06	01	01	19	02			Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	50

1

3	06	3	06	01	01	19	03			Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitas (tenda / gerobak PKL)	
3	06	3	06	01	01	19	05			Kegiatan Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan	
3	06	3	06	01	01	19	09			Pemberdayaan Usaha bagi PKL dan Asongan dilingkungan IHT	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	
3	06	3	06	01	01	15				<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>	
3	06	3	06	01	01	15	09			Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	70
3	06	3	06	01	01	15	03			Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah unit usaha yang diawasi	35
3	06	3	06	01	01	15	08			Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	80

3



1

3	06	3	06	01	01	15	06			Penyelenggaraan pasar murah	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	4
3	06	3	06	01	01	15	10			Pengawasan distribusi dan harga pupuk	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	15
3	06	3	06	01	01	17				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>	
3	06	3	06	01	01	17	08			Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	
3	06	3	06	01	01	17	09			Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah program yang dikoordinasikan	
3	06	3	06	01	01	17	10			Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	
3	06	3	06	01	01	17	19			Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	60

10

3	06	3	06	01	01	17	20			Peningkatan pameran dan promosi produk unggulan dan unggulan daerah	Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	6
										<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		
3	06	3	06	01	01	18	30			Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	10
3	07	3	06	01	01	16				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>	
3	07	3	06	01	01	16	38			Promosi produk industri di lingkungan industri hasil tembakau ( IHT )	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	100
3	06	3	06	01	01	17				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>	
3	06	3	06	01	01	17	03			Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	
3	06	3	06	01	01	17	14			Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	50
3	06	3	06	01	01	17	18			Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	60
3	06	3	06	01	01	15				<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>	
3	06	3	06	01	01	15	04			Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrologian daerah	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	333000





3	07	3	06	01	01	16	32			Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	40
3	07	3	06	01	01	16	41			Pelatihan industri kecil pengolahan hasil perikanan	Jumlah industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan	
3	07	3	06	01	01	16	42			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	
3	07	3	06	01	01	17				<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>	
3	07	3	06	01	01	17	18			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	
3	07	3	06	01	01	19				<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>	
3	07	3	06	01	01	19	03			Pengembangan dan Pelatihan sentra - sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	
3	07	3	06	01	01	17				<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>	

3	07	3	06	01	01	17	01			Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk	
3	07	3	06	01	01	17	02			Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk	1
3	07	3	06	01	01	17	03			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	
3	07	3	06	01	01	17	14			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	2
3	07	3	06	01	01	17	21			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	20
										<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		
3	06	3	06	01	01	15	22			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	25
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>3</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>16</b>				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>	
3	07	3	06	01	01	16	01			Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber	Jumlah IKM yang difasilitasi	
3	07	3	06	01	01	16	09			Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah untuk mendorong peningkatan kapasitas industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pelatihan	
3	07	3	06	01	01	16	19			Penyusunan dan pengembangan informasi industri	Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>3</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>18</b>				<b>Program penataan struktur industri</b>	<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>	

3	07	3	06	01	01	18	02			Penyediaan sarana maupun prasarana kluster industri		Tersedianya papan informasi kluster	
3	07	3	06	01	01	18	03			Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir		Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	96
3	07	3	06	01	01	18	04			Pemetaan IKM Kab. Pati (Pendataan Industri )		Jumlah IKM Kabupaten Pati yang terdata	
3	06	3	06	01	01	15				<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>	
3	06	3	06	01	01	15	11			Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu		Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	50
3	06	3	06	01	01	15	12			Peningkatan pengawasan standar mutu		Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	25
3	07	3	06	01	01	19				<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>	
3	07	3	06	01	01	19	01			Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		Jumlah data yang tersusun	4
									<b>Total</b>				

1

99





**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENSTRA/RPJMD K  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERIND**

**PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA**

Kategori Pembelian Awal naan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan							
	Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4	
	2018		2019		2020		2021	
buku	20	15,500,000	20	19,414,000	20	21,535,000	20	23,603,000
dokum en								-
buku								
	20	5,000,000	20	8,978,000	20	8,505,000	20	8,994,000
	20	4,000,000	20	8,000,000	20	7,000,000	20	8,000,000







unit	81	162,570,000	81	348,645,000	81	388,585,000	84	427,031,000
unit	78	20,950,000	81	29,733,000	81	32,982,000	82	36,149,000
unit	1056	29,127,000	2	86,014,000	2	95,411,000	2	104,574,000
pasar	3	8,743,440,000	3	496,755,000	3	551,025,000	3	603,944,000
pasar se kab.pati	22	224,000,000	22	98,955,000	22	109,767,000	22	120,308,000
dokumen	22	50,000,000	22	27,555,000	22	30,565,000	22	33,500,000
buku			5	200,000,000	5	200,000,000	5	200,000,000
pasar se kab.pati	22	396,560,000	22	1,000,000,000	22	1,000,000,000	22	1,000,000,000
Pasar Daerah	21	70,000,000	21	38,577,000	21	42,791,000	21	46,900,000
pasar	2	3,500,000,000	2	11,577,739,000	2	12,991,226,000	2	14,440,518,000

Pasar Daerah	21	618,000,000	21	126,751,000	21	140,599,000	21	154,102,000
orang	21	120,000,000	35	41,131,000	35	43,356,000	21	45,401,000
Pasar Daerah	21	152,054,000	21	100,000,000	21	120,000,000	21	140,000,000
pedagang	2874	275,000,000	4,000	233,066,000	4,000	236,678,000	4,000	40,200,000
orang			22	25,000,000	22	30,000,000	22	35,000,000
toko / kios	80	10,000,000	80	12,755,000	90	17,556,000	100	38,350,000
buah			1	30,000,000	1	30,000,000		-
PKL	70	15,000,000	80	24,787,000	90	26,402,000	30	17,978,000

PKL			20	244,122,000	25	268,523,000	30	302,192,000
PKL			30	20,000,000	30	25,000,000	90	82,500,000
PKL			30	142,870,000	30	159,024,000	40	179,776,000
unit usaha	75	20,000,000	96	22,109,000	102	24,524,000	108	26,879,000
unit usaha	35	10,000,000	40	11,054,000	45	12,262,000	50	13,440,000
kepokmas	80	8,000,000	18	8,844,000	18	9,810,000	18	10,752,000

jenis barang	1	160,000,000	3	287,415,000	3	318,815,000	3	349,433,000
unit usaha	15	10,000,000	15	9,949,000	18	11,036,000	21	12,096,000
orang			20	30,000,000	20	35,000,000	20	40,000,000
program							5	50,000,000
orang			20	40,000,000	20	45,000,000	20	50,000,000
IKM			10	378,229,000	15	419,549,000	15	459,841,000



IKM			10	211,306,000	15	234,391,000	20	256,901,000
IKM	140	125,000,000	20	27,830,000	50	30,870,000	25	33,835,000
pelaku usaha	140	500,000,000	30	389,000,000	30	386,250,000	30	527,779,000
IKM			20	30,000,000	20	35,000,000	20	40,000,000
UKM	50	90,000,000	50	135,428,000	50	146,149,000	50	156,229,000
IKM	60	17,000,000	30	38,595,000	50	42,811,000	50	46,922,000
buah	333000	219,476,000	348,000	246,415,000	363,000	276,815,000	383,000	306,432,000



NA			1	108,000,000	1	150,000,000		-
IKM			40	40,000,000	40	40,000,000	40	55,000,000
IKM			20	15,000,000	20	15,000,000	20	15,000,000
IKM			20	30,000,000	20	79,000,000	20	89,000,000
Raperd a							1	100,000,000
IKM			20	45,000,000	20	15,000,000	20	45,000,000
IKM			20	25,000,000	20	20,000,000	20	25,000,000
IKM	1	97,000,000	40	34,500,000	40	25,000,000	40	30,000,000
orang			20	34,500,000	20	20,000,000	20	25,000,000





kluster			4	135,000,000	4	135,000,000	4	135,000,000
IKM	91	85,000,000	85	152,479,000	88	181,154,000	91	276,616,000
IKM	500	55,000,000	500	144,299,000	500	162,795,000	500	55,830,000
IKM	20	52,000,000	20	6,633,000	20	7,357,000	20	8,064,000
IKM	5	39,000,000	20	16,581,000	25	22,262,000	25	13,440,000
jenis data	4	10,000,000						
		<b>20,569,400,000</b>		<b>24,880,361,000</b>		<b>27,598,527,000</b>		<b>30,589,009,000</b>

20,569,400,000

24,880,361,000

27,598,527,000

30,589,009,000

-

-

-

-

**KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019  
USTRIAN KABUPATEN PATI**

		PEMUTAKHIRAN PE				
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan
<b>Tahun ke-5</b>						
<b>2022</b>						
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
						Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20	20,171,000				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan	
1	6,000,000					
20	9,843,000					
20	9,000,000					



20	25,123,000					
					Persentase Layanan Administrasi yang	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
223	2,179,000					
170	4,187,297,000					
78	85,311,000					
50	346,520,000					
2	5,234,000					
20	31,405,000					
					Persentase ASN yang meningkat kedisiplinannya	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

415	156,836,000					
12	16,000,000					
					<b>Persentase kelulusan diklat ASN</b>	
10	20,937,000					
						<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
21	19,132,000					
40	359,681,000					
95	172,188,000					
2	4,731,000					
3,100	73,008,000					
95000	26,861,000					
8	38,800,000					
945	386,111,000					
4	2,000,000					

					Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	260,000,000					
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2600	19,132,000					
59	1,605,464,000					
1	2,000,000					
12	57,396,000					
3	286,980,000					
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

84	479,589,000					
85	40,081,000					
2	115,949,000					
		<b>PEMERINTAHAN</b>				
			<b>PERDAGANGAN</b>			
				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	Persentase peningkatan manajemen pasar daerah	
						<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>
3	669,639,000					
22	133,395,000					
22	37,144,000					
5	200,000,000					
22	1,000,000,000					
21	52,002,000					
2	16,154,701,000					

21	170,864,000					
21	49,147,000					
21	160,000,000					
4,000	44,573,000					
22	40,000,000					
					Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan	
						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
110	48,714,000					
	-					
30	19,933,000					

30	329,783,000					
90	93,000,000					
40	199,332,000					
				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	
						Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten / Kota
114	29,803,000					
						Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota
55	14,902,000					
18	11,921,000					

3	387,443,000					
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
24	13,411,000					
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan nilai ekspor pertahun	
						Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
20	45,000,000					
20	55,000,000					
20	509,861,000					

25	284,846,000					
25	37,516,000					
30	549,027,000					
20	45,000,000					
50	172,362,000					
50	52,027,000					
				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>	
						<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>
393,000	343,443,000					



31,000	20,000,000					
72	10,000,000					
31	14,000,000					
				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Proporsi perdagang an berbasis e- commerce</b>	
						<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>
30	45,000,000					
120	74,289,000					
20	50,000,000					
20	175,000,000					
		<b>PEMERI NTAHA N</b>				
			<b>PERIND USTRIA N</b>			
				<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>	
						<b>Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>

	-					
40	65,000,000					
20	15,000,000					
20	110,000,000					
20	45,000,000					
20	30,000,000					
40	30,000,000					
20	25,000,000					

20	30,000,000					
20	94,000,000					
20	25,000,000					
20	45,000,000					
20	202,203,000					
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>	
						<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>

20	20,000,000					
20	99,711,000					
20	30,000,000					
60	65,000,000					
120	212,098,000					
20	7,451,000					
					<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>	
20	120,000,000					
80	125,000,000					
3	85,000,000					
					<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>	

4	140,000,000					
95	303,829,000					
500	78,220,000					
20	8,941,000					
25	14,902,000					
				<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>	
						<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>
	<b>33,239,392,000</b>					

an. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
Kabid. Perekonomian dan Sumber  
Ub. Kasubbid. Perekonomi  
Selaku Tim Verifikasi

**IKA YUDIASTANTI, SE**  
NIP. 19821125 200801 2 0

**33,239,392,000**

-

RMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode			
				3	30	01	
Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3	30	01	2.01
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	14,913,000	3	30	01	2.01 01
		Jumlah dokumen Renstra		3	30	01	2.01 01
		Jumlah dokumen Renstra Perubahan		3	30	01	2.01 01
	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD	14,888,000	3	30	01	2.01 04
		RKAP					
		RKPA					

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi	11,520,000	3	30	01	2.01	07	
<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>				<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	10,000,000	3	30	01	2.02	02	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4,079,458,000	3	30	01	2.02	03	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	3,466,000	3	30	01	2.02	05	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD	22,588,000	3	30	01	2.02	07	
Jumlah layanan administrasi kepegawaian berangkat daerah				<b>3</b>	<b>30</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		



	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokanannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelenokanannya	154,000,000	3	30	01	2.05	02	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,500,000	3	30	01	2.05	09	
Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah				3	30	01	2.06		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20,000,000	3	30	01	2.06	01	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	187,000,000	3	30	01	2.06	02	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor	461,177,000	3	30	01	2.06	04	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penulisan	15,000,000	3	30	01	2.06	05	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	20,500,000	3	30	01	2.06	06	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah	77,800,000	3	30	01	2.06	09	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis	2,000,000	3	30	01	2.06	10	

<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				3	30	01	2.07		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	208,312,000	3	30	01	2.07	02	
<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>				3	30	01	2.08		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani	10,000,000	3	30	01	2.08	01	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan	826,200,000	3	30	01	2.08	02	
		Jumlah layanan publik berbasis e-gov							
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa	76,150,000	3	30	01	2.08	03	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum	300,000,000	3	30	01	2.08	04	
Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				3	30	01	2.09		

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	219,245,000	3	30	01	2.09	02	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	197,925,000	3	30	01	2.09	09	
				3	30				
				3	30	03			
<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>				3	30	03	2.01		
	Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	618,000,000	3	30	03	2.01	01	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah wajib retribusi	1,460,500,000	3	30	03	2.01	02	
		Jumlah dokumen perencanaan							
		Jumlah buku profil pasar							
		Jumlah pasar yang dipelihara							
		Jumlah Kesadaran tertib para pedagang							
		Jumlah pasar yang direvitalisasi							

		Jumlah alat mendukung pasar							
		Jumlah Pengelola / management pasar daerah							
		Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya							
		Meningkatnya fasilitas kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar							
		Jumlah kemampuan manajemen pengelolaan							
				3	30	03			
<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>				3	30	03	2.02		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	107,500,000	3	30	03	2.02	01	
		Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan							

	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitas (tenda / gerobak PKL)	125,000,000	3	30	03	2.02	02	
		Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan							
		Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan							
				3	30	04			
Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting				3	30	04	2.01		
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	27,000,000	3	30	04	2.01	03	
Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting				3	30	04	2.02		
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi	Jumlah unit usaha yang diawasi	34,000,000	3	30	04	2.02	02	
		Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa							

	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	106,000,000	3	30	04	2.02	03	
Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida				3	30	04	2.03		
Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida				3	30	04	2.03		
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000	3	30	04	2.03	03	
				3	30	05			
Nilai ekspor pertahun				3	30	05	2.01		
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20,000,000	3	30	05	2.01	01	
		Jumlah program yang dikoordinasikan							
		Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi							
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri		3	30	05	2.01	04	

		Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi						
		Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	391,250,000	3	30	05	2.01	04
		Jumlah jenis produk/komoditas ekspor						
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	79,760,000	3	30	05	2.01	06
		Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor						
		Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan						
				3	30	06		
<b>Jumlah alat ukur yang sesuai standart</b>				3	30	06	2.01	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	232,000,000	3	30	06	2.01	01

	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pemilik alat yang melakukan tera		3	30	06	2.01	02	
		Jumlah dokumen pengawasan							
		Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000	3	30	06	2.01	02	
				3	30	07			
<b>Jumlah pedagang berbasis e-commerce</b>				3	30	07	2.01		
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mendapatkan pelatihan	26,260,000	3	30	07	2.01	02	
		Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan							
		Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan							
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dilatih	81,240,000	3	30	07	2.01	03	
				3	31				
				3	31	02			
<b>Jumlah regulasi di bidang industri</b>				3	31	02	2.01		



Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina				3	31	02	2.01		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Naskah Akademik yang disusun		3	31	02	2.01	01	
	Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	36,845,000	3	31	02	2.01	02	
		Jumlah IKM yang dikunjungi							
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	424,000,000	3	31	02	2.01	05	
		Jumlah Raperda yang disahkan							
		Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi							
		Jumlah IKM Tapioka yg mendapat pelatihan							
		Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan							
		Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi							
		Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan							

		Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan							
		Jumlah industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan							
		Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan							
		Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan							
		Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan							
				3	31	03			
<b>Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi</b>				3	31	03	2.01		

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk		3	31	03	2.01	02	
		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk							
		Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	263,569,000	3	31	03	2.01	02	
		Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan							
		Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan							
		Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi							
				3	31	03			
		Jumlah IKM yang difasilitasi							
		Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi							
		Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi							
				3	31	03			

		Tersedianya papan informasi klaster							
		Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart							
		Jumlah IKM Kabupaten Pati yang terdata							
		Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina							
		Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi							
				3	31	04			
<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>				3	31	04	2.01		
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota	Jumlah data yang tersusun		3	31	04	2.01	02	
			<b>11,034,566,000</b>						

TEN PATI  
 Daya Alam  
 an

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN PATI

3	3	0	2.	0
	1	4	0	2
			1	

-  
**11,034,566,000**









-		200,000,000		220,000,000		430,000,000	
801,549,500		1,056,778,000		1,869,878,000		2,048,608,000	
212,647,000		464,392,000		516,978,000		567,754,000	



25,000,000		474,534,000		526,505,000		620,796,000	

20,000,000		22,109,000		24,524,000		26,879,000	
178,000,000		307,313,000		340,887,000		373,625,000	

10,000,000		9,949,000		11,036,000		12,096,000	
732,000,000		1,280,388,000		1,375,020,000		1,661,507,000	













10,000,000		-		-		-	
20,569,400,000	-	24,880,361,000	-	27,598,527,000	-	30,589,009,000	-

20,569,400,000  
-

24,880,361,000  
-

27,598,527,000  
-

30,589,009,000  
-



	(11,519,980)
	-
<b>4,657,946,000</b>	-
	(9,999,761)
	(4,079,457,859)
	36
	42
	-
	(3,465,998)
	(22,587,980)
	-
<b>193,773,000</b>	-

	(153,999,700)	
	(40,500,000)	
	-	
	10	
	-	
<b>1,082,512,000</b>	-	
	(19,999,988)	
	(186,999,998)	
	(461,176,929)	
	2	
	150	
	(14,928,400)	
	(20,499,993)	
	(77,799,225)	777
	(2,000,000)	288,112,000

	-	(288,111,223)
<b>260,000,000</b>	-	
	(208,311,998)	
	-	
	-	
<b>1,970,972,000</b>	-	
	(9,998,000)	
	(826,199,972)	
	(76,149,998)	76,149,998
	(299,999,999)	
<b>635,619,000</b>	-	



	(219,244,922)	6,972,566,340
	78	6,972,642,000
	(197,924,998)	75,660
	-	
<b>18,711,465,000</b>	-	
	(617,999,978)	
	(1,460,499,978)	
	22	
	-	
	21	
	6	

	21
	-
	2,874
	-
<b>690,762,000</b>	-
	(107,499,920)
	-
	50

	(125,000,000)
	-
	-
29,803,000	-
	(26,999,930)
414,266,000	-
	(33,999,965)
	80

	(105,999,996)
<b>13,411,000</b>	-
	-
	(19,999,985)
	-
<b>1,750,639,000</b>	-
	(20,000,000)
	-
	-
	-
	-



	(9,000,000)
	-
<b>344,289,000</b>	-
	(26,260,000)
	(81,240,000)
	-
	-
	-
<b>716,203,000</b>	-











33,239,392,000

-

# **NOTA DINAS**

Tabel 2.5

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

## Kabupaten Pati

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
	2	3	4	5	6
	<b>PERINDUSTRIAN</b>				
<b>I</b>	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>				
1	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Kec.Tlogowungu	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	20 IKM	
		Kec.Gabus		20 IKM	
		Kec.Gunungwungkal		20 IKM	
<b>II</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>				
1	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam	Kec.Trangkil	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	20 ORANG	
<b>III</b>	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>				
1	Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri	Kec.Kayen	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	20 IKM	

**Formulir E.70**

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat da  
Kabupaten / Kota : Pati / Pati**

**Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan		
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√		
2	Pengolahan data dan informasi	√		
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	√		
4	Mengkaji hasil evaluasi Renja Perangkat daerah Kabupaten / Kota tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat daerah Kabupaten / Kota	√		
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	√		
6	Penelaahan rancangan awal RKPD Kabupaten / Kota	√		
7	Perumusan tujuan dan sasaran	√		
8	Penelaahan usulan masyarakat	√		
9	Perumusan kegiatan prioritas	√		
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	√		
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan	√		
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	√		

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan		
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian
		Ada	Tidak Ada	
1	2	3	4	5
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√		
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat daerah Kabupaten / Kota sesuai surat edaran Bupati / Wali Kota	√		
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten / Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√		
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	√		
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten / Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√		
14	Dokumen Renja Perangkat daerah Kabupaten / Kota yang telah disahkan	√		

**PATI,      JANUARI 2021**  
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PER**  
**KABUPATEN PATI**

**RIYOSO, S.Sos, MM**  
**NIP. 19711120 199203 1 004**





<b>Evaluasi</b>
<b>Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak Ada</b>
<b>6</b>

**INDUSTRIAN**

**PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA**

Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan
3	06	3	06	01	01	06				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
3	06	3	06	01	01	06	05			Penyusunan rencana kerja SKPD

3	06	3	06	01	01	06	06			Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD
3	06	3	06	01	01	06	01			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
										<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>
3	06	3	06	01	01	01	21			Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian
3	06	3	06	01	01	01	19			Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan
3	06	3	06	01	01	01	20			Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa

3	06	3	06	01	01	01	22			Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang
3	06	3	06	01	01	06				<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>
3	06	3	06	01	01	06	04			Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
3	06	3	06	01	01	06	07			Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD
3	06	3	06	01	01	03				<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>
3	06	3	06	01	01	03	02			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3	06	3	06	01	01	03	06			Pembinaan disiplin ASN

3	06	3	06	01	01	05				<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>
3	06	3	06	01	01	05	01			Pendidikan dan pelatihan formal
3	06	3	06	01	01	01				<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>
3	06	3	06	01	01	01	12			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3	06	3	06	01	01	01	13			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
3	06	3	06	01	01	01	10			Penyediaan alat tulis kantor
3	06	3	06	01	01	01	16			Penyediaan bahan logistik kantor
3	06	3	06	01	01	01	17			Penyediaan makanan dan minuman
3	06	3	06	01	01	01	11			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

3	06	3	06	01	01	01	15			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
3	06	3	06	01	01	01	18			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
3	06	3	06	01	01	02				<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>
3	06	3	06	01	01	02	05			Pengadaan kendaraan dinas / operasional
3	06	3	06	01	01	02	07			Pengadaan perlengkapan gedung kantor
3	06	3	06	01	01	01				<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>
3	06	3	06	01	01	01	01			Penyediaan jasa surat menyurat

3	06	3	06	01	01	01	02			Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak
3	06	3	06	01	01	01	03			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga
3	06	3	06	01	01	01	08			Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	06	3	06	01	01	02	24			Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
3	06	3	06	01	01	01	06			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
3	06	3	06	01	01	02	22			Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

3	06							PILIHAN		
									PERDAGANG AN	
3	06	3	06	01	01	18				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
3	06	3	06	01	01	18	35			Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar
3	06	3	06	01	01	18	08			Intensifikasi pendapatan pasar
3	06	3	06	01	01	18	09			Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar
3	06	3	06	01	01	18	11			Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan



3	06	3	06	01	01	18	12			Pembinaan dan penertiban pedagang pasar
3	06	3	06	01	01	18	13			Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar
3	06	3	06	01	01	18	14			Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya
3	06	3	06	01	01	18	22			Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman
3	06	3	06	01	01	18	29			Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar
3	06	3	06	01	01	18	17			Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol





3	06	3	06	01	01	15	10			Pengawasan distribusi dan harga pupuk
3	06	3	06	01	01	17				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>
3	06	3	06	01	01	17	08			Membangun jejaring dengan eksportir
3	06	3	06	01	01	17	09			Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha
3	06	3	06	01	01	17	10			Pengembangan kluster produk ekspor

										<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>
3	06	3	06	01	01	18	30			Pengembangan promosi industri dan perdagangan
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>3</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>16</b>				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>
3	07	3	06	01	01	16	38			Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau ( IHT )
3	06	3	06	01	01	17	03			Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor
3	06	3	06	01	01	17	14			Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor
3	06	3	06	01	01	17	18			Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia

3	06	3	06	01	01	15				<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>
3	06	3	06	01	01	15	04			Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah
3	06	3	06	01	01	15	23			Pemantauan bahan bakar minyak
3	06	3	06	01	01	18				<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>
3	06	3	06	01	01	18	37			Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa catering dilingkungan IHT

3	06	3	06	01	01	18	06			Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan
3	07								<b>PERINDUSTRIAN</b>	
3	07	3	06	01	01	16				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>
3	07	3	06	01	01	16	08			Monitoring, evaluasi dan pelaporan

3	07	3	06	01	01	16	07			Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan
3	07	3	06	01	01	16	02			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri
3	07	3	06	01	01	16	23			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT
3	07	3	06	01	01	16	31			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK konfeksi dan bordir di lingkungan IHT
3	07	3	06	01	01	16	32			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT
3	07	3	06	01	01	16	42			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT





3	07	3	06	01	01	17	03			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur
3	07	3	06	01	01	17	14			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam
3	07	3	06	01	01	17	21			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan
										<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>
3	06	3	06	01	01	15	22			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing
<b>3</b>	<b>07</b>	<b>3</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>16</b>				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>
3	07	3	06	01	01	16	01			Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya





**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KE DALAM PERMENDA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUF**

Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program
Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Administrasi yang tertangani
					Persentase kondisi sarana prasarana kantor dalam keadaan baik
					Persentase ASN yang menngkat kedisiplinannya
					Persentase kelulusan diklat ASN
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disajikan
Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	14,913,000				

Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran (DPA) SKPD	14,888,000				
Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	11,520,000				
<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>					
Jumlah hasil penilaian	10,000,000				
Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000				
Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000				

Jumlah penerima honor	208,418,000				
<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>					
Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3,466,000				
Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	22,588,000				
<b>Peningkatan disiplin</b>					
Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	154,000,000				
Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	20,500,000				

<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>					
Jumlah SDM yang mengikuti kursus	20,000,000				
<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>					
Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000				
Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	187,000,000				
Jumlah ATK yang dibeli	80,000,000				
Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000				
Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000				
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000				



Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000				
Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	123,750,000				
<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>					
Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	190,000,000				
Pengadaan garasi/tempat parkir	-				
<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>					
Jumlah surat yang terkirim	10,000,000				

Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	826,200,000				
Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000				
Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000				
Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000				
Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000				
Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000				

		<b>URUSAN PEMERINTAHAN</b>			
			<b>BIDANG PERDAGANGAN</b>		
<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>				<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>
Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	618,000,000				
Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	270,500,000				
Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000				
Jumlah pasar daerah yang dipelihara	305,000,000				

Jumlah Kesadaran tertib para	132,000,000				
Jumlah pasar yang direvitalisasi	100,000,000				
Jumlah alat mendukung pasar	234,000,000				
Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	137,000,000				
Meningkatnya fasilitas kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	234,000,000				
					<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>
Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	10,000,000				

<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>					
Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	97,500,000				
Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL )	100,000,000				
Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	25,000,000				
<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>				<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>

Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	27,000,000				
Jumlah unit usaha yang diawasi	10,000,000				
Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	24,000,000				
Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	106,000,000				

Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000				
<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>
Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	-				
Jumlah program yang dikoordinasikan	20,000,000				
Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	-				

Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	91,250,000				
<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>					
Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	300,000,000				
Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	-				
Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	62,760,000				
Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000				



<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>
Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	232,000,000				
Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000				
<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>				<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>
Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	26,260,000				

Jumlah pedagang yang dilatih	81,240,000				
		URUSAN PEMERINTAHAN			
			BIDANG PERINDUSTRIAN		
Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil
Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	30,000,000				

Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000				
Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	165,000,000				
Jumlah Raperda yang disahkan	-				
Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan	70,000,000				
Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi					
Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000				
Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	20,000,000				
Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000				

Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	80,000,000				
<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>					
Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	49,000,000				
<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>				<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>

Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	49,000,000				
Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	20,000,000				
Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	-				
Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	45,569,000				
<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>					<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>
Jumlah IKM yang difasilitasi	15,000,000				

Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	15,000,000				
<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>					<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>
Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	60,000,000				
<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>					
Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	30,000,000				
Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	29,000,000				
	<b>11,034,566,000</b>				



**GRI NOMOR 90 TAHUN 2019**  
**PATEN PATI**

**PEMUTAKHIRAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
<b>Perencanaan,            Penganggaran            dan Evaluasi            Kinerja Perangkat            Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen            Perencanaan,            Penganggaran,            dan Evaluasi            Kinerja Perangkat            Daerah</b>		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD



		Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah data kinerja yang terisi
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan</b>		
		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan PD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah		
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah pendukung administrasi perangkat daerah		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah notulen rapat koordinasi atau laporan perjalanan konsultasi ke luar daerah
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terlayani

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, air dan listrik yang dibayarkan
			Jumlah layanan publik berbasis e-gov
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disewa
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah paket pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>	<b>Target pendapatan retribusi pasar</b>		
		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah wajib retribusi
			Jumlah dokumen perencanaan
			Jumlah pasar yang dipelihara

			Jumlah Kesadaran tertib para pedagang
			Jumlah pasar yang direvitalisasi
			Jumlah alat mendukung pasar
			Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya
			Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar
<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan</b>		
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi

			Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan
		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)
			Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan
<b>Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok kebutuhan pokok dan barang penting</b>		



		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi
<b>Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga kebutuhan pokok dan barang penting</b>		
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah unit usaha yang diawasi
			Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah
<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida</b>		

	<b>Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida</b>		
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi
<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Nilai ekspor pertahun</b>		
		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir
			Jumlah program yang dikoordinasikan
			Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi

			Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri
			Jumlah jenis produk/komoditas ekspor
		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi
			Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor
			Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan

<b>Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah alat ukur yang sesuai standart</b>		
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang
		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah SPBU yang dipantau
<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah pedagang berbasis e-commerce</b>		
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan

		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah pedagang yang dilatih
<b>Penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah regulasi di bidang industri</b>		
	<b>Jumlah pelaku industri rumah tangga menjadi industri kecil yang dibina</b>		
		Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi

			Jumlah IKM yang dikunjungi
		Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan
			Jumlah Raperda yang disahkan
			Jumlah IKM makanan ringan yg mendapat pelatihan
			Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi
			Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan
			Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan
			Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan

			Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan
			Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan
<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah industri yang mendapat ijin/rekomendasi</b>		

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi
			Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan
			Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan
			Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi
			Jumlah IKM yang difasilitasi



			Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi
			Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart
			Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina
			Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi

an. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI  
Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Ub. Kasubbid. Perekonomian  
Selaku Tim Verifikasi

KEPALA DINAS PE

**IKA YUDIASTANTI, SE**  
NIP. 19821125 200801 2 004

**F**  
NIP.

Pagu Indikatif	Kode				
	3				
		30			
			01		
				2.01	
	3	30	01	2.01	
		30	01		
14,913,000	3	30	01	2.01	01

	4,079,458,000	3	30	01	2.02	03			
	10,000,000	3	30	01	2.02	02			
		3	30	01	2.02				
	11,520,000	3	30	01	2.01	07			
	14,888,000	3	30	01	2.01	04			

## . . . . .

40,500,000	3	30	01	01	2.05	09						
154,000,000	3	30	01	01	2.05	02						
	3	30	01	01	2.05							
22,588,000	3	30	01	01	2.02	07						
3,466,000	3	30	01	01	2.02	05						

##

.

.

.

.

.

.

##





826,200,000	3	30	01	2.08	02
76,150,000	3	30	01	2.08	03
300,000,000	3	30	01	2.08	04
	3	30	01	2.09	
219,245,000	3	30	01	2.09	02
197,925,000	3	30	01	2.09	09

	-
##	26,150,000
	-
	-
##	-
##	6,972,642,000
##	6,972,642,000





107,500,000	3	3							
	30	30							
	03	03							
	2.02	2.02							
	01								

##

##

##

##

##

.

.

##

		125,000,000			
	3	3		3	
	30	30		30	
	04	03		04	
	2.01	2.02			
		02			

-

##

##

##

-

-









36,845,000							81,240,000
3	3	3	3	3	3	3	3
31	31	31	31	31	31	31	30
02	02	02	02	02	02	02	07
2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01	2.01
02							03

##

· · · · ·



424,000,000					05

##

##

.

##

.

##

##

##



									263,569,000
									3
									31
									03
									2.01
									02

##

##

-

-

##

-

##

	3	31	03		
<b>11,034,566,000</b>					

##

-

##

-

##

##

-

-

ERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI

**RIYOSO, S.Sos. MM.**

19711120 199203 1 004

**Tabel 4,1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2022**  
**Kabupaten Pati**

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 06	Urusan Pilihan				14,549,816,000				30,850,448,000
3 06 01	Perdagangan				13,175,221,000				28,938,291,000
3 06 01 01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran		100 %	6,998,487,000	APBD II		100 %	7,229,002,000
3 06 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Dagperin	3200 surat	10,000,000	APBD II		3200 surat	17,255,000
3 06 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	Dagperin	46 Rekening	1,480,000,000	APBD II		46 Rekening	1,720,763,000
3 06 01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Dagperin	15 Jenis	50,000,000	APBD II		15 Jenis	51,765,000
3 06 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	Dagperin	92 Unit	21,000,000	APBD II		92 Unit	36,149,000
3 06 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	Dagperin	2 Paket	300,000,000	APBD II		2 Paket	258,825,000
3 06 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	Dagperin	71 Jenis	82,529,000	APBD II		71 Jenis	155,295,000
3 06 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	Dagperin	71600 Lembar	15,000,000	APBD II		71600 Lembar	24,226,000
3 06 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	Dagperin	1 Paket	20,000,000	APBD II		1 Paket	17,255,000
3 06 01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	Dagperin	2 unit	287,000,000	APBD II &		2 unit	324,395,000
3 06 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	Dagperin	7 jenis	20,500,000	APBD II		7 jenis	34,993,000
3 06 01 01 16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	Dagperin	2 Jenis	289,000,000	APBD II		2 Jenis	4,267,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 06 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	Dagperin	5000	orang	92,000,000	APBD II		5000	orang	65,845,000
3 06 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	Dagperin	775	perjalanan	242,000,000	APBD II		775	perjalanan	350,035,000
3 06 01 01 19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan	Dagperin	200	orang	3,818,040,000	APBD II		200	orang	3,776,502,000
3 06 01 01 20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat	Dagperin	65	dokumen	53,000,000	APBD II		65	dokumen	76,942,000
3 06 01 01 21	Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian	Jumlah hasil penilaian	Dagperin	30	orang	10,000,000	APBD II		30	orang	1,965,000
3 06 01 01 22	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah penerima honor	Dagperin	50	orang	208,418,000	APBD II		50	orang	312,525,000
<b>3 06 01 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>911,859,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>855,538,000</b>
3 06 01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Dagperin	2	unit	325,000,000	APBD II		2	unit	260,000,000
3 06 01 02 07	Pengadaan pelengkap bangunan kantor	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	Dagperin	1	Paket	190,000,000	APBD II		1	Paket	
3 06 01 02 22	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	Dagperin	2	unit	198,000,000	APBD II		2	unit	115,949,000
3 06 01 02 24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	Dagperin	94	unit	198,859,000	APBD II		94	unit	479,589,000
<b>3 06 01 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan disiplin</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>174,500,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>172,836,000</b>
3 06 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	Dagperin	415	Stel	154,000,000	APBD II		415	Stel	156,836,000
3 06 01 03 06	Pembinaan disiplin ASN	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	Dagperin	12	laporan	20,500,000	APBD II		12	laporan	16,000,000
<b>3 06 01 05</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>168,000,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100</b>	<b>%</b>	<b>20,937,000</b>

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
3 06 01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti kursus	Dagperin	200 org	168,000,000	APBD II		200 org	20,937,000	
<b>3 06 01 06</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>100 %</b>	<b>67,375,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>100 %</b>	<b>106,776,000</b>	
3 06 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dagperin	20 buku	11,520,000	APBD II		20 buku	25,123,000	
3 06 01 06 04	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dagperin	5 Dokumen	3,466,000	APBD II		5 Dokumen	5,234,000	
3 06 01 06 05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	Dagperin	20 buku	14,913,000	APBD II		20 buku	20,171,000	
3 06 01 06 06	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran (DPA) SKPD	Dagperin	20 buku	14,888,000	APBD II		20 buku	18,843,000	
3 06 01 06 07	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Dagperin	20 buku	22,588,000	APBD II		20 buku	31,405,000	
3 06 01 06 10	Penyusunan rencana strategik SKPD (Renstra SKPD)	Tersusunnya rencana strategik SKPD	Dagperin		-	APBD II			6,000,000	
<b>3 06 01 15</b>	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>		<b>10 %</b>	<b>536,000,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>10 %</b>	<b>846,217,000</b>	
		<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>				<b>APBD II</b>				
3 06 01 15 03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah unit usaha yang diawasi	Kab. Pati	50 Unit Usaha	10,000,000	APBD II		50 Unit Usaha	14,902,000	
3 06 01 15 04	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	Kab. Pati	383000 bh	232,000,000	APBD II		383000 bh	343,443,000	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 06 01 15 06	Penyelenggaraan pasar murah	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	Kab. Pati	3	jenis barang (1600 paket)	106,000,000	APBD II		3	jenis barang (1600 paket)	387,443,000
3 06 01 15 08	Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	Kab. Pati	96	kali	24,000,000	APBD II		96	kali	11,921,000
3 06 01 15 09	Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	Kab. Pati	216	pangkalan	27,000,000	APBD II		216	pangkalan	29,803,000
3 06 01 15 10	Pengawasan distribusi dan harga pupuk	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	Kab. Pati	50	pengecer	20,000,000	APBD II		50	pengecer	13,411,000
3 06 01 15 11	Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	Kab. Pati	35	IKM	30,000,000	APBD II		35	IKM	8,941,000
3 06 01 15 12	Peningkatan pengawasan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	Kab. Pati	35	IKM	29,000,000	APBD II		35	IKM	14,902,000
3 06 01 15 22	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	Kab. Pati	40	IKM	49,000,000	APBD II		40	IKM	7,451,000
3 06 01 15 24	Pemantauan bahan bakar minyak	Jumlah SPBU yang dipantau	Kab. Pati	32	SPBU	9,000,000	APBD II		32	SPBU	14,000,000
<b>3 06 01 17</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>		<b>20</b>	<b>%</b>	<b>284,000,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>20</b>	<b>%</b>	<b>424,389,000</b>
3 06 01 17 03	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah pelaku usaha ekspor impor yang mengikuti sosialisasi	Kab. Pati	20	Orang	40,000,000	APBD II		20	Orang	45,000,000
3 06 01 17 08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	Jateng	20	IKM	49,000,000	APBD II		20	IKM	45,000,000
3 06 01 17 09	Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah program yang dikoordinasikan	Semarang dan Jakarta	5	Program	50,000,000	APBD II		5	Program	55,000,000
3 06 01 17 10	Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	Kab. Pati	20	orang	40,000,000	APBD II		20	orang	55,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 06 01 17 14	Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jateng dan Jadedetabek	25	orang	88,000,000	APBD II		25	orang	172,362,000
3 06 01 17 18	Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	Jakarta	20	IKM	17,000,000	APBD II		20	IKM	52,027,000
3 06 01 18	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional</b>		<b>65</b>	<b>%</b>	<b>3,223,250,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>65</b>	<b>%</b>	<b>18,733,548,000</b>
		<b>Persentase peningkatan manajemen pasar daerah</b>					<b>APBD II</b>				
		<b>Proporsi perdagangan berbasis e-commerce</b>					<b>APBD II</b>				
3 06 01 18 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Upgrade pengembangan aplikasi dan jumlah UMKM yang dilatih	Kab. Pati	50	IKM	62,500,000	APBD II & DBHCHT		50	IKM	-
3 06 01 18 08	Intensifikasi pendapatan pasar	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	Kab. Pati	22	pasar se kab.pati	270,500,000	APBD II		22	pasar se kab.pati	133,395,000
3 06 01 18 09	Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Pati	22	Paket	48,000,000	APBD II		22	Paket	37,144,000
3 06 01 18 11	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	Kab. Pati	22	pasar se kab.pati	605,000,000	APBD II		22	pasar se kab.pati	1,000,000,000
3 06 01 18 12	Pembinaan dan penertiban pedagang pasar	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	Kab. Pati	21	Pasar Daerah	132,000,000	APBD II		21	Pasar Daerah	52,002,000
3 06 01 18 13	Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	Pasar Daerah	5	Pasar	200,000,000	APBN		5	Pasar	16,361,129,000
3 06 01 18 14	Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya	Jumlah alat mendukung pasar	Kab. Pati	21	Pasar Daerah	234,000,000	APBD II		21	Pasar Daerah	170,864,000
3 06 01 18 17	Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	Kab. Pati	90	kios	10,000,000	APBD II		90	kios	48,714,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 06 01 18 22	Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	Kab. Pati	21	Pasar Daerah	137,000,000	APBD II		21	Pasar Daerah	160,000,000
3 06 01 18 29	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Kab. Pati	4,000 / 40	ijin pedagang / sewa kios	234,000,000	APBD II		4,000 / 40	ijin pedagang / sewa kios	44,573,000
3 06 01 18 30	Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	Kab. Pati	20	IKM	460,000,000	APBD II		20	IKM	37,516,000
3 06 01 18 35	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarannya	Pasar Daerah	22	pasar	758,000,000	APBD II		22	pasar	669,639,000
3 06 01 18 37	Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa catering	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	Kab. Pati	25	orang	72,250,000	DBHCHT		25	orang	18,572,000
<b>3 06 01 19</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>	<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>		<b>6.7</b>	<b>%</b>	<b>811,750,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>6.7</b>	<b>%</b>	<b>549,048,000</b>
3 06 01 19 02	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	Kab. Pati	100	PKL	97,500,000	APBD II		100	PKL	19,933,000
3 06 01 19 03	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	Kab. Pati	30	PKL	644,250,000	APBD II		30	PKL	329,783,000
3 06 01 19 09	Pemberdayaan Usaha bagi PKL dan Asongan dilingkungan IHT	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Kab. Pati	30	PKL	70,000,000	DBHCHT		30	PKL	199,332,000
<b>3 06 01</b>	<b>Perindustrian</b>					<b>1,374,595,000</b>					<b>1,912,157,000</b>
<b>07 01 16</b>	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>		<b>7.5</b>	<b>%</b>	<b>873,095,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>7.5</b>	<b>%</b>	<b>1,054,027,000</b>
		<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>									
3 07 01 16 01	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang difasilitasi sesuai dengan standart	Kab. Pati	25	IKM	90,000,000	APBD II		25	IKM	120,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 07 01 16 02	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	20	IKM	265,000,000	APBD II		20	IKM	110,000,000
		Jumlah Raperda yang disyahkan		1	Raperda		APBD II		1	Raperda	-
3 07 01 16 07	Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Jumlah IKM yang dikunjungi	Kab. Pati	25	IKM	6,845,000	APBD II		25	IKM	15,000,000
3 07 01 16 08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	Kab. Pati	40	IKM	55,000,000	APBD II		40	IKM	65,000,000
3 07 01 16 19	Penyusunan dan pengembangan informasi industri	Jumlah IKM yang mendapatkan akses infomasi	Kab. Pati	25	IKM	25,000,000	APBD II		25	IKM	85,000,000
3 07 01 16 23	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	Kab. Pati	20	IKM	25,000,000	DBHCHT		20	IKM	30,000,000
3 07 01 16 31	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK konveksi dan bordir di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	20	IKM	20,000,000	DBHCHT		20	IKM	25,000,000
3 07 01 16 32	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	50	IKM	25,000,000	DBHCHT		50	IKM	30,000,000
3 07 01 16 38	Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau ( IHT )	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	DKI,Jabar/Jatim,Luar Jawa	50	IKM	341,250,000	DBHCHT		50	IKM	549,027,000
3 07 01 16 42	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	20	IKM	20,000,000	DBHCHT		20	IKM	25,000,000
<b>3 07 01 17</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>	<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>		<b>7.5</b>	<b>%</b>	<b>264,500,000</b>	<b>APBD II</b>		<b>7.5</b>	<b>%</b>	<b>352,098,000</b>
3 07 01 17 03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	Kab. Pati	35	IKM	49,000,000	APBD II		35	IKM	30,000,000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
3 07 01 17 14	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Garam	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	Desa Asem papan, sambi lawang, guyangan, kertomulyo, tlutup & kadilangu	60	IKM	60,000,000	APBD II		60	IKM	65,000,000
3 07 01 17 18	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	20	IKM	128,000,000	APBD II		20	IKM	45,000,000
3 07 01 17 21	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Jasa Perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	20	IKM	27,500,000	APBD II		20	IKM	212,098,000
3 07 01 18	<b>Program penataan struktur industri</b>	<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>		7.5	%	88,000,000	APBD II		7.5	%	303,829,000
3 07 01 18 03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	Kab. Pati	89	IKM	88,000,000	APBD II		89	IKM	303,829,000
3 07 01 19	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-</b>		7.5	%	149,000,000	APBD II		7.5	%	202,203,000
3 07 01 19 03	Pengembangan dan Pelatihan sentra - sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	Kab. Pati	120	IKM	149,000,000	APBD II		120	IKM	202,203,000
	Total					14,549,816,000					30,850,448,000

**Tabel 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Pati**

No.	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>					
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				10,625,645,650	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				32,409,028,000	
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				74,995,650	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				22,681,518,000	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				49,000,000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				41,321,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				17,500,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				14,913,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9,000,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				14,888,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				9,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11,520,000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				-						
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13,500,000						
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				25,998,050	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				15,443,901,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				(400)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				15,008,876,000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10,000,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				(650)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				398,971,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				(900)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3,466,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				26,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				22,588,000	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				-	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				244,500,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				204,000,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				40,500,000	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				(1,150)	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				864,821,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				187,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				(350)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				461,249,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				15,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				20,500,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				(800)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				159,072,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				-	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2,000,000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				-	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				650,000,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				650,000,000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				(500)	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				4,947,330,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				826,200,000	

No.	Rancangan Awal RKP ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				(500)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				76,150,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4,034,980,000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>(750)</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>489,645,000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				(750)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				219,245,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				270,400,000	
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>				<b>9,220,100,000</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>				<b>8,361,000,000</b>	
	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>8,941,350,000</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</b>				<b>8,128,500,000</b>	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				7,334,800,000	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				6,668,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1,606,550,000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1,460,500,000	
	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>				<b>278,750,000</b>	<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya</b>				<b>232,500,000</b>	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				143,750,000	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				107,500,000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				135,000,000	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				125,000,000	
	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>				<b>287,000,000</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>				<b>187,000,000</b>	
	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>38,000,000</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>27,000,000</b>	
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				38,000,000	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				27,000,000	
	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>				<b>217,000,000</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>				<b>140,000,000</b>	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				42,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				34,000,000	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				175,000,000	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota				106,000,000	
	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>32,000,000</b>	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>20,000,000</b>	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				32,000,000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				20,000,000	
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>				<b>576,250,000</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>				<b>831,010,000</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>576,250,000</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>831,010,000</b>	
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota				40,000,000	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota				751,250,000	
	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan				436,250,000						
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				100,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor				79,760,000	

No.	Rancangan Awal RKPD ( Renstra PD Th 2022 )					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>				<b>288,800,000</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>				<b>241,000,000</b>	
	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>				<b>288,800,000</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>				<b>241,000,000</b>	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				266,800,000	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				232,000,000	
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				22,000,000	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				9,000,000	
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>				<b>178,500,000</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>				<b>107,500,000</b>	
	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>				<b>178,500,000</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>				<b>107,500,000</b>	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				40,500,000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				26,260,000	
	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				138,000,000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				81,240,000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>1,155,000,000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>724,414,000</b>	
	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				<b>810,000,000</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>				<b>460,845,000</b>	
	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>				<b>810,000,000</b>	<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota</b>				<b>460,845,000</b>	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi										
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				55,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				36,845,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				755,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				424,000,000	
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>				<b>345,000,000</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA</b>				<b>263,569,000</b>	
	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>345,000,000</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				<b>263,569,000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				345,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota				263,569,000	
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>				-						
	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota</b>				-						
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota				-						
	<b>Total</b>				<b>11,780,645,650</b>	<b>Total</b>				<b>33,133,442,000</b>	



**Tabel 2,4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021**  
**Kabupaten Pati**

Nama Perangkat Daerah : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Urusan Pilihan</b>				<b>30,249,009,000</b>	<b>Urusan Pilihan</b>				<b>14,549,816,000</b>	
	<b>Perdagangan</b>				<b>27,900,396,000</b>	<b>Perdagangan</b>				<b>13,175,221,000</b>	
<b>I</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>7,243,002,000</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100 %</b>	<b>6,998,487,000</b>	
1	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat yang terkirim	2400 surat	17,255,000	Penyediaan jasa surat menyurat	Dagperin	Jumlah surat yang terkirim	3200 buah	10,000,000	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak		Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	38 Rekening	1,734,763,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak	Dagperin	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	46 Rekening	1,480,000,000	
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga		Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	7 Jenis	51,765,000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Dagperin	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	15 Jenis	50,000,000	
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	81 Unit	36,149,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Dagperin	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	92 Unit	21,000,000	
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor		Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	2 Paket	258,825,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Dagperin	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	2 Paket	300,000,000	
6	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah ATK yang dibeli	75 Jenis	155,295,000	Penyediaan alat tulis kantor	Dagperin	Jumlah ATK yang dibeli	71 Jenis	82,529,000	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	91000 Lembar	24,226,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dagperin	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	71600 Lembar	15,000,000	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	17 Jenis	17,255,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dagperin	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	1 Paket	20,000,000	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	30 unit	324,395,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dagperin	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	2 unit	287,000,000	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bahan bacaan yang dibeli	8 jenis	34,993,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dagperin	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	7 jenis	20,500,000	
11	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	2 Jenis	4,267,000	Penyediaan bahan logistik kantor	Dagperin	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	2 Jenis	289,000,000	
12	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	2,600 orang	65,845,000	Penyediaan makanan dan minuman	Dagperin	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	5000 orang	92,000,000	
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	910 perjalanan	350,035,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Dagperin	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	775 perjalanan	242,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan		Jumlah honor yang dibayarkan	166 orang	3,776,502,000	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Dagperin	Jumlah honor yang dibayarkan	200 orang	3,818,040,000	
15	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa		Jumlah dokumen yang dibuat	78 dokumen	76,942,000	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Dagperin	Jumlah dokumen yang dibuat	65 dokumen	53,000,000	
16	Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian		Jumlah hasil penilaian	223 orang	1,965,000	Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian	Dagperin	Jumlah hasil penilaian	30 orang	10,000,000	
17	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang		Jumlah penerima honor	50 orang	312,525,000	Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Dagperin	Jumlah penerima honor	50 orang	208,418,000	
<b>II</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>	<b>100 %</b>	<b>771,605,000</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>	<b>100 %</b>	<b>911,859,000</b>	
1	Pembangunan gedung kantor		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun		-	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Dagperin	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	2 unit	325,000,000	
2	Pengadaan kendaraan dinas / operasional		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	1 unit	240,000,000					-	
3	Pengadaan pelengkap bangunan kantor					Pengadaan pelengkap bangunan kantor	Dagperin	Pengadaan garasi/tempat parkir	1 Paket	190,000,000	
4	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		Jumlah gedung yang diperbaiki	2 unit	104,574,000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dagperin	Jumlah gedung yang diperbaiki	2 unit	198,000,000	
5	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional		Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	81 unit	427,031,000	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Dagperin	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	94 unit	198,859,000	
<b>III</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Peningkatan disiplin</b>	<b>100 %</b>	<b>141,450,000</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Peningkatan disiplin</b>	<b>100 %</b>	<b>174,500,000</b>	
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	385 Baju	141,450,000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Dagperin	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	415 Stel	154,000,000	
2	Pembinaan disiplin ASN		Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan		-	Pembinaan disiplin ASN	Dagperin	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	415 org	20,500,000	
<b>IV</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>18,883,000</b>	<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>		<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>100 %</b>	<b>168,000,000</b>	
1	Pendidikan dan pelatihan formal		Jumlah SDM yang mengikuti kursus	10 org	18,883,000	Pendidikan dan pelatihan formal	Dagperin	Jumlah SDM yang mengikuti kursus	200 org	168,000,000	
<b>V</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>96,302,000</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>100 %</b>	<b>67,375,000</b>	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 buku	22,660,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dagperin	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20 buku	11,520,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun		Jumlah laporan keuangan yang tersusun	2 <small>Dokumen</small>	4,721,000	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Dagperin	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	5 <small>Dokumen</small>	3,466,000	
3	Penyusunan rencana kerja SKPD		Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	20 <small>buku</small>	23,603,000	Penyusunan rencana kerja SKPD	Dagperin	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	20 <small>buku</small>	14,913,000	
4	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD		Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	20 <small>buku</small>	16,994,000	Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	Dagperin	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	20 <small>buku</small>	14,888,000	
5	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD		Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	20 <small>buku</small>	28,324,000	Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	Dagperin	Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD	20 <small>buku</small>	22,588,000	
6	Penyusunan rencana strategik (Renstra PD)		Jumlah dokumen Renstra		-	Penyusunan rencana strategik SKPD (Renstra SKPD)	Dagperin	Tersusunnya rencana strategik SKPD		-	
			Jumlah dokumen Renstra Perubahan		-						
VI	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>	<b>10 %</b>	<b>790,256,000</b>	<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>	<b>10 %</b>	<b>536,000,000</b>	
			<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>		<b>-</b>			<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>			
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa		Jumlah unit usaha yang diawasi	45 <small>Unit Usaha</small>	13,440,000	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Kab. Pati	Jumlah unit usaha yang diawasi	50 <small>Unit Usaha</small>	10,000,000	
2	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah		Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	363,000 <small>bh</small>	306,432,000	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Kab. Pati	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	363,000 <small>bh</small>	232,000,000	
3	Penyelenggaraan pasar murah		Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	3 <small>jenis barang (1600 paket)</small>	349,433,000	Penyelenggaraan pasar murah	Kab. Pati	Jenis barang yang diperdagangkan di penyelenggaraan pasar murah	3 <small>jenis barang (1600 paket)</small>	106,000,000	
4	Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat		Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	18 <small>kepokmas</small>	10,752,000	Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat	Kab. Pati	Jenis bahan kebutuhan pokok yang dianalisa	96 <small>kali</small>	24,000,000	
5	Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji		Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	102 <small>unit usaha</small>	26,879,000	Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji	Kab. Pati	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	216 <small>pangkalan</small>	27,000,000	
6	Pengawasan distribusi dan harga pupuk		Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	18 <small>unit usaha</small>	12,096,000	Pengawasan distribusi dan harga pupuk	Kab. Pati	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	50 <small>pengecer</small>	20,000,000	
7	Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu		Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	20 <small>IKM</small>	8,064,000	Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	35 <small>IKM</small>	30,000,000	
8	Peningkatan pengawasan standar mutu		Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	25 <small>UKM</small>	13,440,000	Peningkatan pengawasan standar mutu	Kab. Pati	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	35 <small>IKM</small>	29,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Pengawasan ukur ulang		Jumlah dokumen pengawasan	50 dokumen	10,000,000	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Kab. Pati	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	40 IKM	49,000,000	
10	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing		Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi		6,720,000					-	
11	Pemantauan bahan bakar minyak		Jumlah SPBU yang dipantau	31 SPBU	13,000,000					-	
12	Sosialisasi dan pengawasan kemetrolgian		Jumlah alat ukur yang sesuai standart	29,000 bh	20,000,000	Pemantauan bahan bakar minyak	Kab. Pati	Jumlah SPBU yang dipantau	32 SPBU	9,000,000	
<b>VII</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>		<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>	<b>20 %</b>	<b>1,049,893,000</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>		<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>	<b>20 %</b>	<b>284,000,000</b>	
1	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor		Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	20 IKM	40,000,000	Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Kab. Pati	Jumlah pelaku usaha ekspor impor yang mengikuti sosialisasi	20 Orang	40,000,000	
2	Membangun jejaring dengan eksportir		Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20 orang	40,000,000	Membangun jejaring dengan eksportir	Jateng	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	20 orang	49,000,000	
3						Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Semarang dan Jakarta	Jumlah program yang dikoordinasikan	5 Program	50,000,000	
4	Pengembangan kluster produk ekspor		Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	20 orang	50,000,000	Pengembangan kluster produk ekspor	Kab. Pati	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	20 orang	40,000,000	
5	Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor		Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	50 UKM	156,229,000	Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jateng dan Jadedabek	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	25 orang	88,000,000	
6	Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia		Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	50 IKM	46,922,000	Pelatihan teknis manajemen ekspor impor	Jakarta	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	20 IKM	17,000,000	
7	Pengembangan promosi industri dan perdagangan		Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan ke luar negeri	15 IKM	459,841,000					-	
8	Peningkatan pameran dan promosi produk potensial dan unggulan daerah		Bertambahnya jumlah IKM unggulan dan potensial yang mengikuti pameran dan promosi	15 IKM	256,901,000					-	
						Pelatihan teknis calon eksportir di pusat pelatihan ekspor impor di kementerian Perdagangan RI	Jakarta	Jumlah calon eksportir yang mengikuti pelatihan teknis	8 orang		
<b>VIII</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		<b>Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional</b>	<b>65 %</b>	<b>17,264,059,000</b>	<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>		<b>Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional</b>	<b>65 %</b>	<b>3,223,250,000</b>	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Persentase peningkatan manajemen pasar daerah		-			Persentase peningkatan manajemen pasar daerah			
			Proporsi perdagangan berbasis e-commerce		-			Proporsi perdagangan berbasis e-commerce			
1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional		Jumlah peraturan yang disempurnakan / direvisi		-						
2	Pengembangan pasar lelang daerah				35,000,000					-	
3	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah pedagang yang dilatih	20 pedagang	-	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Kab. Pati	Upgrade pengembangan aplikasi dan jumlah UMKM yang dilatih	50 IKM	62,500,000	
4	Intensifikasi pendapatan pasar		Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	22 pasar se kab.pati	120,308,000	Intensifikasi pendapatan pasar	Kab. Pati	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	22 pasar se kab.pati	270,500,000	
5	Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar		Jumlah dokumen perencanaan	22 Dok	33,500,000	Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	Kab. Pati	Jumlah dokumen perencanaan	22 Paket	48,000,000	
6	Penyusunan profil pasar		Jumlah buku profil pasar	5 buku	200,000,000					-	
7	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan		Jumlah pasar daerah yang dipelihara	22 pasar se kab.pati	1,000,000,000	Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan	Kab. Pati	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	22 pasar se kab.pati	605,000,000	
8	Pembinaan dan penertiban pedagang pasar		Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	21 Pasar Daerah	46,900,000	Pembinaan dan penertiban pedagang pasar	Kab. Pati	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	21 Pasar Daerah	132,000,000	
9	Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar		Jumlah pasar yang direvitalisasi	2 Pasar	14,648,768,000	Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar	Pasar Daerah	Jumlah pasar yang direvitalisasi	5 Pasar	200,000,000	
10	Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya		Jumlah alat mendukung pasar	21 Pasar Daerah	154,102,000	Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya	Kab. Pati	Jumlah alat mendukung pasar	21 Pasar Daerah	234,000,000	
11	Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol		Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	90 toko / kios	3,350,000	Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol	Kab. Pati	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	90 kios	10,000,000	
12	Penjajakan hubungan kerjasama bidang perdagangan dengan daerah lain		Jumlah Pengelola / management pasar daerah	35 Orang	45,401,000					-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman		Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	21 <small>Pasar Daerah</small>	140,000,000	Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman	Kab. Pati	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	21 <small>Pasar Daerah</small>	137,000,000	
14	Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa		Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan	20 <small>pedagang</small>	40,000,000					0	
15	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar		Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	4,000 <small>pedagang</small>	40,200,000	Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Kab. Pati	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	4,000 / 40 <small>ijin pedagang / sewa kios</small>	234,000,000	
16	Pengembangan promosi industri dan perdagangan		Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	50 <small>IKM</small>	33,835,000	Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Kab. Pati	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	20 <small>IKM</small>	460,000,000	
17	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar		Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	3 <small>pasar</small>	603,944,000	Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Pasar Daerah	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	22 <small>pasar</small>	758,000,000	
18	Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa di lingkungan IHT		Jumlah usaha perdagangan barang / jasa yang mengikuti pelatihan	100 <small>pedagang</small>	67,001,000					0	
19	Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa catering di lingkungan IHT		Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	25 <small>orang</small>	16,750,000	Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa catering di lingkungan IHT	Kab. Pati	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	25 <small>orang</small>	72,250,000	
20	Pelatihan peningkatan kemampuan pengelolaan pasar daerah		Jumlah kemampuan manajemen pengelolaan	22 <small>orang</small>	35,000,000					-	
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>		<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>6.7 %</b>	<b>524,946,000</b>	<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>		<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>6.7 %</b>	<b>811,750,000</b>	
1	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan		Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	90 <small>PKL</small>	17,978,000	Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	100 <small>PKL</small>	97,500,000	
2	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan		Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	25 <small>PKL</small>	302,192,000	Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	30 <small>PKL</small>	644,250,000	
3	Kegiatan Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan		Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan pengolahan makanan	30 <small>PKL</small>	25,000,000					-	
4	Pemberdayaan Usaha bagi PKL dan Asongan di lingkungan IHT		Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30 <small>PKL</small>	179,776,000	Pemberdayaan Usaha bagi PKL dan Asongan di lingkungan IHT	Kab. Pati	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30 <small>PKL</small>	70,000,000	
<b>X</b>	<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau</b>		<b>Peningkatan ruang terbuka hijau</b>		<b>-</b>					<b>-</b>	
1	Penataan ruang terbuka hijau		Terwujudnya ruang terbuka hijau		-						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Perindustrian</b>				<b>2,348,613,000</b>	<b>Perindustrian</b>				<b>1,374,595,000</b>	
<b>XI</b>	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>	<b>7.5 %</b>	<b>1,215,779,000</b>	<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>	<b>7.5 %</b>	<b>873,095,000</b>	
			<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>		<b>-</b>			<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>			
1	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya		Jumlah IKM yang difasilitasi sesuai dengan standar	20 IKM	20,000,000	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Kab. Pati	Jumlah IKM yang difasilitasi	25 IKM	90,000,000	
2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	20 IKM	36,418,000	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Kab. Pati	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	20 IKM	265,000,000	
								Jumlah Raperda yang disahkan	1 Raperda		
3	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah		Jumlah Naskah Akademik yang disusun	1 NA	-	Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Kab. Pati	Naskah Akademik dan draft Raperda RIPIK			
4	Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan		Jumlah IKM yang dikunjungi	20 IKM	10,945,000	Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Kab. Pati	Jumlah IKM yang dikunjungi	25 IKM	6,845,000	
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	40 IKM	-	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kab. Pati	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	40 IKM	55,000,000	
6	Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah untuk mendorong peningkatan kapasitas industri.		Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas pelatihan	60 IKM	-	Penyusunan dan pengembangan informasi industri	Kab. Pati	Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	25 IKM	25,000,000	
7	Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau		Jumlah IKM yang terfasilitasi pengembangan teknologi	20 IKM	82,724,000						-
8	Penyediaan sarana informasi data industri hasil tembakau				26,418,000						-
9	Penyusunan dan pengembangan informasi industri.		Jumlah IKM yang dapat mengakses informasi	3 jenis cetakan	32,837,000						-
10	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Tapioka di lingkungan IHT		Jumlah IKM Tapioka yg mendapat pelatihan	20 IKM	34,990,000						-
11	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Mebel di Lingkungan IHT				-						

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT		Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	40 IKM	94,606,000	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT	Kab. Pati	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	20 IKM	25,000,000	
13	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Kerajinan di lingkungan IHT				50,000,000					-	
14	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Agro di Lingkungan IHT				32,837,000					-	
15	Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK konfeksi dan bordir di lingkungan IHT		Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20 orang	69,358,000	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK konfeksi dan bordir di lingkungan IHT	Kab. Pati	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20 IKM	20,000,000	
16	Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT		Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	20 orang	45,619,000	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT	DKI, Jabar/ Jatim, Luar Jawa	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	50 IKM	25,000,000	
17	Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau ( IHT )		Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	30 pelaku usaha	606,190,000	Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau ( IHT )	DKI, Jabar/ Jatim, Luar Jawa	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	50 IKM	341,250,000	
18	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK logam di Lingkungan IHT				40,000,000					-	
19	Pelatihan industri kecil pengolahan hasil perikanan		Jumlah industri kecil pengolahan hasil perikanan yang mendapat pelatihan	20 IKM	32,837,000					-	
20	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT		Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 orang	-	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT	Kab. Pati	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 IKM	20,000,000	
<b>XII</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>		<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>	<b>7.5 %</b>	<b>425,522,000</b>	<b>Program peningkatan kemampuan teknologi industri</b>		<b>Pertumbuhan produksi industri rumah tangga</b>	<b>7.5 %</b>	<b>264,500,000</b>	
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan inovasi teknologi dan design produk		20,000,000					-	
2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri		Jumlah IKM yang mendapat pelatihan diversifikasi produk	40 IKM	84,232,000					-	
3	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur		Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	20 IKM	30,000,000	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Kab. Pati	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	35 IKM	49,000,000	
4	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam		Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60 IKM	60,000,000	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Garam	Kab. Pati	Meningkatnya pengetahuan IKM garam tentang produksi yang sesuai standar	60 IKM	60,000,000	



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan		Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 <small>IKM / UKM</small>	40,000,000	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	<small>Kab. Pati</small>	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20 <small>IKM</small>	128,000,000	
6	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan		Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	120 <small>orang</small>	191,290,000	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Jasa Perbengkelan	<small>Kab. Pati</small>	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	20 <small>IKM</small>	27,500,000	
<b>XIII</b>	<b>Program penataan struktur industri</b>		<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>	<b>7.5 %</b>	<b>334,946,000</b>	<b>Program penataan struktur industri</b>		<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>	<b>7.5 %</b>	<b>88,000,000</b>	
1	Kebijakan keterkaitan industri hulu hilir				60,000,000	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	<small>Kab. Pati</small>	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	89 <small>IKM</small>	88,000,000	
2	Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri		Tersedianya papan informasi klaster	4 <small>kluster</small>	60,000,000					-	
3	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir		Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88 <small>IKM</small>	159,116,000					-	
4	Pemetaan IKM Kab. Pati ( Pendataan Industri )		Jumlah IKM Kabupaten Pati yang terdata	500 <small>IKM</small>	55,830,000					-	
<b>XIV</b>	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>	<b>7.5 %</b>	<b>182,366,000</b>	<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>		<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>	<b>7.5 %</b>	<b>149,000,000</b>	
1	Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat		Jumlah data yang tersusun		-						
2	Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri		Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	20 <small>IKM</small>	182,366,000	Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri	<small>Kab. Pati</small>	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	120 <small>IKM</small>	149,000,000	
<b>XV</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi</b>				<b>190,000,000</b>					<b>-</b>	
1	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri				115,000,000					-	
2	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi				75,000,000					-	
	<b>Total</b>				<b>30,249,009,000</b>	<b>Total</b>				<b>14,549,816,000</b>	

Sumber: Dinas Dagperin Kab. Pati 2020.

## RENCANA KERJA D

## SATUAN KERJA PER

Pemerintah Kabupaten Pa

Organisasi : 3.30.3.31.0.00.08.0000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian

## REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA

Kode					Uraian	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	
3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>	
3	30	1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	
3	30	1	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
3	30	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	
3	30	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	30	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.01</b>		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi</b>	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>3</b>	<b>2.02</b>		<b>Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi</b>	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN</b>	
<b>3</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>2.01</b>		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan</b>	
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	30	4	2.02		<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan</b>
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	4	2.03		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat</b>
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	5			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>
3	30	5	2.01		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran</b>
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	6			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN</b>
3	30	6	2.01		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan</b>
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	7			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK</b>
3	30	7	2.01		<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan</b>
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>
3	31	2			<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN</b>
3	31	2	2.01		<b>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan</b>
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	31	3			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>

3	31	3	2.01	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha</b>	
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

<b>GARAN</b>	
<b>DAERAH</b>	<b>RKA-E</b>
<b>Anggaran 2021</b>	

**A BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Lokasi	Jumlah				
	T-1	T			
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer
8	9	10	11	12	13

		25,172,618,500	7,236,409,500	0	0
		21,844,518,000	837,000,000	0	0
		41,321,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		14,913,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		14,888,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		11,520,000	0	0	0
		15,443,901,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		15,008,876,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		10,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		398,971,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		3,466,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		22,588,000	0	0	0
		244,500,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		204,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		40,500,000	0	0	0
		677,821,000	187,000,000	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		20,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		0	187,000,000	0	0

Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		461,249,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		15,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		20,500,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		159,072,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		2,000,000	0	0	0
		<b>0</b>	<b>650,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		0	650,000,000	0	0
		<b>4,947,330,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		10,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		826,200,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		76,150,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		4,034,980,000	0	0	0
		<b>489,645,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		219,245,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		270,400,000	0	0	0
		<b>1,961,590,500</b>	<b>6,399,409,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1,729,090,500</b>	<b>6,399,409,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		310,590,500	6,357,409,500	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		1,418,500,000	42,000,000	0	0
		<b>232,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		107,500,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		125,000,000	0	0	0
		<b>187,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>27,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		27,000,000	0	0	0

		<b>140,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		34,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		106,000,000	0	0	0
		<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		20,000,000	0	0	0
		<b>831,010,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>831,010,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		751,250,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		79,760,000	0	0	0
		<b>241,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>241,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		232,000,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		9,000,000	0	0	0
		<b>107,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>107,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		26,260,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		81,240,000	0	0	0
		<b>724,414,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>460,845,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>460,845,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		36,845,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		424,000,000	0	0	0
		<b>263,569,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		263,569,000	0	0	0
Kab. Pati, Margorejo, Margorejo		263,569,000	0	0	0



461,249,000	
15,000,000	
20,500,000	
159,072,000	
2,000,000	
<b>650,000,000</b>	
650,000,000	
<b>4,947,330,000</b>	
10,000,000	
826,200,000	
76,150,000	
4,034,980,000	
<b>489,645,000</b>	
219,245,000	
270,400,000	
<b>8,361,000,000</b>	
<b>8,128,500,000</b>	
6,668,000,000	
1,460,500,000	
<b>232,500,000</b>	
107,500,000	
125,000,000	
<b>187,000,000</b>	
<b>27,000,000</b>	
27,000,000	

<b>140,000,000</b>	
34,000,000	
106,000,000	
<b>20,000,000</b>	
20,000,000	
<b>831,010,000</b>	
<b>831,010,000</b>	
751,250,000	
79,760,000	
<b>241,000,000</b>	
<b>241,000,000</b>	
232,000,000	
9,000,000	
<b>107,500,000</b>	
<b>107,500,000</b>	
26,260,000	
81,240,000	
<b>724,414,000</b>	
<b>460,845,000</b>	
<b>460,845,000</b>	
36,845,000	
424,000,000	
<b>263,569,000</b>	

<b>263,569,000</b>	
263,569,000	



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR:

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

KABUPATEN PATI TAHUN 2022

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 145);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 71);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 56);
20. Peraturan Bupati Pati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU, menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 ;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal

BUPATI PATI

HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;





BUPATI PATI  
KEPUTUSAN BUPATI PATI  
NOMOR:

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI TAHUN 2022

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 373 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah: (85/2014). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 71);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

20. Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Bupati Pati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari:

- a. Ketua Tim;
- b. Sekretaris Tim;
- c. Kelompok Kerja (POKJA) Data Perdagangan;
- d. Kelompok Kerja (POKJA) Data Perindustrian;
- e. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis;

KETIGA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana diktum KEDUA adalah:

- a. Ketua Tim; bertugas:
  - 1) mengarahkan dan memantau proses penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah sesuai jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan;
  - 2) melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah;
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kepada Bupati.
- b. Sekretaris Tim; bertugas:
  - 1) mengkoordinasikan penyusunan jadwal dan agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- 2) mengkoordinasikan penyusunan rancangan awal, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Kelompok Kerja (POKJA) Data; bertugas:
- 1) menginventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan dokumen rencana kerja perangkat daerah dan disajikan dalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
  - 2) mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
  - 3) menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis;
  - 4) melakukan analisis data sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah.
- d. Kelompok Kerja (POKJA) Data Perdagangan dan Perindustrian, bertugas:
- 1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan penhgelolaan kegiatan Bina Usaha dan Sarana Perdagangan, Distribusi dan Informasi Perdagangan, serta kegiatan Perlindungan Konsumen.
  - 2) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka, dan kegiatan Pengembangan Standart Mutu dan Informasi Industri.
- e. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis, bertugas:
- 1) Merumuskan, menyusun, dan menyajikan rancangan awal rencana kerja perangkat daerah;
  - 2) Menyusun rancangan rencana kerja perangkat daerah;
  - 3) Menyelenggarakan forum perangkat daerah;
  - 4) Menyusun rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah.



KEEMPAT : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal

BUPATI PATI

HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Wakil Bupati;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati;
4. Inspektur Kabupaten Pati;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Pati;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati;
7. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati  
 Nomor :  
 Tanggal : \_\_\_\_\_

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN  
 RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH  
 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
 KABUPATEN PATI TAHUN 2022

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Tim
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Sekretaris Tim
3.	Kelompok Kerja;	
	a. Kelompok Kerja (POKJA) Data;	
	1) Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Pokja
	2) Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	3) Kepala Bidang Promosi dan Ekspor Impor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	4) Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	5) Kepala Sub.Bagian TU UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	6) Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	7) Kepala Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	8) Kepala Seksi Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	9) Kepala Seksi Retribusi, Perijinan dan Penagihan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	10) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	11) Kepala Seksi Ketertiban dan Kebersihan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	12) Kepala Seksi Promosi Produk Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	13) Kepala Seksi Ekspor Impor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	b. Kelompok Kerja (POKJA) Data;	

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
	1) Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Pokja
	2) Kepala Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	3) Kepala Seksi Industri Logam Mesin Elektronika dan Aneka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	4) Kepala Seksi Pengembangan Standart Mutu dan Informasi Industri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	c. Kelompok Kerja (POKJA) Teknis;	
	1) Subbagian Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Ketua Pokja
	2) Subbagian Keuangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	3) Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota
	4) 2 orang Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati;	Anggota

BUPATI PATI

HARYANTO

**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																					
Kode										Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode							
3	06									PILIHAN	PERDAGANGAN					Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan									5	01				
3	06	3	06	01	01	01						Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran							5	01	01			
																			Peningkatan sarana dan prasarana.												
																			Peningkatan disiplin												
																			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur												
																			Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
																				Administrasi Umum	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran					5	01	01	2.03		
																					cakupan sarana dan prasarana perkantoran.										
3	06	3	06	01	01	01	01					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,000,000										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,000,000	5	01	01	2.03	01
3	06	3	06	01	01	01	02					Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	1,480,000,000										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	1,480,000,000	5	01	01	2.03	02
3	06	3	06	01	01	01	03					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000										Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000	5	01	01	2.03	13

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA									PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
Kode									Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	3	06	01	01	01	06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000	5	01	01	2.03	06	
3	06	3	06	01	01	01	08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000	5	01	01	2.03	08	
3	06	3	06	01	01	01	10				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	82,529,000						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	82,529,000	5	01	01	2.03	10	
3	06	3	06	01	01	01	11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000	5	01	01	2.03	11	
3	06	3	06	01	01	01	12				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000	5	01	01	2.03	12	
3	06	3	06	01	01	01	13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	287,000,000						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	287,000,000	5	01	01	2.03	13	
3	06	3	06	01	01	01	15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000	5	01	01	2.03	15	
3	06	3	06	01	01	01	16				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000	5	01	01	2.03	16	
3	06	3	06	01	01	01	17				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000	5	01	01	2.03	17	
3	06	3	06	01	01	01	18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	242,000,000						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	242,000,000	5	01	01	2.03	18	
3	06	3	06	01	01	01	19				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000	5	01	01	2.03	07	
3	06	3	06	01	01	01	20				Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000							Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000	5	01	01	2.03	07	

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																				
Kode										Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode						
3	06	3	06	01	01	01	22					Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah penerima honor	208,418,000									Jumlah penerima honor	208,418,000	5	01	01	2.03	07	
3	06	3	06	01	01	02						<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>																	
3	06	3	06	01	01	02	05					Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	325,000,000									Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	325,000,000	x	x	01	2.03	20
3	06	3	06	01	01	02	07					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan garasi/tempat parkir	190,000,000									Pengadaan garasi/tempat parkir	Jumlah garasi/tempat parkir	190,000,000					
3	06	3	06	01	01	02	22					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000								Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000	5	01	01	2.03	28	
3	06	3	06	01	01	02	24					Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000								Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000	5	01	01	2.03	30	
												<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>																	
																					</									



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA									PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																			
Kode									Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode					
3	06	3	06	01	01	06	01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	11,520,000							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	11,520,000	5	01	01	2.01	05	
3	06	3	06	01	01	06	05				Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	14,913,000							Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	14,913,000	5	01	01	2.01	01	
3	06	3	06	01	01	06	06				Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	14,888,000							Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	14,888,000	5	01	01	2.01	02	
3	06	3	06	01	01	15					<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>			<b>PEMERINTAHAN</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>						3	30			
																							3	30	06	2.01		
3	06	3	06	01	01	15	04				Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	232,000,000							Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur yang sesuai standart							
3	06	3	06	01	01	15	04				Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	232,000,000							Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	232,000,000	3	30	06	2.01	01	
3	06	3	06	01	01	15	23				Pemantauan bahan bakar minyak	Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000								Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000	3	30	06	2.01	02







PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019															
Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode			
3	06	3	06	01	01	17	18			Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000							Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06	3	06	01	01	17	08			Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000	3	30	05	2.01	01
3	06	3	06	01	01	17	09			Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000							Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000	3	30	05	2.01	01
3	06	3	06	01	01	17	10			Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000							Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000	3	30	05	2.01	01
										<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>															
3	06	3	06	01	01	18	30			Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000							Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000	3	30	05	2.01	04
3	07	3	06	01	01	16				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>														
3	07	3	06	01	01	16	38			Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau ( IHT )	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	341,250,000							Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	341,250,000	3	30	05	2.01	04
																					3	30	03		

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan				3	30	03	2.02	
3	06	3	06	01	01	18	17						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	10,000,000	3	30	03	2.02	01
3	06	3	06	01	01	19														
3	06	3	06	01	01	19	02							Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	97,500,000	3	30	03	2.02	01
3	06	3	06	01	01	19	03						Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	644,250,000	3	30	03	2.02	02
3	06	3	06	01	01	19	09							Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	70,000,000	3	30	03	2.02	02
					Persentase peningkatan manajemen pasar daerah						Persentase peningkatan manajemen pasar daerah									
											Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	target pendapatan retribusi pasar				3	30	03	2.01	





PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07	3	06	01	01	16	07			Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000							Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000	3	31	02	2.01	02	
3	07	3	06	01	01	16	02			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	265,000,000						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	265,000,000	3	31	02	2.01	05	
											Jumlah Raperda yang disahkan								Jumlah Raperda yang disahkan							
3	07	3	06	01	01	16	23			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	25,000,000							Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	25,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	31			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK konfeksi dan bordir di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000							Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	32			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	25,000,000							Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	25,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	42			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000							Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	17	18			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000							Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	19				<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>															

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
Kode				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode						
3	07	3	06	01	01	19	03			Pengembangan dan Pelatihan sentra - sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000					Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	17				Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga					3	31	03		
														Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah	Jumlah industri yang mendapat izin/rekomendasi					3	31	03	2.01	
3	07	3	06	01	01	17	03			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	49,000,000					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	06	01	01	17	14			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000						Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	06	01	01	17	21			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000						Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000	3	31	03	2.01	03
										Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan														
3	06	3	06	01	01	15	22			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	49,000,000						Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	06	01	01	16				Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan produksi industri kreatif							Persentase peningkatan produksi industri kreatif						





PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019									
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode

IKA YUDIASTANTI, SE  
NIP. 19821125 200801 2 004

RIYOSO, S.Sos. MM.  
NIP. 19711120 199203 1 004

**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																					
Kode										Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode							
3	06									PILIHAN	PERDAGANGAN					Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan	Perencanaan									5	01				
3	06	3	06	01	01	01						Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran									5	01	01		
																		Peningkatan sarana dan prasarana.													
																		Peningkatan disiplin													
																		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur													
																		Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan													
																			Administrasi Umum	Jumlah laporan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran						5	01	01	2.03		
																				cakupan sarana dan prasarana perkantoran.											
3	06	3	06	01	01	01	01					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,000,000									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,000,000	5	01	01	2.03	01	
3	06	3	06	01	01	01	02					Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	1,480,000,000									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	1,480,000,000	5	01	01	2.03	02	
3	06	3	06	01	01	01	03					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000									Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000	5	01	01	2.03	13	

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA									PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
Kode									Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	3	06	01	01	01	06				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000	5	01	01	2.03	06	
3	06	3	06	01	01	01	08				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000						Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000	5	01	01	2.03	08	
3	06	3	06	01	01	01	10				Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli	82,529,000						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	82,529,000	5	01	01	2.03	10	
3	06	3	06	01	01	01	11				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000	5	01	01	2.03	11	
3	06	3	06	01	01	01	12				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000	5	01	01	2.03	12	
3	06	3	06	01	01	01	13				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	287,000,000						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	287,000,000	5	01	01	2.03	13	
3	06	3	06	01	01	01	15				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000	5	01	01	2.03	15	
3	06	3	06	01	01	01	16				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000	5	01	01	2.03	16	
3	06	3	06	01	01	01	17				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000	5	01	01	2.03	17	
3	06	3	06	01	01	01	18				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	242,000,000						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	242,000,000	5	01	01	2.03	18	
3	06	3	06	01	01	01	19				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000	5	01	01	2.03	07	
3	06	3	06	01	01	01	20				Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000							Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000	5	01	01	2.03	07	

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																				
Kode										Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode						
3	06	3	06	01	01	01	22					Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah penerima honor	208,418,000									Jumlah penerima honor	208,418,000	5	01	01	2.03	07	
3	06	3	06	01	01	02						<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>																	
3	06	3	06	01	01	02	05					Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	425,000,000							Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	425,000,000	x	x	01	2.03	20		
3	06	3	06	01	01	02	07					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan garasi/tempat parkir	190,000,000									Pengadaan garasi/tempat parkir	190,000,000						
3	06	3	06	01	01	02	22					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000	5	01	01	2.03	28		
3	06	3	06	01	01	02	24					Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000	5	01	01	2.03	30		
												<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran</b>																	
3	06	3	06	01	01	01	21					Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian	Jumlah hasil penilaian	10,000,000									Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah hasil penilaian	10,000,000					
3	06	3	06	01	01	06						<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>																	
3	06	3	06	01	01	06	04					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3,466,000									Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3,466,000	5	01	01	2.02	09



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA									PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																			
Kode									Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode					
3	06	3	06	01	01	06	01				Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	11,520,000							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	11,520,000	5	01	01	2.01	05	
3	06	3	06	01	01	06	05				Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	14,913,000							Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	14,913,000	5	01	01	2.01	01	
3	06	3	06	01	01	06	06				Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	14,888,000							Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD	14,888,000	5	01	01	2.01	02	
3	06	3	06	01	01	15					<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>			<b>PERMINTAHAN</b>	<b>PERDAGANGAN</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>						3	30			
																							3	30	06	2.01		
3	06	3	06	01	01	15	04				Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang	232,000,000							Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur yang sesuai standart							
3	06	3	06	01	01	15	23				Pemantauan bahan bakar minyak	Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000									Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000					





PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA									PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																
Kode				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode							
3	06	3	06	01	01	15	09			Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	27,000,000					Pengendalian Keterbatasan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	27,000,000	3	30	04	2.01	03	
														<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Jumlah informasi terupdate mengenai harga pupuk dan pestisida					3	30	04	2.03		
														Jumlah informasi terupdate mengenai stok pupuk dan pestisida											
3	06	3	06	01	01	15	10			Pengawasan distribusi dan harga pupuk	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000					Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000	3	30	04	2.03	03	
3	06	3	06	01	01	17				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>														
												<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>												
														<b>Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot</b>	Nilai ekspor pertahun										
3	06	3	06	01	01	17	03			Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	40,000,000					Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	40,000,000	3	30	05	2.01	06	
3	06	3	06	01	01	17	14			Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	88,000,000						Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	88,000,000	3	30	05	2.01	06	

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019															
Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode			
3	06	3	06	01	01	17	18			Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000							Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06	3	06	01	01	17	08			Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000	3	30	05	2.01	01
3	06	3	06	01	01	17	09			Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000							Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000	3	30	05	2.01	01
3	06	3	06	01	01	17	10			Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000							Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000	3	30	05	2.01	01
										<b>Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>															
3	06	3	06	01	01	18	30			Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000							Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000	3	30	05	2.01	04
3	07	3	06	01	01	16				<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>														
3	07	3	06	01	01	16	38			Promosi produk industri dilingkungan industri hasil tembakau ( IHT )	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	341,250,000							Jumlah jenis produk/komoditas ekspor	341,250,000	3	30	05	2.01	04
																					3	30	03		

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019										
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
				Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional						Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang dalam berusaha tidak sesuai dengan ketentuan				3	30	03	2.02	
3	06	3	06	01	01	18	17						Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	10,000,000	3	30	03	2.02	01
3	06	3	06	01	01	19														
3	06	3	06	01	01	19	02							Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	97,500,000	3	30	03	2.02	01
3	06	3	06	01	01	19	03						Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	644,250,000	3	30	03	2.02	02
3	06	3	06	01	01	19	09							Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	70,000,000	3	30	03	2.02	02
					Persentase peningkatan manajemen pasar daerah						Persentase peningkatan manajemen pasar daerah									
											Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	target pendapatan retribusi pasar				3	30	03	2.01	

PERMENDAGRI 13 / R/KPD/RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																	
Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode			
3	06	3	06	01	01	18	08			Intensifikasi pendapatan pasar	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	270,500,000						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah wajib retribusi	270,500,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	09			Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000							Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	11			Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	605,000,000							Jumlah pasar yang dipelihara	605,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	12			Pembinaan dan penertiban pedagang pasar	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	132,000,000							Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	132,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	13			Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar	Jumlah pasar yang direvitalisasi	200,000,000							Jumlah pasar yang direvitalisasi	200,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	14			Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya	Jumlah alat mendukung pasar	234,000,000							Jumlah alat mendukung pasar	234,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	22			Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	137,000,000							Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	137,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	29			Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	234,000,000							Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	234,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	01	18	35			Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	758,000,000						Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang diperbaiki bangunan/sarprasnya	758,000,000	3	30	03	2.01	01
										Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Proporsi perdagangan berbasis e-commerce										3	30	07		
								</																	



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA								PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																		
Kode								Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07	3	06	01	01	16	07			Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000							Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000	3	31	02	2.01	02	
3	07	3	06	01	01	16	02			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	165,000,000						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	165,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	23			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	25,000,000							Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	25,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	31			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK konfeksi dan bordir di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000							Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	32			Pelatihan Peningkatan Tekonologi Proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	25,000,000							Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	25,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	16	42			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000							Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	17	18			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000							Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	19				<b>Program pengembangan sentra-sentra industri potensial</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce</b>															

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019														
Kode				Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode						
3	07	3	06	01	01	19	03			Pengembangan dan Pelatihan sentra - sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000					Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000	3	31	02	2.01	05	
3	07	3	06	01	01	17				Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga					3	31	03		
														Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah	Jumlah industri yang mendapat izin/rekomendasi					3	31	03	2.01	
3	07	3	06	01	01	17	03			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	49,000,000					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah IKM yang memenuhi standartisasi	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	06	01	01	17	14			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000						Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	06	01	01	17	21			Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000						Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000	3	31	03	2.01	03
										Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan														
3	06	3	06	01	01	15	22			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	49,000,000						Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	06	01	01	16				Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase peningkatan produksi industri kreatif							Persentase peningkatan produksi industri kreatif						

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019																			
Kode										Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode					
3	07	3	06	01	01	16	01					Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang difasilitasi	90,000,000								Jumlah IKM yang difasilitasi	90,000,000	3	31	03	2.01	03	
3	07	3	06	01	01	16	19					Penyusunan dan pengembangan informasi industri.	Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	25,000,000								Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	25,000,000	3	31	03	2.01	03	
3	07	3	06	01	01	18						<b>Program penataan struktur industri</b>	<b>Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu</b>																
3	07	3	06	01	01	18	03					Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000								Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000	3	31	03	2.01	03	
3	06	3	06	01	01	15						<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>																
3	06	3	06	01	01	15	11					Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	30,000,000							Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Memenuhi Ketentuan Perizinan	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	30,000,000	3	31	03	2.01	02	
3	06	3	06	01	01	15	12					Peningkatan pengawasan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	29,000,000								Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	29,000,000	3	31	03	2.01	02	
<b>Total</b>														<b>14,549,816,000</b>									<b>14,549,816,000</b>						

an. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI  
Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam  
Ub. Kasubbid. Perekonomian  
Selaku Tim Verifikasi

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
KABUPATEN PATI



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019									
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode

IKA YUDIASTANTI, SE  
NIP. 19821125 200801 2 004

RIYOSO, S.Sos. MM.  
NIP. 19711120 199203 1 004



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020																		
Kode						Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	3	06	01	01	20		Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000					Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000	5	01	01	2.03	07
3	06	3	06	01	01	21		Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian	Jumlah hasil penilaian	10,000,000					Administrasi Umum			Jumlah hasil penilaian	10,000,000					
3	06	3	06	01	01	22		Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah penerima honor	208,418,000					Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima honor	208,418,000	5	01	01	2.03	07
3	06	3	06	01	02			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Peningkatan sarana dan prasarana.</b>	<b>1,011,859,000</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>1,011,859,000</b>					
3	06	3	06	01	02	05		Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	425,000,000									425,000,000					
3	06	3	06	01	02	07		Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan garasi/tempat parkir	190,000,000									190,000,000					
3	06	3	06	01	02	22		Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000					Administrasi Umum		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000	5	01	01	2.03	28
3	06	3	06	01	02	24		Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000					Administrasi Umum		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000	5	01	01	2.03	30
3	06	3	06	01	03			<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>Peningkatan disiplin</b>	<b>174,500,000</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>174,500,000</b>					
3	06	3	06	01	03	02		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	154,000,000					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	154,000,000	5	01	01	2.04	02
3	06	3	06	01	03	06		Pembinaan disiplin ASN	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	20,500,000					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan pelatihan formal	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	20,500,000	5	01	01	2.04	09
3	06	3	06	01	05			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>168,000,000</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>168,000,000</b>					
3	06	3	06	01	05	01		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti kursus	168,000,000					Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti kursus	168,000,000	5	01	01	2.04	09
3	06	3	06	01	06			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>67,375,000</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>67,375,000</b>					
3	06	3	06	01	06	01		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11,520,000					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	11,520,000	5	01	01	2.01	05
3	06	3	06	01	06	04		Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3,466,000					Administrasi Keuangan		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3,466,000	5	01	01	2.02	09



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020																			
Kode						Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode					
3	06	3	06	01	15	09			Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	27,000,000			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pengendalian Keterbatasan Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pangkalan LPG bersubsidi 3 KG yang diawasi	27,000,000	3	30	04	2.01	03
3	06	3	06	01	15	10			Pengawasan distribusi dan harga pupuk	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000	3	30	04	2.03	03
3	06	3	06	01	15	11			Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	30,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	30,000,000	3	31	02	2.01	03
3	06	3	06	01	15	12			Peningkatan pengawasan standar mutu	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	29,000,000		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	29,000,000	3	31	02	2.01	02
3	06	3	06	01	15	22			Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	49,000,000		PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	49,000,000	3	31	02	2.01	02
3	06	3	06	01	15	23			Pemantauan bahan bakar minyak	Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000		PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000	3	30	06	2.01	02
3	06	3	06	01	17				<b>Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor</b>	<b>Peningkatan nilai ekspor pertahun</b>	<b>284,000,000</b>		PERDAGANGAN							<b>284,000,000</b>					
3	06	3	06	01	17	03			Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	40,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	40,000,000	3	30	05	2.01	01
3	06	3	06	01	17	08			Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000	3	30	05	2.01	06

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA										PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020										
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06 3 06 01 17 09			Koordinasi program pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06 3 06 01 17 10			Pengembangan kluster produk ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000	3	30	05	2.01	05
3	06 3 06 01 17 14			Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	88,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	88,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06 3 06 01 17 18			Pelatihan teknis manajemen ekspor impor dan mencari peluang pasar Ekspor Asia	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06 3 06 01 18			Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	594,750,000		PERDAGANGAN							594,750,000					
					0															
					Persentase peningkatan manajemen pasar daerah															
3	06 3 06 01 18 08			Intensifikasi pendapatan pasar	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	270,500,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	270,500,000	3	30	03	2.02	01
3	06 3 06 01 18 09			Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar	Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000	3	30	03	2.01	01
3	06 3 06 01 18 11			Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	605,000,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	605,000,000	3	30	03	2.01	01



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020																		
Kode						Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	3	06	01	18	30		Pengembangan promosi industri dan perdagangan	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pameran Dagang lokal	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000	3	30	05	2.01	03
3	06	3	06	01	18	37		Fasilitasi pengembangan usaha perdagangan barang/jasa catering di lingkungan IHT	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	72,250,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	72,250,000	3	30	03	2.01	02
3	06	3	06	01	19			<b>Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan</b>	<b>Persentase pelanggaran pedagang kakilima dan asongan</b>	<b>811,750,000</b>		<b>PERDAGANGAN</b>							<b>811,750,000</b>					
3	06	3	06	01	19	02		Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang mengikuti pembinaan / pelatihan	97,500,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mendapatkan pembinaan/pelatihan dan fasilitasi sarana perdagangan	97,500,000	3	30	03	2.02	01
3	06	3	06	01	19	03		Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	644,250,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	644,250,000	3	30	03	2.02	02
3	06	3	06	01	19	09		Pemberdayaan Usaha bagi PKL dan Asongan di lingkungan IHT	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	70,000,000			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	70,000,000	3	30	03	2.02	02
3	07	3	07					<b>PERINDUSTRIAN</b>		<b>997,750,000</b>									<b>997,750,000</b>					
3	07	3	07	01	16			<b>Program pengembangan industri kecil dan menengah</b>	<b>Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil</b>	<b>496,250,000</b>		<b>PERINDUSTRIAN</b>							<b>496,250,000</b>					
3	07	3	07	01	16	02		1 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan kluster industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	165,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	165,000,000	3	31	02	2.01	04
3	07	3	07	01	16	07		1 Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan	Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang dikunjungi	6,845,000	3	31	02	2.01	06



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA							PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07307011608			1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	55,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang dimonitoring dan dievaluasi	55,000,000	3	31	02	2.01	02
3	07307011632			1 Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK perbengkelan di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	25,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK perbengkelan yang mendapat pelatihan	25,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07307011623			1 Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	25,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKm makanan ringan yg mendapat pelatihan	25,000,000	3	31	02	2.01	05
					<b>Persentase peningkatan produksi industri kreatif</b>															
3	07307011601			2 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya	Jumlah IKM yang difasilitasi	90,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi	90,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07307011619			2 Penyusunan dan pengembangan informasi industri.	Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	25,000,000			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI DAN IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	25,000,000	3	31	04	2.01	01
											Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI DAN IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota			3	31	04	2.01	02
3	07307011631			2 Pelatihan Peningkatan Teknologi Proses teknis produksi IK konfeksi dan bordir di lingkungan IHT	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07307011638			2 Promosi produk industri di lingkungan industri hasil tembakau ( IHT )	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	341,250,000			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pameran Dagang Nasional	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	341,250,000	3	30	05	2.01	02

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020																		
Kode						Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07	3	07	01	16	42		Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	3	07	01	17			Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	264,500,000		PERINDUSTRIAN							264,500,000					
									0															
3	07	3	07	01	17	03		Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	49,000,000			PROGRAM PENGENDALIANIZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	3	07	01	17	14		Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	3	07	01	17	18		Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	3	07	01	17	21		Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000	3	31	02	2.01	05
3	07	3	07	01	18			Program penataan struktur industri	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	88,000,000		PERINDUSTRIAN							88,000,000					
									0															
3	07	3	07	01	18	03		Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000	3	31	02	2.01	02
3	07	3	07	01	19			Program pengembangan sentra-sentra industri berbasis e-commerce	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	149,000,000		PERINDUSTRIAN							149,000,000					
3	07	3	07	01	19	03		Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000	3	31	02	2.01	02
								<b>Total</b>		<b>11,412,471,000</b>									<b>11,412,471,000</b>					

PERMENDAGRI 13 / RKP/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020									
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode

an. Kepala Bappeda  
Tim Verifikasi

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Pati

**RIYOSO, S.Sos. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711120 199203 1 004

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI  
PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPd KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

PERMENDAGRI 13 / RKPd/RENJA							PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020												
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06		PILIHAN	PERDAGANGAN										10,414,721,000					
3	06	01			Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				6,998,487,000					
3	06	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,000,000	5	01	01	2.03	01
3	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	1,480,000,000	5	01	01	2.03	02
3	06	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki				Administrasi Umum		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000	5	01	01	2.03	13
3	06	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000	5	01	01	2.03	06
3	06	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000	5	01	01	2.03	08
3	06	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	82,529,000	5	01	01	2.03	10
3	06	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli				Administrasi Umum		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000	5	01	01	2.03	11
3	06	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli				Administrasi Umum		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000	5	01	01	2.03	12
3	06	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	287,000,000	5	01	01	2.03	13
3	06	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000	5	01	01	2.03	15
3	06	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000	5	01	01	2.03	16
3	06	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000	5	01	01	2.03	17
3	06	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan				Administrasi Umum		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	242,000,000	5	01	01	2.03	18
3	06	01	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan				Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000	5	01	01	2.03	07
3	06	01	01	20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat				Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000	5	01	01	2.03	07





PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	15	10				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengecer pupuk yang diawasi	20,000,000	3	30	04	2.03	03
3	06	01	15	11				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah IKM makanan dan minuman yang dibina	30,000,000	3	31	02	2.01	03
3	06	01	15	12			PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM makanan dan minuman yang diawasi	29,000,000	3	31	02	2.01	02
3	06	01	15	22			PERINDUSTRIAN	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM yang mendapat sosialisasi tentang pemahaman standarisasi	49,000,000	3	31	02	2.01	02
3	06	01	15	23			PERDAGANGAN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah SPBU yang dipantau	9,000,000	3	30	06	2.01	02
3	06	01	17				PERDAGANGAN							284,000,000					
								PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah eksportir yang mengikuti sosialisasi	40,000,000	3	30	05	2.01	01
3	06	01	17	03				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah UKM yang masuk jaringan eksportir	49,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06	01	17	08				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06	01	17	09				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000	3	30	05	2.01	06

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	17	10				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000	3	30	05	2.01	05
3	06	01	17	14				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	88,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06	01	17	18				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000	3	30	05	2.01	06
3	06	01	18				PERDAGANGAN							594,750,000					
														0					
3	06	01	18	08				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	270,500,000	3	30	03	2.02	01
3	06	01	18	09				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000	3	30	03	2.01	01
3	06	01	18	11				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	605,000,000	3	30	03	2.01	01
3	06	01	18	12				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	132,000,000	3	30	03	2.02	01
3	06	01	18	13				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	200,000,000	3	30	03	2.01	01



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	18	14				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah alat mendukung pasar	234,000,000	3	30	03	2.02	01
3	06	01	18	17				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pengawasan Distribusi, Pengawasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	10,000,000	3	30	02	2.06	03
3	06	01	18	22				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	137,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	01	18	29				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	234,000,000	3	30	03	2.02	02
3	06	01	18	35				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	758,000,000	3	30	02	2.01	01
3	06	01	18	06				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang dilatih dan upgrade aplikasi	62,500,000	3	30	07	2.01	03
3	06	01	18	30				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pameran Dagang lokal	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000	3	30	05	2.01	03
3	06	01	18	37				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	72,250,000	3	30	03	2.01	02
3	06	01	19					PERDAGANGAN						811,750,000					



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07	01	16	01				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi	90,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	16	19				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI DAN IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah IKM yang mendapatkan akses informasi	25,000,000	3	31	04	2.01	01
										Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI DAN IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/Kota			3	31	04	2.01	02
3	07	01	16	31				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK konfeksi yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	16	38				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pameran Dagang Nasional	Bertambahnya jumlah pelaku usaha di lingkungan IHT yang dipromosikan	341,250,000	3	30	05	2.01	02
3	07	01	16	42				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	20,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	17				PERINDUSTRIAN							264,500,000					
3	07	01	17	03				PROGRAM PENGENDALIAN ZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	01	17	14				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	17	18				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000	3	31	02	2.01	05

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020														
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07	01	17	21	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	18		Program penataan struktur industri	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	88,000,000		PERINDUSTRIAN						88,000,000					
3	07	01	18	03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Terpantaunya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000	3	31	02	2.01	02
3	07	01	19		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	149,000,000		PERINDUSTRIAN						149,000,000					
3	07	01	19	03	Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencanan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000	3	31	02	2.01	02
<b>Total</b>						<b>11,412,471,000</b>								<b>11,412,471,000</b>						

an. Kepala Bappeda  
Tim Verifikasi

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Pati

**RIYOSO, S.Sos. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711120 199203 1 004

**DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PATI**  
**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD KE DALAM PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019**

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020												
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode			
3	06		PILIHAN	PERDAGANGAN										13,275,221,000				
3	06	01			Program pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6,998,487,000				
3	06	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	10,000,000	5	01	01	2.03 01
3	06	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik, dan pembayaran pajak	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik, air dan telepon yang dibayar	1,480,000,000	5	01	01	2.03 02
3	06	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki				Administrasi Umum		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	50,000,000	5	01	01	2.03 13
3	06	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang kena pajak	21,000,000	5	01	01	2.03 06
3	06	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo				Administrasi Umum		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tercapainya kebersihan kantor dan pasar pragolo	300,000,000	5	01	01	2.03 08
3	06	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang dibeli	82,529,000	5	01	01	2.03 10
3	06	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli				Administrasi Umum		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terbeli	15,000,000	5	01	01	2.03 11
3	06	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli				Administrasi Umum		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat - alat listrik yang terbeli	20,000,000	5	01	01	2.03 12
3	06	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	287,000,000	5	01	01	2.03 13
3	06	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang dibeli	20,500,000	5	01	01	2.03 15
3	06	01	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah BBM dan LPG yang dibeli	289,000,000	5	01	01	2.03 16
3	06	01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli				Administrasi Umum		Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang dibeli	92,000,000	5	01	01	2.03 17
3	06	01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan				Administrasi Umum		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Jumlah perjalanan dinas yang dibayarkan	242,000,000	5	01	01	2.03 18
3	06	01	01	19	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Jumlah honor yang dibayarkan				Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah honor yang dibayarkan	3,818,040,000	5	01	01	2.03 07
3	06	01	01	20	Penyediaan administrasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah dokumen yang dibuat				Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah dokumen yang dibuat	53,000,000	5	01	01	2.03 07

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	01	21										10,000,000					
					Penyediaan pendukung administrasi Kepegawaian	Jumlah hasil penilaian				Administrasi Umum			Jumlah hasil penilaian	10,000,000					
3	06	01	01	22										208,418,000	5	01	01	2.03	07
					Penyediaan pendukung administrasi pengelolaan keuangan dan barang	Jumlah penerima honor				Administrasi Umum		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penerima honor	208,418,000					
3	06	01	02											1,011,859,000					
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana.				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1,011,859,000					
3	06	01	02	05										425,000,000					
					Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli								425,000,000					
3	06	01	02	07										190,000,000					
					Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pengadaan garasi/tempat parkir								190,000,000					
3	06	01	02	22										198,000,000	5	01	01	2.03	28
					Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki				Administrasi Umum		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang diperbaiki	198,000,000					
3	06	01	02	24										198,859,000	5	01	01	2.03	30
					Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki				Administrasi Umum		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	198,859,000					
3	06	01	03											174,500,000					
					Program peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				174,500,000					
3	06	01	03	02										154,000,000	5	01	01	2.04	02
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Jumlah pakaian dinas harian yang dibeli	154,000,000					
3	06	01	03	06										20,500,000	5	01	01	2.04	09
					Pembinaan disiplin ASN	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan pelatihan formal	Prosentase kehadiran ASN tepat waktu per bulan	20,500,000					
3	06	01	05											168,000,000					
					Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				168,000,000					
3	06	01	05	01										168,000,000	5	01	01	2.04	09
					Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti kursus				Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM yang mengikuti kursus	168,000,000					
3	06	01	06											67,375,000					
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				67,375,000					
3	06	01	06	01										11,520,000	5	01	01	2.01	05
					Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar raelisasi kinerja SKPD	11,520,000					
3	06	01	06	04										3,466,000	5	01	01	2.02	09
					Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun				Administrasi Keuangan		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	3,466,000					
3	06	01	06	05										14,913,000	5	01	01	2.01	01
					Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD				Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja SKPD	14,913,000					

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	06	06										14,888,000	5	01	01	2.01	02
					Penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD					Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah buku laporan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksana anggaran ( DPA ) SKPD						
3	06	01	06	07										22,588,000	5	01	01	2.01	07
					Penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD					Administrasi Keuangan		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Semesteran	Jumlah buku laporan penyusunan laporan perkembangan kegiatan SKPD						
3	06	01	15											536,000,000					
					<b>Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>		<b>PEMERINTAHAN</b>	<b>PERDAGANGAN</b>											
					<b>Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)</b>														
					<b>Persentase pengaduan konsumen yang tertangani</b>														
					<b>0</b>														
3	06	01	15	03										10,000,000	3	30	04	2.02	02
					Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa					<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Jumlah unit usaha yang diawasi						
3	06	01	15	04										232,000,000	3	30	06	2.01	01
					Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemetrolgian daerah					<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya ( UTTP ) yang ditera dan tera ulang						
3	06	01	15	06										106,000,000	3	30	04	2.02	03
					Penyelenggaraan pasar murah					<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Jenis dan jumlah barang yang dijual di pasar murah						
3	06	01	15	08										24,000,000	3	30	04	2.02	01
					Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat					<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang diawasi dan jenis barang yang diawasi						





PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020															
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode					
3	06	01	17	09					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah program yang dikoordinasikan	50,000,000	3	30	05	2.01	06	
3	06	01	17	10					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah kluster produk ekspor yang teridentifikasi	40,000,000	3	30	05	2.01	05	
3	06	01	17	14					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti kegiatan konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor	88,000,000	3	30	05	2.01	06	
3	06	01	17	18					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah UKM yang mengikuti pelatihan	17,000,000	3	30	05	2.01	06	
3	06	01	18											Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	3,223,250,000					
															0						
															Persentase peningkatan manajemen pasar daerah						
															0						
															Proporsi perdagangan berbasis e-commerce						
															0						
3	06	01	18	06					PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah pelaku usaha yang dilatih dan upgrade aplikasi	62,500,000	3	30	07	2.01	03	
3	06	01	18	08					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Tercapainya target pendapatan retribusi pasar yang dibebankan APBD	270,500,000	3	30	03	2.02	01	

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	18	09				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah dokumen perencanaan	48,000,000	3	30	03	2.01	01
3	06	01	18	11				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar daerah yang dipelihara	605,000,000	3	30	03	2.01	01
3	06	01	18	12				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kesadaran tertib para pedagang	132,000,000	3	30	03	2.02	01
3	06	01	18	13				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang direvitalisasi	200,000,000	3	30	03	2.01	01
3	06	01	18	14				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah alat mendukung pasar	234,000,000	3	30	03	2.02	01
3	06	01	18	17				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota		Pengawasan Distribusi, Pengawasan, dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah toko / kios penjual minuman beralkohol yang dikunjungi / diawasi	10,000,000	3	30	02	2.06	03
3	06	01	18	22				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang terjaga kebersihannya	137,000,000	3	30	03	2.01	02
3	06	01	18	29				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar	234,000,000	3	30	03	2.02	02
3	06	01	18	30				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Pameran Dagang lokal	Bertambahnya jumlah IKM yang dipromosikan di dalam negeri	460,000,000	3	30	05	2.01	03

PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020													
Kode	Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	06	01	18	35				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Penyediaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah pasar yang di perbaiki bangunan / sarana dan prasarananya	758,000,000	3	30	02	2.01	01
3	06	01	18	37				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha catering yang mengikuti pelatihan	72,250,000	3	30	03	2.01	02
3	06	01	19				PERDAGANGAN							811,750,000					
3	06	01	19	02				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pedagang kaki lima dan asongan yang mendapatkan pembinaan/pelatihan dan fasilitasi sarana perdagangan	97,500,000	3	30	03	2.02	01
3	06	01	19	03				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mendapatkan fasilitasi (tenda / gerobak PKL)	644,250,000	3	30	03	2.02	02
3	06	01	19	09				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah PKL yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	70,000,000	3	30	03	2.02	02
3	07						PERINDUSTRIAN							1,274,595,000					
3	07	01	16				PERINDUSTRIAN							773,095,000					
3	07	01	16	01				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM yang difasilitasi	90,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	16	02				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah IKM yang mendapat pelatihan	165,000,000	3	31	02	2.01	04



PERMENDAGRI 13 / RKPD/RENJA						PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2020														
Kode		Urusan	Bidang Urusan	Program/Kegiatan	Indikator	Pagu Indikatif	Urusan	Bidang Urusan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Kode				
3	07	01	17	03	Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	49,000,000			PROGRAM PENGENDALIANIZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI menengah		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri	Jumlah IKM yang memenuhi standarisasi	49,000,000	3	31	03	2.01	03
3	07	01	17	14	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK garam	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM garam yang mendapat pelatihan	60,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	17	18	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK kerajinan yang mendapat pelatihan	128,000,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	17	21	Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kelompok IK jasa perbengkelan yang mendapat pelatihan	27,500,000	3	31	02	2.01	05
3	07	01	18		Program penataan struktur industri	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	88,000,000		PERINDUSTRIAN						88,000,000					
						0														
3	07	01	18	03	Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir	Terpantanya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Terpantanya kualitas garam konsumsi sesuai dengan standart	88,000,000	3	31	02	2.01	02
3	07	01	19		Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	149,000,000		PERINDUSTRIAN						149,000,000					
3	07	01	19	03	Pengembangan dan Pelatihan sentra -sentra industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	Jumlah IKM pada sentra industri yang mendapat pelatihan	149,000,000	3	31	02	2.01	02
					<b>Total</b>		<b>14,549,816,000</b>								<b>14,549,816,000</b>					

an. Kepala Bappeda  
Tim Verifikasi

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kabupaten Pati

**RIYOSO, S.Sos. MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19711120 199203 1 004











				Nomenklatur
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>
1	1			Pendidikan
1	2			Kesehatan
1	3			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	4			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1	5			Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1	6			Sosial
<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>
2	7			Tenaga Kerja
2	8			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	9			Pangan
2	10			Pertanahan
2	11			Lingkungan Hidup
2	12			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	14			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	15			Perhubungan
2	16			Komunikasi dan Informatika
2	17			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	18			Penanaman Modal
2	19			Kepemudaan dan Olah Raga
2	20			Statistik
2	21			Persandian
2	22			Kebudayaan
2	23			Perpustakaan
2	24			Kearsipan
<b>3</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>
3	25			Kelautan dan Perikanan
3	26			Pariwisata
3	27			Pertanian
3	28			Kehutanan
3	29			Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30			Perdagangan
3	31			Perindustrian
3	32			Transmigrasi
<b>4</b>				<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>
4	1			Sekretariat Daerah
4	2			Sekretariat DPRD
<b>5</b>				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>

5	1			Perencanaan
5	2			Keuangan
5	3			Kepegawaian
5	4			Pendidikan dan Pelatihan
5	5			Penelitian dan Pengembangan
5	6			Penghubung
5	7			Pengelolaan Perbatasan Daerah
<b>6</b>				<b>UNSUR PENGAWAS</b>
6	1			Inspektorat Daerah
<b>7</b>				<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>
	1			Kecamatan
<b>8</b>				<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>
	1			Kesatuan Bangsa dan Politik

|

R